

JAROT SANTOSO

SEPETAK TANAH YANG DIMENANGKAN

GERAKAN PETANI CIPARI REKLAIMING HAK ATAS TANAH TRUKAH



Judul : Sepetak Tanah yang Dimenangkan
(Gerakan Petani Cipari Reklaiming Hak Atas Tanah Trukah)
Penulis : Jarot Santoso
Penyunting : Biko Nabih Fikri Zufar & Arizal Muthahir
Penata Letak : Nabeela
Desain Sampul : Catur Sasongko

Cetakan Pertama, 2022
x + 137 halaman, ukuran 14 cm x 20 cm



Penerbit Semut Api
Yogyakarta

✉ penerbitsemutapi@gmail.com
📱 [penerbitsemutapi](https://www.instagram.com/penerbitsemutapi)

SEPETAK TANAH YANG DIMENANGKAN

SEPETAK TANAH YANG DIMENANGKAN

**Gerakan Petani Cipari Reklaiming
Hak Atas Tanah Trukah**

JAROT SANTOSO



Judul : Sepetak Tanah yang Dimenangkan
(Gerakan Petani Cipari Reklaiming Hak Atas Tanah Trukah)
Penulis : Jarot Santoso
Penyunting : Biko Nabih Fikri Zufar & Arizal Mutahir
Penata Letak : Nabeela
Desain Sampul :

Cetakan Pertama, 2022
x + 137 halaman, ukuran 14 cm x 20 cm
ISBN :



Penerbit Semut Api

Yogyakarta

✉ penerbitsemutapi@gmail.com

📱 [penerbitsemutapi](#)

DAFTAR ISI

BIOGRAFI PENULISvii

PRAKATAix

PENDAHULUAN 1

PERSPEKTIF TEORITIS DAN BEBERAPA KONSEP 5

KONTEKS SOSIAL HISTORIS MASYARAKAT
DAN GERAKAN PETANI CIPARI 21

GERAKAN PETANI DI MASA ORDE BARU:
KETIKA PETANI MELAWAN CENGKERAMAN NEGARA 41

GERAKAN PETANI DI MASA REFORMASI:
"MUSIM PANEN" GERAKAN PETANI CIPARI 71

DINAMIKA GERAKAN PETANI CIPARI 105

PENUTUP 123

DAFTAR PUSTAKA 129

BIOGRAFI PENULIS



Buku *Sepetak Tanah Yang Dimenangkan* merupakan hasil penelitian tentang gerakan petani dalam merebut hak atas tanah yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan swasta di Cipari, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Penulis buku ini, Dr. Jarot Santoso, MS, lahir di Yogyakarta pada 29 Oktober 1957. Ia memperoleh gelar sarjana saat 1983, gelar magister pada 1990, serta gelar doktornya saat 2016 dari Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Awal kariernya sebagai peneliti di Kantor Proyek Bengawan Solo selama 1984–1986. Kemudian menjadi dosen di Program Studi Sosiologi dan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada 1986. Pada 1993 kedua program studi tersebut berdiri menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik hingga sekarang. Di samping itu pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2017–2021. Penulis memiliki minat utama pada kajian masalah pedesaan, pertanian dan keagrariaan.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Agung, atas bimbingan-Nya saya bisa menyelesaikan sebuah buku yang berjudul *Sepetak Tanah Yang Dimenangkan*.

Buku ini ditulis dari disertasi untuk menempuh gelar doktor di bidang sosiologi pada Departemen Sosiologi Pascasarjana FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Karya ini bukan semata-mata hasil karya penulis sendiri, melainkan juga dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada semua pihak yang turut andil dalam proses penyelesaian disertasi.

Pertama, Prof. Dr. Heru Nugroho, MS selaku Ketua Program Doktorat Departemen Sosiologi FISIPOL UGM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh studi. Kedua, Prof. Dr. Partini, SU dan Prof. Dr. Suharko, MSi selaku promotor dan co-promotor yang telah meluangkan waktu dan pikiran selama proses pembimbingan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penilai Prof. Dr. Heru Nugroho, Dr. Arie Sujito, M.Si. dan Dr. Hakimul Ikhwan, M.A., serta tim penguji Dr. Najib Azca, M.A. dan Dr. Sugeng Bayu, M.Si. yang telah banyak memberikan masukan. Penulis juga berterima kasih kepada para petani dan buruh tani di wilayah Cipari, serta para informan yang telah memberikan informasi selama penulis berada di lapangan. Penulis juga merasa berutang budi kepada Hendri Restuadhi, M.Si., M.A.Soc dan Dr. Arizal Mutahir, M.Si. yang selalu memberikan dukungan dan sebagai teman diskusi selama proses penulisan disertasi.

Mengingat karya ini dibatasi oleh waktu dan kemampuan penulis, tentu saja masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh sebab itu, tegur sapa sangat dinanti karena buku ini bukan semata-mata untuk disetujui.

Purwokerto, 13 Agustus 2022

Dr. Jarot Santoso, M.S.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Gerakan petani terkait dengan persoalan tanah tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Filipina misalnya, organisasi gerakan yang dibentuk oleh petani Sumilao dan sekitarnya berhasil mendorong pemerintah untuk melaksanakan program reformasi tanah (Niemela, 2009). Hal sama terjadi pula di Bangladesh. Di negara ini, program reformasi tanah berhasil karena gerakan dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil (Islam, 2013: 66-77). Keberhasilan reformasi tanah di Nepal juga disebabkan gerakan oleh para pemegang hak atas tanah, seperti petani marjinal, buruh tani, penyewa, dan buruh terikat (Adhikari, 2008). Pengalaman di tiga negara tersebut menunjukkan bahwa petani dan buruh tani memiliki kekuatan melakukan gerakan dan berhasil ketika mereka membentuk organisasi gerakan.

Di Indonesia, gerakan petani untuk mendapatkan hak atas tanah telah berlangsung sejak zaman kolonial. Gerakan petani di Indonesia sejak awal memiliki karakter bersifat nasional, baik dari segi orientasi politik, tujuan yang dicapai serta aktivitas organisasi. Sejarah gerakan petani di Indonesia, setidaknya dapat dibedakan berdasarkan masa, yaitu masa Kolonial, masa Orde Lama (Orla), masa Orde Baru (Orba), dan masa Reformasi. Gerakan petani pada masa kolonial terjadi karena pengambilan tanah secara paksa oleh kolonial untuk kepentingan usaha perkebunan. Kebijakan-kebijakan agraria (tanah) pada masa kolonial telah menempatkan rakyat dalam posisi lemah sehingga pada saat itu rakyat melakukan perlawanan

atas kebijakan kolonial (Rachmawati, 2009: 167). Ketika Indonesia memperoleh kemerdekaan, para petani, terutama yang tinggal di kawasan perkebunan melakukan aksi pendudukan tanah perkebunan milik perusahaan asing. Mereka tidak saja menduduki tanah-tanah perkebunan, tetapi juga mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengambil alih perusahaan-perusahaan asing. Mereka juga meminta pemerintah untuk segera merombak struktur agraria Belanda dan menyusun undang-undang agraria yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan (Achdian, 2009: 47).

Gerakan petani pada masa Orla lebih berkaitan dengan intervensi partai politik. Pada masa ini, persoalan tanah dijadikan isu kepentingan partai. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemunculan organisasi petani pertama pascakemerdekaan, yaitu Barisan Tani Indonesia (BTI) yang bernaung di bawah Partai Komunis Indonesia (Achdian, 2009: 37). Sementara pada masa Orba, gerakan petani muncul untuk menuntut hak atas tanah yang dikuasai perusahaan. Kecenderungan umum yang terjadi, perusahaan-perusahaan itu berkolaborasi dengan negara. Mereka memperoleh tanah melalui pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) dari negara. Kebijakan negara tersebut berdampak pada petani langsung. Petani kehilangan akses atas tanah. Hal itu yang menjadikan petani melakukan gerakan untuk merebut kembali tanah yang dikuasai oleh perusahaan. Gerakan petani pada masa Reformasi lebih dicirikan model gerakan petani yang melakukan reklamasi atas tanah yang dikuasai negara maupun swasta (Mustain, 2016: 1).

Pasca-rezim Orba runtuh, gerakan petani dalam reklamasi tanah perkebunan maupun kehutanan hampir terjadi di seluruh Indonesia. Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), gerakan reklamasi petani mengalami intensitas cukup tinggi. Pada 2010 hingga 2011 misalnya, terdapat 106 kasus sengketa lahan antara petani dan perusahaan pengelola perkebunan. Kasus yang terjadi sebagian besar berlangsung di perkebunan besar, yaitu 59%, dan sekitar 22% berlangsung di sektor kehutanan (Nababan, 2012: 79). Di wilayah Jawa, gerakan reklamasi tanah berlangsung terutama di daerah kawasan perkebunan besar. Di Malang Selatan, Provinsi Jawa

Timur misalnya, petani melakukan mengklaim tanah HGU perkebunan Kalibakar (Wahyudi, 2005). Di Jawa Tengah gerakan serupa juga terjadi di Batang dan Pekalongan. Di daerah tersebut petani melakukan mengklaim atas tanah HGU perusahaan perkebunan (Safitri, 2010).

Di Jawa Tengah, selain di Batang dan Pekalongan, kasus serupa juga terjadi di Cipari, Cilacap. Petani di daerah ini juga melakukan gerakan menuntut hak atas tanah HGU yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Gerakan petani di Cipari dilatarbelakangi oleh konflik panjang antara masyarakat sekitar dengan perusahaan perkebunan. Petani Cipari membangun gerakan untuk merebut kembali tanah para leluhur yang dikuasai perusahaan perkebunan lewat tangan negara.

Perjuangan petani Cipari untuk merebut kembali hak atas tanah berlangsung dalam proses panjang. Perjuangan petani Cipari telah dimulai sejak 1960-an¹. Pada saat itu, masyarakat melakukan mengklaim atas tanah perkebunan swasta. Namun, gerakan tersebut gagal. Di era Orba, gerakan serupa berulang lagi pada 1980-an. Namun, upaya yang dilakukan petani untuk menguasai lahan belum berhasil. Ketika Indonesia memasuki era Reformasi pada 1999, ditandai tumbangnya pemerintahan Orba, rakyat kembali melakukan mengklaim. Perubahan politik kala itu melahirkan ruang-ruang kebebasan bagi masyarakat sipil. Gerakan petani dalam menuntut hak atas tanah di era Reformasi kian meluas. Laporan Lounela (2002: 55) menyebut bahwa di sejumlah daerah, banyak organisasi non-pemerintah (Ornop) muncul dan tumbuh. Ornop mengambil peran penting dalam membela kepentingan petani, termasuk petani Cipari. Melalui perjuangan panjang, kurang lebih lima tahun, masyarakat Cipari berhasil mendapat hak menguasai lahan. Tuntutan petani Cipari tidak hanya pada hak menguasai lahan. Mereka juga menghendaki redistribusi lahan dengan sertifikat hak milik². Gerakan petani Cipari berhasil

¹ Hasil wawancara dengan peneliti LPPSLH Purwokerto pada 27 Januari 2012.

² Tuntutan redistribusi tanah yang dilakukan oleh petani berkonsekuensi timbulnya konflik antara petani dengan perusahaan perkebunan. Untuk memahami lebih dalam tentang hal ini,

mendapatkan hak milik atas tanah secara legal dengan kekuatan hukum berupa sertifikat tanah.

Keberhasilan petani Cipari dalam memperjuangkan hak milik atas tanah bukanlah *taken for granted*. Gerakan tersebut berlangsung lama, sejak masa pemerintahan Orla sampai dengan pascapemerintahan Orba. Artinya, petani melakukan gerakan pada perbedaan situasi politik dan berlangsung dalam perbedaan rezim. Dalam perjuangan panjang semacam itu, nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat Cipari dapat dikatakan menjadi tenaga gerakan hingga membuahkan hasil. Keberhasilan gerakan petani Cipari merupakan proses yang dinamis. Proses tersebut melibatkan situasi politik, peran negara, dan upaya yang dilakukan oleh petani itu sendiri dalam memobilisasi sumber daya. Petani melakukan berbagai mobilisasi sumber daya seperti kepemimpinan formal maupun informal, kekuatan budaya, dan kekuatan dalam membingkai isu sebagai strategi gerakan. Berdasarkan kondisi semacam itu, menjadi penting untuk mengkaji lebih lanjut gerakan petani Cipari. Lantas, bagaimana dinamika gerakan petani Cipari di masa Orde Baru dan Reformasi dalam memperjuangkan tanah? Lalu, buah kemenangan apa yang dihasilkan dari gerakan petani Cipari?

baca: Rizza Kamajaya, 2010. Transformasi Strategi Gerakan Petani, *JPP Fisipol UGM*. Yogyakarta, hlm. 9.

BAB II

PERSPEKTIF TEORITIS DAN BEBERAPA KONSEP

2.1 Konsep tentang Gerakan Sosial

Tidak ada konsensus para ahli tentang definisi gerakan sosial (*social movement*). Masing-masing ahli memberikan batasan berbeda sesuai dengan disiplin ilmunya. Dengan demikian, pengertian gerakan sosial begitu beragam. Dalam kamus sosiologi (Turner, 2010: 521) misalnya, gerakan sosial mencakup beraneka ragam bentuk aksi bersama yang bertujuan pada reorganisasi sosial. Tujuan gerakan sosial bisa bersifat luas seperti, pemakzulan pemerintahan yang sedang berkuasa. Bisa juga bersifat sempit seperti, pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan dan sejenisnya.

Tilly (2004: 1) memberikan penjelasan bahwa gerakan sosial adalah organisasi inklusif terdiri dari berbagai kelompok kepentingan. Agen dalam gerakan sosial terdiri dari beragam komponen dan strata dalam masyarakat seperti pekerja, kelompok perempuan, mahasiswa, pemuda, dan intelektual. Masing-masing komponen tersebut mempunyai kepentingan. Berbagai kepentingan masyarakat ini akan terikat bersama-sama oleh keluhan umum. Hal itu umumnya berkaitan dengan kondisi minimalitas demokrasi dalam sistem politik tertentu. Secara implisit Tilly mengasumsikan bahwa ada keterkaitan antara gerakan sosial dan proses demokratisasi. Dengan demikian, dalam sebuah kekuasaan yang berkarakter diktator atau totalitarian, proses demokratisasi hampir nihil. Kondisi itu menyebabkan gerakan sosial sulit berkembang.

Sementara itu, Porta (2006: 20) menyatakan bahwa gerakan sosial terdiri dari mekanisme keterlibatan aktor dalam aksi kolektif. Keterlibatan itu dapat berupa, (i) terlibat dalam hubungan konflik-tual dengan pendukung yang teridentifikasi dengan jelas; (ii) ber-hubungan dengan jaringan informal yang padat; dan (iii) kesatuan kolektif berbagai identitas berbeda. Dalam pengertian tersebut, Porta menekankan dua hal yaitu aktor dan aksi kolektif. Aktor dalam ge-gerakan sosial, merupakan subjek pelaku utama yang menjadi penentu gerakan sosial dan mengelola aksi kolektif.

Aksi kolektif menurut Tarrow dalam Situmorang (2007: 5) dipahami sebagai *contentious collective action*. Hal ini merupakan sebuah aksi bersama yang dipergunakan suatu pihak demi tuju-an tertentu. Menurutnya, pihak yang melakukan aksi semacam itu biasanya tidak memiliki akses cukup terhadap lembaga berwenang dan tindakan yang dilakukan demi klaim baru terhadap sesuatu atau yang berlawanan dengan umum. Esensi pemikiran Porta dan Tarrow (Situmorang, 2007: 5) adalah gerakan sosial melibatkan aktor, aksi kolektif, dan perlawanan.

Perlawanan dalam aksi gerakan sosial memiliki karakter khas. Perlawanan dalam terminologi gerakan sosial bukanlah sebagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak tidak berkuasa untuk merebut ke-kuasaan. Gerakan sosial dapat dianggap sebagai entitas sosial infor-mal dan belum terorganisir. Entitas tersebut terlibat dalam konflik ekstra-institusional meski berorientasi pada tujuan tertentu. Meski gerakan yang dilakukan nyata dalam mencapai tujuan yang ditetap-kan, tetapi gerakan sosial bukanlah entitas terlembaga dan terorga-nisir sebagaimana birokrasi, yakni organisasi formal yang cenderung menjadi instrumen untuk melanggengkan *status quo*. Gerakan sosial dalam bahasa Wilkinson, demikian Tilly (1977: 42) menulis, adalah:

“usaha kolektif yang disengaja untuk mempromosikan peru-bahan dengan cara apapun, dan tidak termasuk kekerasan, ile-galitas, serta revolusi. ... sebuah gerakan sosial berkomitmen untuk melakukan perubahan dan hal itu harus menjadi alasan mendasar bagi organisasi yang didirikan dengan diikuti oleh ke-

mauan, kesadaran, komitmen atau keyakinan, dan partisipasi aktif dari para pengikut atau anggota yang menjadi bagiannya.”

Menurut Wilkinson (Tilly, 1977: 420) gerakan sosial harus memperlihatkan upaya pengorganisasian meskipun dalam bentuk longgar dan informal. Dengan demikian, gerakan sosial sangat mungkin terlembaga dan semi-birokratis. Uraian pemikiran Wilkinson menunjukkan bahwa gerakan sosial adalah aksi kolektif demi sesuatu perubahan. Gerakan semacam itu menjadi kolektif karena perubahan menjadi komitmen para individu dalam suatu organisasi.

Aksi kolektif tidak begitu saja dapat terwujud menjadi gerakan sosial yang mewujudkan hasil. Menurut Tilly (1977: 420) aksi kolektif akan menjadi gerakan sosial jika memiliki lima komponen. Kelima komponen itu adalah kepentingan, organisasi, mobilisasi, kesempatan, dan tindakan kolektif itu sendiri. Berikut ini penjelasan tentang lima komponen tersebut:

1. Kepentingan merupakan upaya untuk memperhitungkan untung rugi yang dihasilkan dari interaksi antarkelompok.
2. Organisasi dilihat untuk mempertimbangkan aspek struktur kelompok. Aspek ini dipandang dapat langsung mempengaruhi kemampuan bertindak demi kepentingan yang ingin diraih oleh sebuah gerakan sosial.
3. Komponen mobilisasi dilihat sebagai sebuah proses sebuah kelompok berusaha memperoleh kontrol kolektif atas sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa tenaga kerja atau barang yang dapat digunakan selama melakukan tindakan atas kepentingan bersama.
4. Komponen kesempatan menyangkut hubungan antara kelompok dengan lingkungan di sekitarnya. Perubahan dalam hubungan tersebut kadang-kadang dapat mengancam kepentingan kelompok. Sebaliknya, kemampuan kelompok untuk membaca situasi dapat

- memberikan kesempatan baru untuk bertindak atas kepentingan-kepentingan kelompok.
5. Tindakan kolektif adalah kesatuan empat komponen di atas yang terwujud dalam satu gerakan kolektif terencana, terukur dan solid.

Uraian Tilly tentang kelima komponen menunjukkan bahwa sebuah gerakan sosial semestinya disertai dengan aksi kolektif yang memadai yaitu; kemampuan untuk merumuskan kepentingan yang jelas, kemampuan untuk melakukan pengorganisasian kelompok, kemampuan untuk memobilisasi sumber daya, kemampuan membaca situasi sekitar, dan kemampuan merumuskan tindakan kolektif secara tepat.

Pemikiran Tilly di atas tampak melengkapi pemikiran Porta, Tarrow dan Wilkinson. Dengan demikian, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa gerakan sosial bukan hanya persoalan aktor yang terlibat dalam aksi kolektif dan gamang di hadapan situasi yang menyebabkan terlibat sebagaimana yang dijelaskan Porta dan Tarrow. Gerakan sosial bukan pula hanya ketegasan komitmen untuk melakukan usaha kolektif demi perubahan seperti yang diungkapkan Wilkinson. Ujung dari gerakan sosial sebagaimana dirumuskan oleh Porta, Tarrow, dan Wilkinson adalah sangat bergantung kepada kemampuan merumuskan kepentingan, pengorganisasian kelompok, melakukan mobilisasi, memilih kesempatan, dan pada akhirnya memilih tindakan yang tepat. Kemampuan yang dimaksudkan oleh Tilly tersebut membuka ruang untuk pengkajian lebih lanjut mengenai tindakan strategis dalam setiap gerakan sosial yang disertai aksi kolektif.

Fligstein dan McAdam (Fligstein, et.al, 2011: 3) memberikan penjelasan mengenai tindakan strategis dalam melakukan gerakan sosial. Menurut mereka tindakan strategis merupakan tindakan aktor dalam tatanan sosial di mana aktor, baik secara individual maupun kolektif, saling berinteraksi dalam satu kesamaan pemahaman tentang tujuan, hubungan, dan aturan-aturan dalam gerakan. Berdasarkan pemahaman itu, Fligstein dan McAdam menyimpulkan

bahwa gerakan sosial merupakan tatanan yang muncul (*emergent orders*), yakni buah dari sekumpulan organisasi gerakan sosial formal dan kelompok aktivis yang lebih bersifat informal. Dalam pengertian yang demikian itu, tindakan strategis sebuah gerakan sosial mestilah mempertimbangkan keberadaan gerakan itu sendiri (tujuan dan tindakan yang dipilih), aktor-aktor yang terlibat di dalamnya (hubungan antaraktor), dan upaya untuk memperhitungkan kemungkinan konflik yang ditimbulkan (aktor maupun kelompok yang memiliki kepentingan berlawanan). Pada titik ini, tindakan strategis bukan hanya mampu menciptakan gerakan dan aksi kolektif melainkan juga melahirkan perilaku kolektif.

Morris dan Herring (1984: 5) menunjukkan bahwa para sosiolog perilaku kolektif (*collective behavior*) melihat gerakan sosial sebagai upaya untuk melakukan perubahan sosial secara non-institusional. Keduanya menguraikan tentang beberapa pemikiran para sosiolog perilaku kolektif tentang gerakan sosial. Beberapa pemikir yang diurai antara lain:

1. Pemikiran Blumer tentang gerakan sosial. Blumer memandang gerakan sosial sebagai usaha kolektif untuk membangun sebuah tatanan baru dalam kehidupan.
2. Pemikiran Lang dan Gladys Engel Lang tentang gerakan sosial. Dalam pandangan sejoli itu gerakan sosial dipahami sebagai tindakan skala besar, luas, dan berkelanjutan, guna mengejar suatu tujuan dan membentuk tatanan sosial di berbagai aspek.
3. Pendapat Turner dan Killian mendefinisikan gerakan sosial sebagai tindakan kolektif berkelanjutan untuk mempromosikan atau menolak perubahan dalam masyarakat atau kelompok di mana mereka berada. Dalam pandangan Turner dan Killian, gerakan sosial dipahami sebagai kolektivitas. Dalam bahasa lain, gerakan sosial dipandang sebagai kelompok dengan keanggotaan tak terbatas (*indefinite*) dan mudah berubah. Pola kepemimpinan lebih banyak

ditentukan oleh respons informal anggota daripada prosedur formal untuk melegitimasi otoritas. Turner dan Killian menegaskan bahwa mempelajari gerakan sosial harus dilihat sebagai fenomena sosiologis. Hal itu dikarenakan gerakan sosial merupakan perilaku kolektif yang unik (*sui generis*), bekerja dengan sifat, proses, dan logika internalnya sendiri. Gerakan sosial, tidak dapat dipahami melalui pendekatan organisasi sosial, norma, dan budaya. Oleh sebab itu, gerakan sosial hanya muncul melalui pengorganisasian selama gerakan sosial tersebut dilakukan. Apabila gerakan tersebut sampai pada titik pelembagaan (*institutionalized*), sejak itu gerakan sosial kehilangan maknanya.

Ulasan Morris dan Herring memang telah sampai pada persinggungan antara perilaku kolektif dengan tindakan strategis dari gerakan sosial seperti yang terdapat dalam pemikiran Fligstein dan McAdam, yakni tindakan strategis harus mampu melahirkan perilaku kolektif. Namun demikian, Morris dan Herring tidak sampai pada penjelasan mengenai bentuk dan isi dari perilaku kolektif.

Tentang bagaimana memahami kaitan antara gerakan sosial dengan perilaku kolektif, ada baiknya jika kita simak kembali pemikiran Della Porta (Porta dan Diani, 2006: 5-6). Menurutnya, gerakan sosial merupakan representasi dari keterkaitan antara ide, individu, peristiwa, dan organisasi. Dalam memahami keterkaitan tersebut, ia menunjukkan adanya empat hal penting yang perlu dipertimbangkan. *Pertama*, perubahan struktural dan transformasi pada pola konflik sosial. *Kedua*, peran representasi budaya dalam konflik sosial. *Ketiga*, proses di mana nilai-nilai, kepentingan, dan ide dapat hidup dalam aksi kolektif. *Keempat*, keterkaitan kondisi sosial, politik, dan budaya dengan gerakan sosial dan keberhasilan gerakan sosial (Porta dan Diani, 2006: 5-6).

Sebagaimana dinyatakan oleh Fligstein dan McAdam sebelumnya, aksi kolektif yang dilakukan dalam gerakan sosial dapat menebarkan benih konflik. Pada satu sisi, di sinilah titik temu Fligstein

dan McAdam dengan Della Porta, yakni gerakan sosial berpotensi menimbulkan konflik. Pada sisi lain, pemikiran Della Porta semakin menegaskan bahwa ide, individu, peristiwa, dan organisasi (kelompok) dapat menjadi satu dan berkaitan dengan lainnya dalam perilaku kolektif. Selanjutnya, hal itu menjadi dasar pijak bagi kemunculan perubahan struktural dan transformasi. Selain itu, gerakan sosial juga merepresentasikan budaya, mempersatukan nilai dan kepentingan, dan mencapai keberhasilan dalam meraih tujuan.

Melihat keberhasilan atau kegagalan suatu gerakan sosial tidaklah mudah. Burstein (1999) mencoba melihat dampak dari gerakan sosial. Menurut dia, ada dua pemikiran yang dianut oleh ilmuwan politik dan sosiologi tentang konsekuensi gerakan sosial. Di satu sisi, mereka percaya bahwa gerakan sosial memiliki konsekuensi penting. Dia merujuk pendapat Gamson yang menyatakan bahwa organisasi gerakan sosial atau *social movement organizations* (SMOs) hanya sebagai bagian dari proses politik demokrasi. Jika organisasi gerakan telah mencapai tujuan, anggota organisasi tersebut mengakhiri apa yang mereka kerjakan.

Beberapa argumen menyebut bahwa SMOs jarang memiliki dampak karena demokrasi bekerja begitu buruk. Sementara pendapat lain beranggapan bahwa SMOs memiliki dampak kecil. Hal itu dikarenakan demokrasi telah bekerja dengan baik. SMOs bekerja buruk karena pemerintah tidak merespons, tidak demokratis (Burstein, 1999: 3). Meskipun demikian, Burstein menyatakan bahwa organisasi kepentingan (SMOs) memiliki sedikit dampak langsung pada tindakan legislatif dalam hal kebijakan publik. Legislatif cenderung tidak merespons ketika SMOs dengan jelas menentang dan mengekspresikan keinginan mayoritas rakyat (Burstein, 1999: 12).

Keterkaitan antara gerakan sosial dengan kebijakan publik juga dikemukakan oleh Meyer (2003: 1). Menurutnya, isi dan proses pembuatan kebijakan berfungsi baik sebagai rangsangan dan hasil gerakan sosial. Memahami hubungan bagaimana kebijakan dan gerakan sosial mempengaruhi satu sama lain, menjadi penting untuk memahami fungsi politik demokrasi kontemporer dan proses demokrasi secara lebih luas. Meyer (2003: 14) menawarkan model dialogis

dalam melihat gerakan sosial, yakni mengenai pengaruh timbal balik protes dan kebijakan, interaksi upaya aktivis dan proses kebijakan, dan dinamika koalisi politik di dalam dan di luar lembaga-lembaga politik. Akhirnya, ia menyimpulkan perubahan kebijakan yang dipengaruhi gerakan sosial, terutama dalam komposisi monopoli kebijakan, menunjukkan bahwa medan memobilisasi gerakan sosial terus bergeser (Meyer, 2003: 14).

Giugni (2009: 468) membedakan tiga dampak kebijakan gerakan sosial, yaitu efek langsung, efek tidak langsung, dan model efek bersama. Model efek langsung menyatakan bahwa gerakan sosial dapat memiliki dampak positif pada kebijakan dengan kekuatan mereka sendiri tanpa adanya dukungan eksternal. Sementara, model efek tidak langsung melihat gerakan sosial memiliki dampak terhadap kebijakan publik melalui proses dua tahap. *Pertama*, mempengaruhi aspek-aspek tertentu dari lingkungan khusus eksternal gerakan sosial, aliansi politik, dan opini publik. *Kedua*, membiarkan untuk mempengaruhi kebijakan. Sedangkan model efek bersama menyatakan bahwa dampak gerakan sosial akan datang ketika sekutu politik atau opini publik yang menguntungkan (atau keduanya) bergabung dengan mobilisasi gerakan. Giugni juga menyebut bahwa ketiga hal tersebut dapat menjadi model efek bersama atau mempunyai variasi masing-masing. Hal itu tergantung pada kombinasi spesifik dari faktor-faktor varian model efek yang terjadi.

Berdasarkan pada pengertian tentang gerakan sosial serta dampak yang dihasilkan dari gerakan sosial seperti dipaparkan di atas, maka gerakan petani Cipari dalam menuntut hak atas tanah bisa disebut sebagai suatu gerakan sosial. Hal itu dikarenakan petani Cipari terlibat dalam aksi kolektif. Dalam bahasa Della Porta (2006: 20), petani Cipari berhubungan secara konfliktual dengan perkebunan. Dalam melakukan konflik itu, petani Cipari membangun banyak jaringan dan membentuk kesatuan kolektif berbagai identitas berbeda. Selain itu, dalam gerakan petani Cipari ada nilai-nilai, kepentingan, dan ide dalam aksi kolektif. Di samping itu, juga ada keterkaitan kondisi sosial, politik, dan budaya dengan gerakan petani (Porta dan Diani, 2006: 5-6).

2.2. Teori Struktur Kesempatan Politik, Struktur Mobilisasi, dan Proses *Framing*

2.2.1. Struktur Kesempatan Politik (*Political Opportunity Structure-POS*)

Teori POS menjelaskan bahwa gerakan sosial terjadi disebabkan oleh perubahan struktur politik. Dalam pengertian gerakan sosial, perubahan struktur politik dapat dilihat sebagai kesempatan maupun peluang (McAdam et.al, 2004: 29). Struktur kesempatan politik mencakup hampir semua aspek gerakan sosial seperti, budaya, lembaga politik, krisis, aliansi politik, dan perubahan kebijakan. Para ahli berkeyakinan bahwa kesempatan politik mendorong kemunculan gerakan sosial dari waktu ke waktu. Keyakinan tersebut menunjuk kepada aspek-aspek dinamis tentang lingkungan politik yang berubah dan memungkinkan atau mendorong kemunculan gerakan (Gamson dan Meyer, 1996: 275). Kesempatan dapat membentuk atau memaksa gerakan, tetapi gerakan dapat menciptakan kesempatan juga (Gamson dan Meyer, 1996: 276).

Dalam konteks gerakan sosial, Peter Eisinger (Situmorang, 2007: 3) menyatakan bahwa revolusi terjadi bukan di saat kelompok masyarakat dalam kondisi tertekan. Revolusi terjadi melalui aksi kolektif yang muncul ketika suatu sistem politik dan ekonomi yang tertutup mengalami keterbukaan. McAdam dan Tarrow (Buffonge, 2001: 8) menjelaskan mekanisme tentang teori POS lebih spesifik. Keduanya menggunakan sejumlah variabel untuk menjelaskan munculnya sebuah gerakan sosial. Variabel-variabel yang dimaksud adalah; (i) terbukanya atau tertutupnya sistem politik yang terlembaga; (ii) stabilitas dan keberpihakan elit yang biasanya mendasari pemerintahan; (iii). kehadiran sekutu elit; (iv) kapasitas negara dan kecenderungan untuk represi. Oleh karena itu, teori POS selalu berhubungan dengan sumber daya eksternal. Namun demikian, variabel-variabel yang dijelaskan Tarrow memiliki kelemahan.

Kelemahan utama Tarrow adalah dia hanya menjelaskan teori POS seperti struktur kelembagaan sistem politik dan kekuasaan di antara para aktor. Oleh sebab itu, Kriesi (Situmorang, 2007:6)

menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor struktur kelembagaan formal, informal, dan strategi yang dipergunakan oleh pelaku perubahan dalam menjelaskan teori POS. Sejalan dengan Kriesi, Brockett (Situmorang, 2007: 6) mengajukan isu serupa bertalian dengan teori POS. Ia menekankan sejumlah aspek, seperti akses kelembagaan bagi para pelaku perubahan, kehadiran sekutu, fragmentasi elite, dan konflik yang mempergunakan cara represif. Sementara itu Ruch (Situmorang, 2007: 6) menambahkan sejumlah aspek dalam menjelaskan teori POS. Aspek-aspek itu adalah akses terhadap partai politik, kapasitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan, dan struktur aliansi.

Di antara ahli gerakan sosial, teori POS sering disebut dengan istilah teori Proses Politik. Dalam beberapa hal, Teori Proses Politik ini mirip dengan teori Mobilisasi Sumber Daya. Teori tersebut, misalnya, cenderung menekankan komponen tentang struktur sosial bagi perkembangan gerakan sosial, yaitu kesempatan politik. Teori Proses Politik berpendapat bahwa ada tiga komponen penting untuk pembentukan gerakan, yaitu kesadaran melakukan pemberontakan, kekuatan organisasi, dan kesempatan politik.

Komponen kesadaran melakukan pemberontakan mengacu pada ide-ide tentang kekurangan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat dan keluhan yang muncul dalam sistem sosial. Ide ini berangkat dari pemahaman bahwa individu-individu atau anggota masyarakat merasa seperti sedang dianiaya atau merasakan ketidakadilan dalam sistem sosial. Kesadaran melakukan pemberontakan adalah rasa kolektif atas ketidakadilan bahwa anggota gerakan sosial merasa dan berfungsi sebagai motivator untuk sebuah organisasi gerakan sosial. Kesadaran itulah yang selanjutnya menumbuhkan kekuatan organisasi dan disuburkan dengan kesempatan politik yang ada. Berdasarkan pemahaman itu, dapat dikatakan bahwa muncul dan berkembangnya gerakan petani Cipari secara tidak langsung dipengaruhi oleh lingkungan politik. Artinya, pada saat kesempatan politik sangat terbatas, bentuk gerakan petani Cipari akan berbeda dibandingkan dengan pada saat sistem politik mengalami keterbukaan.

2.2.2. Struktur Mobilisasi

McAdam, et.al. (1994: 3) mendefinisikan struktur mobilisasi sebagai kendaraan kolektif baik formal maupun informal. Melalui kendaraan ini masyarakat dapat dimobilisasi dan berbaur dalam aksi bersama. Struktur mobilisasi menekankan pada jaringan informal, organisasi gerakan sosial, dan kelompok-kelompok di lapis menengah. Kemunculan dan keberhasilan gerakan menuntut hak atas tanah yang dilakukan petani Cipari dapat dijelaskan dengan teori Mobilisasi Sumber Daya (*resources mobilization*). Analisis yang dilakukan bersandar pada pemahaman bahwa mengorganisasi gerakan sosial harus memiliki kepemimpinan yang kuat dan sumber daya yang cukup. Hal itu merupakan pijakan dalam melihat gerakan sosial. Selain itu, McAdam juga menyebutkan bahwa ada hubungan antara kesempatan, struktur mobilisasi, dan proses framing. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menghubungkan ketiga faktor tersebut. Hal itu akan menghasilkan pemahaman lebih lengkap tentang dinamika gerakan sosial. Mobilisasi sumber daya menjadi satu komponen penting dalam membawa gerakan sosial petani Cipari kepada hasil sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, tidak salah kiranya memperhatikan pemikiran Gamson dan Meyer (1996: 275) yang menekankan perlunya untuk menyimak proses kemunculan dan perkembangan berkelanjutan gerakan sosial itu sendiri.

McCarthy (2004: 144) menjelaskan bahwa struktur mobilisasi adalah sejumlah cara yang dilakukan oleh kelompok gerakan sosial untuk melebur dalam aksi kolektif, termasuk di dalamnya taktik dan bentuk organisasi gerakan sosial. Struktur mobilisasi juga memasukkan posisi-posisi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan memasukkan posisi-posisi sosial ini adalah untuk mencari lokasi-lokasi dalam masyarakat yang dapat dimobilisasi. Di sini, unit-unit sosial seperti, keluarga, jaringan pertemanan, asosiasi tenaga sukarela, tempat kerja, dan bahkan beberapa elemen-elemen negara dapat menjadi lokasi-lokasi sosial bagi struktur mobilisasi.

Rekrutmen gerakan yang memanfaatkan posisi-posisi sosial dapat menghasilkan gerakan sosial yang kuat. Lofland, seperti dikutip

oleh McCarthy (2004: 144), menyatakan bahwa terdapat beragam kelompok organisasi formal yang berdedikasi dalam membentuk struktur mobilisasi. Kita biasanya mengelompokkan mereka sebagai organisasi gerakan sosial seperti, relawan ‘lokal independen’ yang, jika berdasarkan simbol kelompok, mirip kelompok ‘akar rumput’ dan mungkin merupakan bentuk struktur lokal yang paling khas dan merupakan bentuk pengelompokan di masyarakat lapisan bawah.

Salah satu komponen teori struktur mobilisasi dalam gerakan sosial adalah teori Mobilisasi Sumber Daya. Teori ini menekankan pentingnya sumber daya dalam pengembangan dan keberhasilan gerakan sosial. Sumber daya di sini meliputi pengetahuan, uang, media, tenaga kerja, solidaritas, legitimasi, serta dukungan internal dan eksternal dari elite kekuasaan. Teori ini berpendapat bahwa gerakan sosial berkembang ketika individu yang mempunyai keluhan dapat memobilisasi sumber daya yang cukup untuk mengambil tindakan. Jenkins (Frank, 2012: 45-46), secara khusus menguraikan lima kriteria di mana gerakan sosial dapat melakukan mobilisasi sumber daya. Kelima kriteria itu adalah:

1. Aksi gerakan sosial adalah rasional. Hal itu merupakan reaksi adaptif terhadap biaya dan manfaat untuk tindakan yang berbeda.
2. Tujuan dasar dari tindakan mereka berhasil dicapai melalui kelembagaan (misalnya, melalui proses politik seperti lobi, membantu kampanye politik, menantang hukum melalui pengadilan, dan masih banyak lagi).
3. Organisasi kelompok dan peluang untuk tindakan kolektif merupakan faktor utama dalam keberhasilan gerakan untuk jangka pendek dan panjang.
4. Memusatkan pada organisasi formal yang terstruktur dan efektif dalam memobilisasi sumber daya ketimbang desentralisasi struktur gerakan informal.
5. Tujuan dan strategi untuk mencapai target gerakan dan potensi keberhasilan gerakan bisa berwujud dan diukur.

Pandangan serupa dikemukakan oleh McCharthy dan Zald (1977: 1212-1241). Mereka menyatakan bahwa studi tentang gerakan sosial harus menekankan teori sumber daya. Penekanan tersebut meliputi:

1. Agregasi sumber daya (uang dan tenaga kerja)
2. Agregasi sumber daya memerlukan bentuk organisasi
3. Dalam memperhitungkan keberhasilan atau kegagalan gerakan, perlu mempertimbangkan keterlibatan individu dan organisasi dari luar kolektivitas gerakan sosial
4. Biaya dan manfaat untuk menjelaskan keterlibatan individu dan organisasi dalam kegiatan gerakan sosial.

Sementara itu, Morris (1984: 49-51) menyatakan bahwa teori Mobilisasi Sumber Daya dan teori Proses Politik semestinya juga menekankan urgensi bahwa gerakan sosial sebagai gerakan yang terorganisir, rasional, melembaga, dan memiliki masa depan politik. Mobilisasi sumber daya, dengan demikian, meliputi proses pengorganisasian, kepemimpinan, kesempatan politik, dan sifat dari sistem politik.

Kepemimpinan merupakan faktor integral dalam pengembangan dan kelangsungan gerakan sosial. Dalam teori Mobilisasi Sumber Daya, para pemimpin memfasilitasi gerakan sosial dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan tujuan, menerapkan strategi dengan mengurangi biaya kelompok, dan memanfaatkan kesempatan untuk tindakan kolektif. Pemimpin memainkan banyak peran, seperti menumbuhkan ide-ide dasar gerakan, merencanakan metode yang tepat untuk menyebarkan ide-ide, serta membuat dirinya diterima dan mempengaruhi orang untuk bertindak atas nama kelompok.

Sekedar untuk menjadikan catatan bahwa kesempatan tindakan kolektif tidak selamanya terbuka. Tantangan bagi gerakan adalah mengidentifikasi dan memanfaatkan kesempatan dalam melakukan tindakan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, struktur kesempatan politik mengacu pada kondisi dalam sistem politik yang memungkinkan tindakan kolektif menjadi sukses atau menekan sis-

tem politik. Tradisi politik dan budaya dapat menentukan berbagai fasilitasi, atau sebaliknya, menghasilkan penindasan dari tindakan kolektif. Meskipun masyarakat melakukan suatu tindakan, namun jika tidak terorganisir dengan baik maka akan mendapatkan tekanan. Sebaliknya, keberhasilan gerakan lebih mungkin muncul ketika tindakan berskala kecil diambil dalam sistem politik yang ada dan ketika organisasi ini lebih terorganisir dan lebih kuat.

2.3. Proses *Framing*

Proses *framing* ini terutama untuk memahami keberhasilan atau kegagalan suatu gerakan sosial. Seperti halnya dengan kesempatan politik, proses *framing* merupakan hal penting dilakukan untuk keberlanjutan gerakan. Melalui proses *framing* itulah aksi kolektif muncul. Sebuah gerakan sangat bergantung pada pemahaman bersama para pendukungnya atas isu yang menjadi persoalan. Dalam gerakan yang matang, proses *framing* memiliki dua fungsi (McAdam, et.al, 2004: 16). *Pertama*, membentuk kesadaran dan keputusan strategis pada organisasi gerakan. *Kedua*, menjadi subjek intens atas kontestasi antara representasi aktor kolektif yang mewakili gerakan, negara, dan gerakan ke arah yang sebaliknya.

Snow dan Banford (Situmorang, 2007: 10) mengungkapkan bahwa keberhasilan gerakan sosial tergantung pada sejauh mana mereka memenangkan pertempuran atas makna. Ini bertalian dengan upaya para pelaku perubahan mempengaruhi makna dalam kebijakan publik. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan gerakan, para pelaku perubahan memiliki tugas membuat framing masalah-masalah sosial yang dikaitkan dengan ketidakadilan. Proses *framing* ini dilakukan dalam upaya untuk meyakinkan kelompok sasaran yang beragam dan, dengan cara itu, mereka terdorong untuk melakukan perubahan. James M. Jasper (2007: 91) menyatakan bahwa ada dua komponen dalam proses *framing*, yaitu diagnosis dan prediksi. *Framing* diagnosis adalah mendefinisikan masalah dan sumbernya. Sedangkan *framing* prediksi adalah melakukan identifikasi strategi yang tepat, guna memperjuangkan masalah yang dihadapi.

Menurut Zald (1977: 1212-1241), ada hal penting yang dapat memainkan peran dalam membentuk *framing*. *Pertama*, kontradiksi budaya dan alur sejarah. Ia menyatakan bahwa kesempatan politik dan mobilisasi yang tercipta melalui ketegangan budaya dan kontradiksi yang berlangsung lama dapat menjadi bahan *framing*. Misalnya, keluhan dan ketidakadilan yang menyebabkan terjadinya aksi kolektif. *Kedua*, proses framing sebagai aktivitas strategis. Kontradiksi budaya memberikan kesempatan bagi kader-kader gerakan, seperti pemimpin, anggota, aktivis dan simpatisan untuk melontarkan isu yang menarik perhatian. Dengan cara demikian, sebuah gerakan sosial dapat melahirkan dukungan kolektif.

Guna mencapai kelompok sasaran, para aktor gerakan membutuhkan alat berupa media guna membuat *framing*. Kontekstualisasi *framing* dapat terjadi dalam interaksi dengan melalui beberapa media seperti, media cetak, media elektronik, buku, pamflet, dan sejenisnya. Para aktivis gerakan sosial bisa memanfaatkan warung kopi, kafe dan tempat pertemuan sebagai media berdiskusi guna menyosialisasikan isu agar masyarakat berkeinginan dan mau terlibat dalam gerakan sosial. Mekanisme *framing* semacam itu, sering disebut berkaitan dengan budaya. Penekanan baru pada teori dewasa ini adalah memahami gerakan sosial melalui budaya kelompok sasaran, seperti kepercayaan kolektif, ideologi, nilai-nilai, dan makna. Proses *framing*, dengan demikian, adalah eksplorasi ke dalam identitas dan tindakan kolektif dari gerakan dan organisasi.

BAB III

KONTEKS SOSIAL HISTORIS MASYARAKAT DAN GERAKAN PETANI CIPARI

Cipari dapat disebut sebagai pusat perkebunan besar untuk Kabupaten Cilacap. Tanah di wilayah ini luas dan sangat subur dengan kontur perbukitan. Meskipun demikian, akses penduduk pada tanah dapat dikatakan rendah. Hal itu disebabkan sebagian besar tanah dikuasai perusahaan perkebunan besar. Sementara sebagian lagi dikuasai pihak kehutanan. Hanya sedikit tanah yang dikuasai penduduk. Dalam perkembangannya, penguasaan tanah penduduk semakin kecil. Tanah yang ada harus diwariskan ke anak cucu. Keadaan ini mendorong penduduk untuk melakukan tuntutan terhadap perkebunan. Mereka melakukan tuntutan agar sebagian tanah perkebunan dapat digarap oleh mereka. Tuntutan atas tanah yang dilakukan penduduk ini menimbulkan hubungan konfliktual dengan perkebunan. Bagian ini menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat Cipari, struktur penguasaan tanah, sejarah perkebunan, dan sejarah gerakan petani.

3.1. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Kultural Masyarakat Cipari

Sebagai daerah pegunungan, kepadatan penduduk Cipari tergolong rendah yaitu sekitar 512 jiwa per km². Jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 62.135 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 29.628 jiwa dan perempuan sebanyak 25.510 jiwa. Jumlah kepala keluarga di Cipari (KK) sebanyak 18.622 KK. Mereka berdiam dalam rumah tangga, yakni sekitar 14.519 rumah tangga. Penghuni rumah tangga di Cipari rata-rata 4 jiwa dalam setiap rumah tangga. Jumlah KK lebih besar bila dibandingkan dengan rumah tangga dikarenakan dalam

satu rumah tangga kadang terdiri lebih dari satu KK. Hal itu merupakan kecenderungan umum pada masyarakat desa. Masih banyak dijumpai anggota keluarga yang telah menikah kadang masih tinggal serumah bersama orang tuanya.

Tingkat ekonomi warga di Cipari rata-rata rendah. Hal ini berkaitan dengan jenis mata pencaharian penduduk. Data statistik setempat memperlihatkan bahwa penduduk yang bekerja di sektor pertanian sekitar 20.879 orang. Sedangkan penduduk yang bekerja di beberapa sektor lain adalah sebagai berikut, pada sektor industri sebanyak 2.022 pekerja, pada sektor perdagangan sebanyak 2.305 pekerja, pada sektor angkutan sebanyak 575 pekerja, pada sektor jasa sebanyak 2.939 pekerja, dan pada sektor lain sebanyak 5.006 orang.

Penduduk yang bekerja sebagai buruh dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis buruh. Penduduk yang bekerja sebagai buruh tani sebanyak 9.831 orang. Penduduk yang bekerja sebagai buruh industri sebanyak 1.545 orang. Penduduk yang bekerja sebagai buruh bangunan sebanyak 2.486 orang. Di Cipari ada beberapa penduduk yang bekerja sebagai pegawai negeri dan TNI/Polri, yakni sebanyak 437 orang.

Memperhatikan data di atas, penduduk yang bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani pemilik dan buruh tani, berjumlah cukup besar, yaitu 30.716 orang (49,42%). Angka ini mengisyaratkan bahwa penduduk yang bergantung pada tanah cukup besar. Sekalipun ketergantungan terhadap tanah relatif besar, tetapi rata-rata penguasaan tanah warga setempat rendah, yaitu 0,30 hektar. Tanah yang dimiliki petani berupa tanah sawah atau tanah pekarangan. Kondisi ini menyebabkan ekonomi rumah tangga sebagian besar penduduk masih di bawah kecukupan. Hal ini terlihat terutama pada penduduk yang bekerja sebagai buruh, baik buruh tani maupun buruh lainnya. Warga yang berstatus sebagai buruh tani, kebanyakan juga sebagai buruh lepas di perusahaan perkebunan guna mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Pilihan pekerjaan warga ini tidak bisa dilepaskan dari lingkungan di mana mereka hidup. Tiga perusahaan perkebunan besar yang ada di Cipari banyak menampung warga sekitar. Pilihan menjadi buruh perkebunan adalah pilihan ra-

sional. Bagi warga Cipari, bekerja sebagai buruh lepas di perkebunan keberlangsungan pendapatan lebih terjamin dibandingkan sebagai buruh tani di sawah.

Buruh perkebunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu buruh tetap dan buruh harian lepas. Mereka yang bekerja sebagai buruh tetap, ada yang bermukim di areal perkebunan dengan menempati rumah-rumah “bedeng”. Mereka yang menempati rumah di areal perkebunan kebanyakan sebagai mandor atau keamanan kebun. Para buruh ini selain memperoleh gaji bulanan biasanya mereka mengolah tanah di areal perkebunan untuk usaha tani. Bahkan, di antara mereka ada yang memelihara hewan ternak. Oleh sebab itu, ekonomi rumah tangga mereka lebih baik. Buruh harian lepas menerima upah sebanyak Rp 27.500,00 per hari kerja. Jam kerja mereka mulai pukul 05.00 sampai pukul 11.00 pagi hari dan pada siang hari mulai pukul 13.00 sampai pukul 18.00 sore.

Lapangan kerja yang terbatas dan akses tanah yang rendah menjadikan banyak penduduk usia muda (usia kerja) merantau ke luar daerah. Mereka merantau terutama ke kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta dan sekitarnya. Sebagian lain, menjadi tenaga kerja di luar negeri, seperti Malaysia, Taiwan, Korea dan Hongkong. Sebagian besar pekerja di luar negeri adalah perempuan muda, baik masih dalam status lajang maupun sudah menikah. Mereka kebanyakan bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Pekerja migran laki-laki asal Cipari relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pekerja migran perempuan. Mereka kebanyakan menjadi buruh di perkebunan, bangunan, dan industri. Pekerja migran laki-laki sebagian besar menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Buruh migran menjadi andalan para pemuda laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan desa tidak mampu lagi menampung tenaga kerja. Jika ada kesempatan, para remaja lebih memilih bekerja di luar kota. Di samping upahnya lebih besar, bekerja di luar kota lebih prestisius.

Pendapatan sebagai buruh migran di luar negeri berkisar antara 4-5 juta rupiah per bulan. Hasil kerja di luar negeri dapat mencukupi kebutuhan hidup, bahkan bisa untuk kegiatan investasi. Sebagian

buruh migran berinvestasi dalam bentuk tanah, sebagian lain membangun rumah. Banyak pekerja migran yang membangun rumah. Jika kita masuk ke wilayah padukuhan rata-rata rumah mereka terbuat dari papan atau bambu dan masih banyak rumah yang berlantai tanah. Berbeda dengan warga yang menjadi buruh migran di luar negeri. Rumah mereka biasanya berdinding batu bata, berlantai keramik, dan berjendela kaca. Realitas ini seolah memberi kesan, buruh migran identik dengan rumah bagus. Status rumah bagus ini tentu saja hanya untuk menyebut rumah warga setempat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Cipari secara umum rendah. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga prasejahtera ada sebanyak 6.170 (42,49%) rumah tangga. Rumah tangga sejahtera 1 sebanyak 4.023 (27,70%) rumah tangga. Rumah tangga sejahtera 2 sebanyak 24.922 (33,90%) rumah tangga. Rumah tangga sejahtera 3 sebanyak 2.734 (18,83%) rumah tangga. Terakhir, rumah tangga sejahtera 3+ sebanyak 566 (0,03%) rumah tangga.

Tingkat kesejahteraan warga Cipari dapat dilihat dari bentuk rumah. Rumah-rumah di dusun yang berdekatan dengan areal perkebunan kebanyakan terbuat dari papan dan bambu. Sebagian rumah-rumah ini masih berlantai tanah. Rumah yang terbuat dari batu bata jumlahnya sedikit. Data terakhir tentang bangunan rumah warga Cipari menunjukkan sebagai berikut: rumah permanen sebanyak 3.257 (22,25%) rumah; rumah semi permanen sebanyak 4.096 (27,98%) rumah; rumah kayu sebanyak 3.612 (24,68%) rumah; rumah bambu sebanyak 3.670 (25,07%) rumah.

Kesejahteraan penduduk di Cipari juga dapat dilihat dari peralatan rumah tangga, penggunaan lampu penerangan dan alat transportasi. Pada kalangan rumah tangga prasejahtera, peralatan yang dimiliki sederhana seperti, meja, kursi, dan peralatan sederhana penunjang kehidupan sehari-hari. Penerangan rumah di Cipari sebagian besar sudah menggunakan listrik. Hanya sedikit rumah yang menggunakan lampu minyak. Beberapa rumah masih menggunakan penerangan listrik dari tetangga. Kebiasaan yang tampak dalam berlangganan listrik di Cipari adalah satu rumah tangga memasang listrik, kemudian listrik itu disalurkan ke sejumlah rumah. Cara ini

dilakukan agar rekening listrik bisa dibayar dengan cara patungan di antara rumah tangga yang memanfaatkan listrik untuk penerangan.

Penduduk Cipari sebagian besar berpendidikan sekolah dasar. Data terakhir yang peneliti dapatkan adalah penduduk berpendidikan SD sebanyak 24.527 (43,47%) orang. Sebanyak 7.349 (13,02%) merupakan lulusan SLTP. Sebanyak 3.184 (5,64%) orang lulusan SLTA. Sementara hanya sekitar 636 (1,12%) orang yang mengenyam pendidikan akademi/perguruan tinggi. Mereka yang menyelesaikan pendidikan dasar sebagian besar didominasi penduduk yang berusia lima puluh tahun ke atas. Bahkan, di antara mereka tidak tamat SD. Menurut keterangan Bapak Sakino selaku perangkat desa, dahulu keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya sangat rendah. Selain biaya besar, jarak dari tempat tinggal ke sekolah yang jauh menjadikan orang tua enggan menyekolahkan anaknya. Tak dimungkiri, anak-anak yang berasal dari desa-desa di kawasan perkebunan harus berjalan kaki cukup jauh untuk menuju sekolah dasar. Apalagi jika ke SMP, jaraknya sekitar 10 kilometer. Bagi yang tidak mempunyai biaya, memilih anak-anak mereka hanya tamat SD.

Di luar pendidikan formal (sekolah umum), warga Cipari merasa bangga jika anak-anaknya *mondok* di pondok pesantren. Menurut orang tua yang mengirim anak mereka ke pondok pesantren, selain belajar ilmu agama, di pondok pesantren juga mendapat ilmu pengetahuan umum. Pandangan ini ada di sebagian besar penduduk kelas menengah ke bawah. Bagi kelas menengah ke atas, mereka tetap memilih menyekolahkan anak di sekolah umum. Jika memungkinkan, mereka menginginkan anak mereka sekolah sampai jenjang perguruan tinggi. Jumlah pesantren di daerah Cipari cukup banyak (13 pesantren). Setiap pesantren rata-rata menampung hingga 100 santri. Bagi warga kelas menengah ke atas, pondok pesantren yang dituju adalah pesantren yang berada di luar Cipari, seperti Cilacap dan kota lain di wilayah Jawa Tengah. Beberapa keluarga mengirim anak mereka ke pesantren di Yogyakarta dan Jawa Timur.

Masyarakat Cipari dapat disebut sebagai masyarakat muslim. Pada saat buku ini sedang disusun (2013), jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 97,84%. Beragama Katolik sekitar 0,59%. Ber-

agama Kristen sekitar 0,99%. Sekitar 0,05% beragama Hindu, dan lainnya sekira 0,06%. Aktivitas keagamaan di daerah ini sangat baik. Kegiatan pengajian, serta kegiatan membaca Al Qur'an, *yasinan*, *mujadahan*, dan *tahlil* hampir dijumpai setiap hari. Kegiatan ini ada di setiap dusun (dukuh), bahkan kegiatan-kegiatan serupa dilakukan pada kelompok tingkat RW. Kalangan orang tua melakukan kegiatan keagamaan secara rutin, yaitu *mujadahan*, *yasinan*, dan *tahlil*. Acara *yasinan* biasanya dilaksanakan setiap malam Jumat atau setiap selapan hari dan biasanya dijumpai pada malam Jumat atau Kamis malam. Acara ini diikuti oleh para bapak dan ibu. Kegiatan keagamaan yang dilakukan anak-anak biasanya berlatih membaca Al Qur'an atau Iqra. Guru ngaji bagi anak-anak kebanyakan para pemuda atau pemuda warga setempat yang fasih membaca Al Qur'an.

Kegiatan keagamaan yang bersifat massal, seperti pengajian, juga sering dilaksanakan. Kegiatan semacam ini biasanya dilaksanakan dalam rangka peringatan hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan *Nuzulul Qur'an*. Pengajian dalam rangka memperingati hari besar Islam ini biasanya mendatangkan kiai dari luar desa untuk memberikan tausiyah. Seperti desa-desa lain di Jawa, mayoritas muslim Cipari mengikuti paham Nahdlatul Ulama (NU). Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan dalam menjalankan syariat atau rukun Islam adalah kegiatan keagamaan seperti yang dilakukan oleh umat NU. Misalnya, pada bulan Syaban masyarakat melaksanakan upacara *sadranan*, yaitu ziarah kubur. Sebelum ziarah kubur di tingkat dusun, biasanya mereka mengadakan tahlil dalam rangka kirim doa kepada warga maupun saudara yang telah meninggal. Pada bulan berikutnya, yaitu bulan Ramadhan sebagian besar warga, baik laki-laki maupun perempuan, melaksanakan shalat tarawih 21 rakaat. Shalat tarawih ini sebagian besar diikuti oleh anak-anak, laki-laki maupun perempuan.

Tempat ibadah berupa masjid ada di setiap desa. *Langgar* atau *mushola* hampir ada di setiap dusun. Bangunan *mushola* yang ada di setiap dusun kebanyakan berbahan kayu dan papan. Orang luar biasanya tidak mengenali bangunan *mushola/langgar* karena bangunan itu sangat sederhana. Bangunan *mushola* seperti itu bukan hal yang

aneh. Sebagian besar rumah penduduk yang tinggal di pelosok adalah rumah yang terbuat dari kayu atau bambu.

Budaya masyarakat Cipari dapat digolongkan sebagai budaya Jawa yang berkiblat ke budaya Surakarta-Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari pakaian untuk upacara adat perkawinan, kelahiran, sunatan, termasuk upacara kematian. Dalam hal perkawinan adat, adat yang digunakan sama dengan adat Jawa seperti *siraman*, *sungkeman*, *midodareni*, upacara *panggih*, dan lainnya. Dalam upacara kehamilan, biasanya masyarakat melaksanakan selamatan untuk kehamilan bulan keempat, dan/atau bulan ketujuh, yang disebut *ngupati* dan *mitoni*. Dalam upacara kematian, kegiatan *tahlil* (berdoa dengan cara Islam) dilakukan pada hari pertama sampai dengan hari ketujuh. Kegiatan *tahlil* juga dilakukan pada hari keempat puluh, seratus hari dan terakhir seribu hari setelah kematian. Semua keluarga di Cipari, tidak pandang status sosial, melaksanakan upacara ini. Khusus dalam penggunaan bahasa, warga Cipari menggunakan bahasa Banyumasan dalam interaksi keseharian. Dalam bidang seni budaya, pagelaran wayang kulit bisa ditemukan di daerah ini. Pagelaran wayang kulit biasanya digelar dalam acara sunatan. Biasanya, pihak yang menggelar pertunjukan ini adalah keluarga dari kalangan kelas menengah ke atas. Acara ini sering diselenggarakan oleh desa dalam acara *sedekah bumi*, pada masa pascapanen raya. Ini dimaksudkan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberi rezeki kepada umatnya. Selain wayang kulit, *genjringan* dan *ebeg* banyak dijumpai di daerah ini.

Seiring dengan perkembangan teknologi, warga Cipari sudah banyak yang memiliki gawai. Teknologi ini hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat tidak lagi memandang gawai sebagai barang mewah dan hanya untuk orang kota. Mereka sudah memandang gawai sebagai alat komunikasi sekaligus sebagai media hiburan.

3.2. Sejarah Perkebunan dan Penguasaan Tanah di Cipari

Cipari adalah nama wilayah administratif tingkat kecamatan. Kecamatan ini terletak di bagian barat Kabupaten Cilacap. Sebelumnya

wilayah ini menjadi bagian wilayah Kecamatan Sidareja. Kebijakan pemekaran pada 1992 menjadikan Cipari berdiri sendiri sebagai wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kecamatan Sidareja, Kecamatan Kedungreja, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Majenang, dan Kecamatan Wanareja. Luas wilayah Kecamatan Cipari sebesar 121,7 km². Luasan itu terdiri atas 11 desa. Lima desa yang ada di kecamatan ini, yaitu Desa Mekarsari, Desa Sidasari, Desa Kutasari, Desa Caruy dan Desa Karangreja (lokus dalam studi ini) merupakan desa tertinggal.

Gambaran sekilas secara administratif kelima desa itu adalah sebagai berikut. Desa Caruy dipecah menjadi tiga desa pada ada saat Cipari menjadi kecamatan. Ketiga desa itu adalah Desa Karangreja, Desa Kutasari, dan Desa Caruy itu sendiri. Sementara Desa Mekarsari merupakan pemekaran dari Desa Cisuru. Sedangkan Desa Sidasari merupakan hasil pemekaran Desa Pegadangan. Kelima desa ini terletak di sebelah utara Kabupaten Cilacap. Jarak setiap desa ke pusat pemerintahan kecamatan kurang lebih ± 10 km. Sementara jarak ke kabupaten sekitar 60 km. Jalan menuju ke lima desa itu dapat ditempuh melalui kota kecamatan, dan atau melewati Kecamatan Majenang.

Kondisi geografis daerah Cipari dan juga daerah Cilacap bagian barat pada umumnya berupa dataran tinggi yang sangat subur. Sejak zaman kolonial Belanda, daerah Cipari sudah dirancang menjadi kawasan perkebunan besar. Oleh karena itu, warga Cilacap pada umumnya menyebut nama perkebunan yang ada di daerah itu dengan sebutan Cipari.

Sebagian besar wilayah Cipari berupa perbukitan. Kondisi jalan yang menghubungkan antardesa sangat jelek. Jalan antardesa masih berupa batu yang ditata dan diratakan. Sebagian jalan ada tanda-tanda pernah dilakukan pengaspalan. Namun, ketiadaan perawatan menjadikan keadaan jalan-jalan itu rusak penuh lubang.

Jalan yang menghubungkan kota kecamatan menuju Desa Mekarsari berupa jalan aspal yang di beberapa bagian sudah mulai berlubang. Perjalanan dari Desa Mekarsari menuju Desa Sidasari harus melewati areal perhutanan dan perkebunan. Kondisi jalan sangat

jelek, berliku-liku dan naik-turun. Kondisi jalan datar baru bisa ditemui begitu sampai di Desa Sidasari. Perjalanan dari Desa Sidasari menuju Desa Karangreja harus melalui jalan batu, berliku dan naik turun. Desa Karangreja merupakan desa yang paling atas dibandingkan desa lain di wilayah Cipari. Meskipun kondisi jalan rusak, tetapi kendaraan roda empat bisa melewati jalan tersebut.

Sarana transportasi umum belum bisa menjangkau semua desa yang berada di wilayah Cipari. Desa yang dilewati transportasi umum hanya Desa Mekarsari, Desa Cipari dan Desa Mulyadadi. Warga desa yang mau bepergian lebih banyak mengandalkan sepeda motor, sepeda atau jalan kaki. Jika mau menggunakan kendaraan umum seperti bus, minibus dan sejenisnya harus menuju ke jalan besar terlebih dulu. Jalan besar itu adalah jalan kabupaten atau jalan nasional.

Bagi masyarakat desa (petani), tanah merupakan alat produksi utama. Tanpa tanah, mereka tidak mendapatkan pangan, sebab tanah adalah sumber dan asal-usul pangan (Tauchid, 1962: 5). Pada umumnya, petani memiliki atau menguasai tanah karena warisan orang tua. Oleh karena itu, luasan penguasaan tanah bergantung pada luasan tanah yang dimiliki atau dikuasai orang tuanya. Sistem pewarisan ini berjalan sepanjang waktu, sehingga tanah yang dikuasai rumah tangga petani semakin kecil. Selain melalui pewarisan, penguasaan tanah bisa terjadi karena pembelian, sewa dan *sakap*.³

Penguasaan tanah bagi petani Cipari pun demikian. Mereka memperoleh tanah karena warisan orang tua. Luasan tanah yang dikuasai petani bergantung pada status sosial-ekonomi orang tua. Mereka yang berasal dari keluarga kelas atas, memiliki tanah relatif lebih luas dibandingkan dengan mereka yang berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah. Sistem pewarisan ini, kemudian membentuk struktur penguasaan tanah dalam masyarakat. Seiring perkembangan waktu, tanah yang dimiliki petani semakin sempit. Kondisi ini menjadikan petani berupaya untuk mendapatkan tanah dengan cara membuka hutan atau perkebunan yang ada di sekitarnya. Membuka

³ *Sakap* adalah menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil

tanah dengan cara itu, disebut oleh masyarakat Cipari dengan istilah *trukah*.⁴

Penguasaan dan penggarapan tanah seperti di Cipari tidak berbeda dengan petani di daerah lain di sekitar kawasan perkebunan. Berdasarkan literatur, sekitar 1930–an, di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di kawasan perhutanan dan perkebunan, masyarakat setempat memperoleh dan menguasai tanah dengan cara membuka lahan (Lounela dan Zakaria, 2002: 37). Lahan yang dibuka oleh masyarakat adalah lahan kawasan perhutanan dan perkebunan. Setelah hutan dibuka oleh masyarakat, lahan itu kemudian dijadikan areal persawahan, perladangan dan pekarangan. Lahan pekarangan ini, kemudian dijadikan tempat permukiman. Di sini letak awal mula masyarakat menguasai tanah. Tanah yang dikuasai masyarakat dari hasil membuka hutan itu kemudian digarap secara turun-temurun melalui sistem pewarisan. Sistem pewarisan dalam penggarapan tanah seperti ini biasa terjadi di masyarakat pedesaan seiring dengan penambahan penduduk.

Pada zaman pendudukan Jepang, pernah terjadi paceklik (krisis pangan). Kondisi itu menjadikan para petani semakin giat melakukan usaha tani. Upaya untuk memperluas areal pertanian pun dilakukan. Mereka memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk usaha tani. Masyarakat semangat melakukan pembukaan lahan sebab pemerintah Jepang mendukung para petani dalam rangka mengatasi krisis pangan. Bahkan, pemerintah Jepang menganjurkan agar para petani menanam tanaman pangan di atas tanah di antara tanaman perkebunan. Pada saat itu, petani mulai menguasai dan menggarap tanah meskipun luasannya sangat kecil. Penguasaan dan penggarapan tanah itu berlanjut hingga masa kemerdekaan Indonesia.

Riwayat penguasaan tanah masyarakat Cipari seperti disebutkan di atas, dikisahkan juga oleh seorang informan bernama Bangin. Ia adalah tokoh masyarakat setempat, berusia 80 tahun lebih. Dia termasuk tokoh yang disegani oleh masyarakat, serta pernah menjadi lurah belasan tahun. Sebelumnya, merupakan seorang pegawai sipil

⁴ *Trukah* adalah bahasa masyarakat setempat yang memiliki arti membuka hutan untuk dijadikan lahan persawahan dan permukiman.

di kepolisian. Sekarang ia bertempat tinggal di dekat kantor Kecamatan Cipari. Ia disegani oleh jajaran aparat kecamatan, termasuk aparat Polisi Sektor Cipari dan Komando Rayon Militer Cipari. Pak Bangin menceritakan riwayat petani melakukan *trukah*:

“Para petani bisa menguasai tanah dengan cara *trukah*, yaitu membuka lahan hutan maupun kebun untuk dijadikan areal persawahan dan pekarangan. Sebab, bagi orang desa satu-satunya cara untuk mendapatkan penghasilan hanya dengan menggarap tanah. Masyarakat melakukan *trukah* sekitar 1930-an. Setelah tanah itu dibuka dan dikuasai masyarakat, kemudian dimanfaatkan untuk ditanami tanaman pangan. Penggarapan tanah itu berlangsung lama, sejak tanah itu dibuka sampai dengan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan masyarakat masih menggarap tanah tersebut sampai dengan 1965.” (Wawancara pada 23 Maret 2013).

Mengenai riwayat tanah *trukah*, peneliti juga melakukan pelacakan kepada informan lain. Pak Bangin memberikan informasi agar peneliti menemui tokoh masyarakat bernama Sugeng. Setelah peneliti selesai melakukan wawancara kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah Bapak Sugeng. Kebetulan rumah Pak Sugeng satu jalur dengan rumah Pak Bangin. Rumah Pak Sugeng terletak di tepi jalan menuju Desa Mekarsari. Rumah itu berjarak hanya 2 kilometer dari kantor kecamatan. Kira-kira pukul 11 pagi peneliti tiba di rumah Pak Sugeng. Ketika peneliti menyinggung tanah hasil *trukah*, Pak Sugeng menuturkan sebagai berikut:

“Warga Cipari melakukan *trukah* itu dua kali. Pertama, pada tahun kira-kira 1930-an sebelum Jepang datang. Kedua, *trukah* membuka tanah perkebunan. Kalau saya ikut *trukah* membuka lahan di sekitar kebun yang tidak dimanfaatkan oleh pihak perkebunan. *Trukah* tanah perkebunan itu dilakukan pada 1960-an. Pada waktu itu, tanah tersebut tidak dimanfaatkan oleh perkebunan karena berada di antara dataran tinggi sehingga pada saat musim hujan selalu *blabur* (kebanjiran), dan pada saat kemarau tidak ada air. Kami bersama tetangga dan warga dari desa lain bekerja sama untuk membuka lahan karena waktu itu lagi paceklik. Niat kami adalah membuka lahan untuk ditanami padi atau tanaman lainnya sehingga mendapatkan pangan. Pikiran kami kalau tanah itu sudah dibuka dan bisa ditanami nanti bisa diwariskan ke

anak cucu. Karena kami melakukan *trukah*, maka tanah itu kami kerjakan untuk usaha tani.” (Wawancara pada 26 Maret 2013).

Mendasarkan keterangan dari kedua informan di atas, warga Cipari memang pernah membuka lahan sebanyak dua kali. *Pertama*, membuka tanah negara yang belum dikuasai pihak lain pada 1930. *Kedua*, membuka lahan tanah perkebunan yang tidak dimanfaatkan oleh perusahaan. Lahan hasil *trukah* pertama itu kemudian digarap dan dikuasai oleh masyarakat sampai dengan pascakemerdekaan. Selanjutnya, pemberlakuan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Rakyat semakin mempertegas hak penguasaan atas tanah tersebut bagi masyarakat Cipari. Pada saat itu, semua tanah yang dikuasai masyarakat diterbitkan kartu kuning sebagai bukti penguasaan atau pemilikan tanah. Melalui kartu kuning ini, tanah yang dikuasai seseorang bisa dipindahtangankan hak penguasaannya kepada pihak lain dengan sistem jual-beli. Pada saat itu, banyak petani menjual tanah ke petani lain dengan bukti kartu kuning. Kekuatan hukum kartu kuning pada saat itu sama dengan sertifikat tanah.

Meskipun Cipari sebagian besar perbukitan, tetapi tanah di daerah ini sangat bagus. Kesuburan tanah ini justru mengakibatkan ketimpangan dalam pemilikan dan atau penguasaan tanah. Sebagian besar tanah di daerah ini dikuasai perusahaan besar perkebunan, termasuk perhutanan. Cipari memang dikepung oleh kawasan perkebunan dan perhutanan. Semua perkebunan yang ada, terlepas siapa yang memiliki, masyarakat menyebut perkebunan Cipari. Cipari identik dengan perkebunan.

Warga Cipari rata-rata hanya memiliki tanah 0,3 hektar meliputi tanah sawah dan pekarangan. Khusus tanah sawah, rata-rata petani hanya menguasai 0,2 hektar. Sesuai dengan kondisi geografis, lahan yang digunakan untuk persawahan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan untuk perkebunan dan tegalan. Berdasarkan data monografi, lahan sawah keseluruhan sebanyak 2.150 hektar. Luasan itu terdiri atas sawah dengan irigasi teknis seluas 651 hektar, irigasi setengah teknis seluas 198 hektar, irigasi sederhana seluas 172 hektar, dan tadah hujan seluas 1.126 hektar.

Daerah Cipari sebagian besar dataran tinggi (perbukitan), lahan yang digunakan untuk persawahan yaitu tanah yang berlokasi di antara perbukitan. Lahan ini dikenal dengan sawah tadah hujan. Sawah ini hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi tanaman. Pola tanam pada sawah ini setahun dua kali tanam. Pada musim hujan ditanami padi, sesudah itu palawija. Pola tanam ini tergantung kondisi curah hujan. Jika musim hujan mencapai lima bulan bisa tanam dua kali, akan tetapi jika musim hujan kurang dari lima bulan hanya sekali tanam. Sawah jenis ini pada musim kemarau kekeringan dan di saat musim hujan banjir. Kondisi seperti ini terjadi setiap tahun. Banjir tahunan di daerah ini terjadi akibat luapan sungai Cikawung dan Ciaur serta tampungan air hujan dari dataran tinggi sekitarnya. Persawahan dalam kondisi setiap tahun kekeringan dan atau banjir itu meliputi lima desa yang menjadi lokasi dalam buku ini. Tanah sawah jenis ini disebut masyarakat setempat sebagai tanah *garung*.

Ketimpangan struktur penguasaan tanah di Cipari berdampak munculnya konflik agraria. Ketimpangan penguasaan tanah ini terjadi sejak negeri ini terbentuk akses masyarakat ke sumber agraria menjadi terbatas. Sebagai ilustrasi, perkebunan ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada saat itu penguasaan dan atau pemilikan tanah warga tergolong cukup. Namun, pertambahan penduduk menjadikan tanah yang dimiliki warga berangsur-angsur mengalami penyempitan karena diwariskan ke anak. Kenyataan itu menjadi wajar jika masyarakat berjuang dan menuntut tanah perkebunan. Bagi orang desa (petani) tanah merupakan alat produksi utama untuk bertahan hidup.

Sejarah perkebunan di wilayah Cipari, juga perkebunan di Indonesia pada umumnya, hampir secara keseluruhan merupakan eks perkebunan milik perusahaan asing Belanda. Setelah Indonesia merdeka, sebagian perusahaan asing diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan itu berubah menjadi perusahaan perkebunan negara yang sekarang menjadi PTPN. Selebihnya, bekas perkebunan milik perusahaan asing Belanda dikelola oleh perusahaan swasta nasional. Semua perkebunan yang ada di Cipari pun demikian juga.

Ada tiga perusahaan besar yang berada di Cipari, yaitu PTPN IX, PT Djawatie dan PT Rumpun Sari Antan (RSA). Tiga perusahaan itu mengelola komoditas karet dan kakao. PTPN IX dan PT Djawatie mengelola perkebunan karet. Sementara komoditas kakao dikelola oleh PT RSA. Lahan perkebunan PTPN IX berlokasi di sebelah barat, dikenal dengan nama kebun Kawung Mluwung. PT Djawatie mengelola lahan di sebelah selatan. Sedangkan PT RSA mengelola lahan di sebelah utara. Jumlah lahan yang digunakan oleh tiga perusahaan mencapai luas 4.833 hektar. Areal kawasan hutan negara di wilayah ini seluas 484 hektar. Sedangkan hutan rakyat seluas 402 hektar yang tersebar di beberapa desa. Areal hutan rakyat hampir sebanding dengan areal hutan negara. Hal ini dikarenakan sebagian besar desa di Cipari berupa dataran tinggi atau perbukitan. Masyarakat setempat selalu menyebut dirinya sebagai *wong nggunung* (orang pegunungan) dengan alasan tinggal di daerah pegunungan.

Pascakrisis ekonomi 1998, mulai dikembangkan perkebunan rakyat di bawah bimbingan Dinas Perkebunan Cilacap. Areal perkebunan rakyat mencapai 200 hektar. Komoditas utama perkebunan rakyat yaitu tanaman karet. Tanaman karet menjadi pilihan karena di sekitar Cipari ada dua perusahaan besar berkomoditas karet sehingga petani bisa menjual hasil karet ke perusahaan tersebut. Perkebunan karet rakyat ini pada 2008 sebagian besar sudah berproduksi.

Seperti disebutkan di atas, dua perkebunan swasta besar ada di daerah ini, yaitu PT Djawatie dan PT RSA. Perkebunan milik PT RSA menjadi perhatian dalam buku ini. Perusahaan ini memperoleh izin Hak Guna Usaha (HGU) di bekas tanah yang dulu pernah disewa oleh pengusaha Belanda bernama Jan Albertus Van Der Roef. Perjanjian sewa itu berlangsung sekitar 1890 dengan jangka waktu 75 tahun hingga berakhir pada 1967. Pada 1967 tanah tersebut beralih ke PT Rumpun. Pada 1980 perusahaan tersebut berganti nama menjadi PT Rumpun Antan yang berkedudukan di Jalan Sendawa nomor 4 Semarang. Pada 1990 PT Rumpun Antan menjalin kerjasama dengan PT Astra Agro Niaga dengan nama PT Rumpun Sari Antan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No 196 Semarang dan Jalan S. Parman Kav. No 107 Jakarta. Tanah HGU PT RSA berakhir

pada 31 Desember 1999, kemudian diperpanjang mulai 2004 hingga 2030.

3.3. Sejarah Gerakan Petani Cipari

Akses yang minim terhadap tanah mengakibatkan petani kekurangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi itu memaksa petani untuk menggarap tanah yang ada di sekitar perkebunan. Tanah tersebut sebenarnya ada dalam penguasaan perkebunan. Namun, tanah itu tidak dimanfaatkan oleh perkebunan, maka petani menggarap tanah tersebut. Penggarapan tanah tersebut dilakukan oleh sejumlah petani yang tinggal di sekitar perkebunan. Para petani itu berasal dari Desa Mekarsari, Desa Caruy, Desa Sidasari, Desa Kutasari dan Desa Karangreja.

Berdasarkan informasi masyarakat setempat dan wawancara sejumlah informan, terungkap bahwa kemunculan gerakan petani menuntut hak atas tanah kepada perkebunan berawal dari tanah garapan petani yang hilang. Seperti telah disebutkan di atas, tanah garapan petani tersebut adalah hasil kerja keras mereka dalam membuka hutan. Tanah tersebut telah mendapatkan legitimasi dari pemerintah berupa “kartu kuning”. Selama kurang-lebih 12 tahun pasca-penerbitan kartu kuning, petani harus kehilangan tanah. Pada 1962, terjadi pengusiran oleh pihak perkebunan dibantu oleh aparat TNI. Padahal, saat itu sejumlah warga sudah membangun rumah tinggal dan sudah pula mengkapling tanah untuk makam. Gambaran ini disampaikan oleh Sugeng sebagai berikut:

“Sekitar 1962 para penggarap tanah perkebunan itu diusir oleh pihak perkebunan. Dalam pengusiran petani, perkebunan dibantu oleh aparat keamanan negara. Pengusiran paksa tersebut juga disertai ancaman. Jika di antara petani ada yang menolak, rumahnya akan dibakar. Masyarakat yang terusir kemudian ditampung dan dikumpulkan di suatu tempat (areal). Daerah tersebut kemudian dikenal sebagai daerah *tapungan* (penampungan warga).” (Wawancara pada 8 April 2012).

Kekerasan mewarnai pengusiran warga, sebagaimana yang terungkap dalam pernyataan di atas. Kekerasan tersebut merefleksikan

kesewenangan dalam penggunaan kekuasaan, dalam hal ini militer. Di samping itu, kasus pengusiran tersebut, menunjukkan bahwa negara mengingkari sesuatu yang telah disahkannya sendiri. Warga Cipari saat itu, masih memegang satu-satunya bukti sah kepemilikan atas tanah kala itu yaitu “kartu kuning”. Bukti tersebut, dapat dikatakan, menjadi senjata andalan bagi warga untuk terus memperjuangkan hak-haknya atas tanah. Dalam situasi semacam itu, siapa pun yang hadir dan memberikan bantuan—dalam bentuk apapun—terhadap warga akan dianggap sebagai “dewa penolong” dan itulah yang didapatkan oleh Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi *underbouw* Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada saat itu, BTI giat memperjuangkan hak warga masyarakat (terutama masyarakat desa) atas tanah.

Melalui BTI, Aidit memperkenalkan ‘Tujuh Setan Desa’ yaitu, tuan tanah, lintah darat, kapitalis birokrat, bandit desa, penguasa jahat yang memihak para penghisap, tengkulak, dan pengijon (Aidit, 1964: 27). BTI dijadikan sebagai kendaraan untuk memberantas ketujuh setan desa tersebut. Warga masyarakat Cipari melihat BTI pada sisi pandang seperti yang diungkapkan Sugeng, penasehat SeTAM:

“Pada 1960–an, Barisan Tani Indonesia berambisi dan bersemangat memperjuangkan tanah bagi petani, utamanya buruh tani tidak bertanah. Organisasi ini juga membantu para petani Cipari yang sedang menghadapi persoalan tanah dengan pihak perkebunan. Mereka bersama masyarakat di sekitarnya saling berkomunikasi dan *berembug* memperjuangkan agar tanah tersebut menjadi milik masyarakat.” (Wawancara 8 April 2012).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa perjuangan warga Cipari secara lebih terarah mulai terjadi dalam kurun yang sama saat mereka terusik hak atas tanah miliknya. BTI yang menjadi motor gerakan tersebut. Pada saat itu, BTI memang organisasi yang mapan dan solid. Para pengurus dan anggotanya adalah orang-orang cerdas dan militan. Visi dan misi organisasi BTI memang pada persoalan agraria. Tidak hanya pada penguasaan tanah, tetapi mencakup hubungan ekonomi produksi sektor pertanian seperti, sistem sewa, saka, upah buruh dan sejenisnya. BTI berjuang keras bersama petani untuk merebut tanah yang hilang, tanah yang dikuasai oleh perke-

bunan. Seorang informan yang menjadi saksi perjuangan tersebut, DF menyatakan:

“Meskipun saya dulu PNI tetapi saya mengakui bahwa BTI memang sangat rajin membantu warga agar mereka dapat memiliki lahan tersebut. Para petani dari zaman *segitu* gigih sekali berjuang karena memang mereka membutuhkan lahan itu untuk menopang hidup mereka.” (Wawancara pada 8 April 2012).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa peran BTI cukup signifikan. Di samping itu, pernyataan di atas juga menunjukkan betapa upaya dan peran yang dilakukan oleh BTI mendapat simpati dari simpatisan partai lain. Di antara hiruk pikuk politik 1960–an, PKI melalui BTI merupakan organisasi paling radikal dalam memperjuangkan *landreform*. Bahkan, PKI dikenal sebagai satu-satunya partai yang memasukkan *landreform* sebagai program kerja (Politbiro CC PKI, 1966: 241). PKI dan BTI pula yang dikabarkan melakukan pembunuhan terhadap mereka yang dituduh sebagai “Tujuh Setan Desa”. Namun demikian, perjuangan BTI tersebut menyeret pula masyarakat dalam kesengsaraan. Menurut DF:

“Upaya memperjuangkan tanah tersebut sempat terhenti karena adanya peristiwa G30S. Di zaman itu, para petani ditangkapi atau hilang begitu saja. Hampir semua petani yang ikut berjuang dituduh menjadi anggota BTI/PKI. Padahal, sebetulnya petani tidak terlalu tahu apakah mereka terlibat dalam peristiwa itu. Yang mereka tahu, BTI mau membantu mereka sehingga mereka jadi semangat untuk berjuang. Lagi pula, zaman *segitu*, petani tidak mengira bahwa BTI/PKI adalah organisasi/partai terlarang. Karena, waktu itu, PKI adalah partai yang sah. Malah, setahu saya, jadi partai pemenang di Cilacap.” (Wawancara pada 8 April 2012).

Pergolakan politik antara 1965 hingga beberapa tahun setelah itu sungguh luar biasa. Terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966 tampaknya menjadi dasar legitimasi bagi pihak penguasa saat itu untuk menumpas PKI hingga akar-akarnya. Dalam situasi semacam itu, siapa yang sesungguhnya PKI, siapa pula sim-

patisan, hingga mereka yang tidak tahu apa dan siapa PKI itu, dapat terseret setiap saat, entah dibuang ke Pulau Buru hingga dibunuh tanpa dapat dilacak diketahui jasadnya. Pernyataan di atas menunjukkan betapa *chaotic*-nya situasi saat itu. Petani Cipari yang hanya punya keinginan untuk memperjuangkan nasib hak milik atas tanah terseret dalam pusaran politik yang tak dipahami hanya karena organisator gerakan itu adalah BTI. Dalam kesaksian Sugeng:

“Seperti lazimnya partai yang sah, bahkan waktu itu nomor satu di Cilacap. Maka tak mengherankan jika wilayah Cipari merupakan basis PKI. Dan dengan alasan itulah, TNI lebih mudah menerapkan modus agar tanah tersebut bisa dikuasai oleh TNI. Dan di kemudian hari sengketa itu dikenal sebagai sengketa antara warga dengan TNI yang berbisnis dengan nama PT. Rumpun Sari Antan.” (Wawancara pada 8 April 2012).

Pernyataan di atas, setidaknya menunjukkan dua hal. *Pertama*, tidak selamanya partai didukung karena ideologi. Bagi masyarakat Cipari kala itu, upaya memperjuangkan hak milik atas tanah itulah yang menjadi orientasi mereka. Seandainya wilayah Cipari menjadi basis PKI, tidak begitu saja dapat dikatakan bahwa seluruh warga di sana mengetahui atau meyakini komunisme, apalagi Leninisme. Sebagaimana di wilayah-wilayah pedesaan lainnya yang pada saat itu memiliki kasus pertanahan bernasib serupa, warganya dituduh PKI dan ditangkap (Ismail Al Habib & Safitri, 2005: 5-8). *Kedua*, ‘kerjasama’ yang intens antara BTI dengan warga Cipari menjadi legitimasi tegas bagi aparat militer untuk mengambil alih kepemilikan tanah warga.

Pada kurun waktu 1965 hingga beberapa tahun setelah itu, tentara di beberapa daerah terlibat dalam pengambilalihan bangunan-bangunan seperti, gedung pertemuan dan sekolah-sekolah milik warga Tionghoa yang diidentikkan dengan komunisme. Demikian pula di Cipari. Dalam konflik dengan TNI pascaperistiwa 1965 tersebut, masyarakat Cipari tidak hanya kehilangan warga mereka, melainkan juga harta milik paling berharga mereka; tanah. Beberapa tahun kemudian, melintas era Orde Baru hingga Reformasi, pertentangan warga dengan TNI tidak kunjung reda. Hal ini menjadi bukti

bahwa militansi warga masyarakat Cipari tidak pernah pudar meski telah lama 'ditinggalkan induknya'. Penangkapan dan mungkin pembunuhan terhadap warga tertuduh terlibat PKI hanya gara-gara memperjuangkan hak-hak milik atas tanah sama sekali tidak melahirkan trauma yang mampu memberangus kemauan mereka untuk tetap memperjuangkan hak atas tanah. Konflik dengan pihak TNI inilah yang menjadi babak baru bagi perjuangan masyarakat Cipari dalam memperoleh kembali tanah milik mereka di era Orde Baru.

BAB IV

GERAKAN PETANI DI MASA ORDE BARU: KETIKA PETANI MELAWAN CENGKERAMAN NEGARA

4.1. Perlawanan Petani Cipari terhadap Represifitas Negara

Banyak ahli yang meneliti hubungan antara negara dan modal di Indonesia pada masa Orba maupun Reformasi. Richard Robinson melakukan studi relasi kuasa antara negara dan modal di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ekonomi Indonesia dibentuk oleh empat paradigma yang bersandingan, yaitu nasionalisme, populisme, birokratis predatoris, dan liberalisasi (Robinson, 1977: 29-30). Pada paradigma nasionalis, semua investasi ekonomi berakibat pada kebijakan pengambilalihan tanah untuk proyek-proyek pembangunan. Dalam paradigma populis, negara mengeluarkan kebijakan populis, seperti membangun infrastruktur, menyubsidi barang-barang kebutuhan pokok, kredit usaha kecil, pertanian dan sebagainya. Sedangkan paradigma birokratis predatoris adalah praktik mengambil keuntungan yang dilakukan oleh pejabat sipil maupun militer melalui kekuasaan dalam pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Dalam konteks agraria, misalnya, pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) bagi perkebunan besar, Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan sejenisnya. Dalam paradigma liberalisasi negara menekankan administrasi dan pengelolaan tanah yang berorientasi pasar.

Pada masa Orba, negara lebih berpihak kepada pemilik modal daripada petani. Dalam kasus Cipari, keberpihakan negara tersebut tampak dari pemberian HGU kepada perusahaan perkebunan. Dalam konteks penelitian ini, PT Rumpun Sari Antan pada 1974 mem-

peroleh HGU melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 3/HGU/DA/74. Total luas tanah yang diberikan kepada perusahaan tersebut, yaitu seluas 1.350 hektar. Tanah HGU tersebut terdiri atas, HGU I seluas 800,20 hektar dan HGU II seluas 540,80 hektar. Keberpihakan tersebut semakin jelas melalui produk-produk hukum seperti, UU No 5/1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, UU No 11/1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, UU No 3/1972 tentang Ketentuan Transmigrasi, UU No 4/1982 Ketentuan Pokok tentang Lingkungan Hidup, dan lainnya. Padahal, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 masih berlaku dan belum dicabut. Produk-produk hukum di luar UUPA tersebut menjadi pintu masuk dan ruang bagi para pemodal dalam memanfaatkan sumber alam Indonesia, termasuk di dalamnya adalah penggunaan dan pengelolaan tanah.

Berbagai kebijakan dan produk hukum di luar UUPA menjadi sebab ketimpangan dalam pemilikan, penguasaan, serta pemanfaatan sumber-sumber agraria. Dalam konteks pedesaan dan kehidupan masyarakat petani, ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah menjadi pemicu kemunculan gerakan yang dilakukan oleh petani. Melalui kebijakan dan produk hukum di atas, tanah-tanah milik petani direbut dan dicaplok. Gerakan menuntut tanah ini terutama terjadi di daerah sekitar kawasan perusahaan perkebunan dan perhutanan. Sebagaimana yang terjadi di Cipari, pemberian HGU kepada perkebunan menyebabkan petani kehilangan akses terhadap tanah. Kondisi ini kemudian memunculkan gerakan petani Cipari untuk menguasai tanah yang secara *de jure* dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Perlawanan petani terhadap perkebunan di masa Orba, secara nyata dimulai pada 1971. Petani menuntut tanah yang dikuasai oleh perkebunan untuk dikembalikan. Perlawanan pada saat itu dilakukan dalam bentuk demonstrasi. Perwakilan warga saat itu, mendatangi perusahaan perkebunan dengan tuntutan agar tanah petani yang hilang dikembalikan. Saat itu, di Kecamatan Cipari, hanya petani desa Caruy yang melakukan gerakan. Petani dari desa lain, sampai saat itu, tidak berani melakukan gerakan. Keberanian dan se-

mangat petani Caruy didukung, digerakkan, dan dipimpin oleh Rekso, Kepala Desa Caruy. Karakter orang desa yang menghormati dan menghargai pemimpinnya diwujudkan dalam keikutsertaan dalam gerakan tersebut. Sepanjang 1966 hingga 1971 gerakan petani di Cipari sangat marak dengan dukungan besar dari masyarakat. Hampir semua warga yang menggantungkan hidupnya dari pertanian seperti, petani, buruh tani, dan penggarap, ikut serta dalam gerakan tersebut. Peserta gerakan sangat menaruh harapan besar untuk memperoleh tanah melalui keikutsertaannya. Seorang warga yang pernah terlibat dalam gerakan tersebut, SL (60 tahun), menegaskan kepada peneliti:

“Saya sebagai warga mau ikut dalam gerakan karena pemimpinnya pak lurah. Jadi saya tidak takut kalau ada apa-apa. Harapan saya kalau gerakan ini berhasil, saya mendapatkan tanah. Kalau tidak berhasil, ya tidak tahu. Saya hanya buruh tani dan tidak memiliki tanah. Yang saya miliki hanya tanah yang saya tempati. Sehingga tanah buat saya sangat berharga.” (Wawancara pada tanggal 14 April 2013).

Gerakan awal ini menunjukkan dua hal. *Pertama*, situasi politik kala itu tidak berpihak kepada para petani. Pemberian HGU kepada perusahaan perkebunan membuat posisi perusahaan secara hukum jauh lebih kuat daripada masyarakat petani yang telah kehilangan bukti kepemilikan tanah (kartu kuning), setelah dicabut oleh pemerintah Orba pada 1966-1967. Namun demikian, gerakan tersebut membuktikan bahwa masyarakat petani di Desa Caruy enggan menyerah begitu saja meski secara *de jure* mereka tidak memiliki daya tawar sama sekali. *Kedua*, peran agen gerakan yang sekaligus adalah pimpinan formal di desa, menjadikan gerakan yang dilakukan memperoleh signifikansinya. Sampai saat itu, kepala desa bukan hanya dipandang dan ditempatkan sebagai pemimpin wilayah melainkan seseorang yang memiliki karisma sehingga sangat dihormati oleh warganya. Dengan demikian, keberanian Rekso di Caruy menjadi pembenaran dan legitimasi atas gerakan yang dilakukan. Namun sayangnya, gerakan tersebut gagal membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Jika dibaca sampai pada titik itu, tesis McAdam, et.al (2004) benar adanya bahwa dalam situasi politik yang represif, gerakan sosial

sulit berkembang. Dalam kasus Caruy, Orba mencabut kartu kuning dan memberi HGU kepada perusahaan perkebunan atas tanah yang pada awalnya dimiliki petani. Namun demikian, jika dilihat lebih rinci, situasi represif itu, tampak bahwa kekuatan tidak berada di tangan warga melainkan penguasa. Namun, hal itu sama sekali tidak menyurutkan semangat warga menyusun gerakan. Gerakan itu sangat ditentukan oleh peran pimpinan formal masyarakat sendiri yaitu kepala desa. Kedua hal tersebut, yakni semangat warga masyarakat untuk membela hak-haknya melalui gerakan dan peran pimpinan formal masyarakat yang tanggap terhadap persoalan warganya, mengubah warga menjadi agen gerakan. Ketanggapan pemimpin formal terhadap rakyatnya dapat disimak dari kesaksian informan R berikut ini.

“Kepala Desa Caruy memimpin para petani untuk melakukan gerakan merebut tanah yang dikuasai perkebunan. Menurut Pak Lurah, perkebunan tidak berhak menguasai tanah di sekitar Cipari. Apalagi tanah hasil *trukah* para petani. Karena itu, Lurah Caruy melakukan gerakan bersama para petani agar tanah yang dikuasai perkebunan dikembalikan kepada petani. Upaya yang dilakukan petani ternyata gagal. Bahkan Pak Lurah ditangkap. Gerakan terus dilakukan, dan pimpinan gerakan dilanjutkan oleh anaknya Pak Lurah. Hasilnya pun sama, anaknya Pak Lurah juga ditangkap.” (Wawancara pada 12 April 2013).

Pernyataan di atas menunjukkan betapa represifnya situasi saat itu. Bahkan, menurut kesaksian beberapa warga Cipari yang ikut terlibat peristiwa saat itu, sejak ditangkap, Lurah Rekso tidak pernah kembali ke rumahnya hingga saat ini. Bukannya surut dan kendur mengalami dan menyaksikan kenyataan tersebut, masyarakat tetap melanjutkan perjuangan mereka. Setahun kemudian, pada 1972, sekali lagi, dipimpin oleh seseorang yang lahir dari figur karismatik, anak dari Lurah Rekso, warga melanjutkan perjuangan. Namun, gerakan itu gagal.

Kedua kegagalan tersebut memang sempat menurunkan semangat petani. Setidaknya selama kurang lebih satu dasawarsa petani diam. Ini bukan berarti niat untuk menguasai tanah diurungkan.

Petani menunggu waktu untuk kembali melakukan gerakan. Gerakan harus dilakukan, sebab tanpa tanah kehidupan petani semakin sengsara. Penangkapan Lurah Caruy selaku pemimpin gerakan menggambarkan negara tidak main-main dalam menangani persoalan tanah. Penangkapan ini juga sebagai bentuk “menakut-nakuti” masyarakat. “Lurah saja ditangkap apalagi buruh tani”, demikian pandangan masyarakat luas. Perlu dicatat, bahwa petani yang giat melakukan gerakan adalah petani penggarap tanah sengketa tersebut.

Pada 1980–an, petani kembali melakukan gerakan. Isu tetap sama, yakni hak milik atas tanah, termasuk agen di dalam gerakan, yaitu; petani dan aktivis agraria berubah. Hanya saja, kali ini gerakan-gerakan tersebut berlangsung pendek. Pemerintah Orba saat itu melakukan berbagai manuver untuk menekan gerakan-gerakan isu tanah. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah Orba semakin represif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, setiap gerakan yang dilakukan oleh petani harus berhadapan dengan aparat keamanan negara. Kondisi tersebut digambarkan oleh SG, penasehat SeTAM, sebagai berikut:

“Di era Orde Baru, pada 1980–an, gerakan petani tidak berlangsung lama. Setiap petani melakukan gerakan langsung mendapat perlawanan dari negara. Mereka selalu dituduh PKI. Oleh sebab itu, gerakan demi gerakan hanya berumur pendek. Setelah itu tidak terdengar lagi. Mungkin, ini terjadi karena pengalaman sejarah, di mana para anggota PKI pasca-1965 banyak yang dipenjarakan, bahkan dibuang ke Pulau Buru.” (Wawancara pada 12 April 2013).

Sebagaimana telah banyak diketahui, secara historis, tegaknya kekuasaan Orba berawal dari pembasmian PKI dan menjadikannya sebagai ancaman utama terhadap “stabilitas nasional”, yakni jargon politik yang terkenal sepanjang kekuasaan Orba. Sejarah dan ketetapan politis itulah yang dipergunakan oleh pemerintah Orba untuk menekan gerakan petani dalam memperjuangkan hak milik atas tanah. Tindakan represif Orba, secara historis pula, selalu mendasarkan pandangan bahwa perjuangan merebut hak milik atas tanah pernah memperoleh dukungan penuh dari PKI melalui organisasi *underbouw*-nya, BTI. Namun demikian, pernyataan di muka menunjuk-

kan bahwa situasi politik semacam itu tetap tidak mampu menyurutkan, apalagi menghapus gerakan yang dilakukan oleh para petani Cipari untuk memperjuangkan hak milik atas tanah. Hanya saja, tersebab kekuasaan yang represif makin menguat itu, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para petani begitu mudah dipatahkan.

Dalam gerakan petani pada beberapa tahun berikutnya, peran agen gerakan kembali mencuat. Pada 1992, petani tidak sendirian dalam melakukan gerakan. Petani mendapat dukungan dari kepala desa. Lima kepala desa; Karangreja, Sidasari, Mekarsari, Kutasari, dan Caruy, atas nama petani, mulai melakukan tuntutan pada perusahaan perkebunan PT RSA. Isi tuntutan mereka adalah tanah perkebunan yang ditelantarkan agar bisa digarap oleh petani, terutama buruh tani tidak bertanah. Tuntutan kepala desa akhirnya dikabulkan oleh pihak PT RSA. Petani diberi hak garap oleh PT RSA tetapi dengan sistem sewa. Keinginan petani sebenarnya menggarap dengan sistem bagi hasil (*sakap*) dan bukan sistem sewa. Petani merasa keberatan dengan sistem sewa ini. Dalih yang dikemukakan pihak PT RSA adalah agar tidak semua lahan kosong dijadikan areal tanaman pangan. Berdasarkan beberapa informasi yang dapat dikumpulkan, menunjukkan bahwa di balik penetapan sistem sewa itu, ada rasa kekhawatiran PT RSA. PT RSA khawatir jika semua lahan sudah berubah bentuk menjadi tanah sawah, mereka akan kesulitan mengambil kembali.

Sistem sewa mengakibatkan hanya petani berkecukupan yang bisa menguasai tanah. Tidak banyak petani mampu menyewa tanah. Akibatnya, lahan yang ditelantarkan tersebut masih tersisa dan tak tergarap. Bisa dibayangkan, lahan seluas kurang lebih 350 hektar yang ditelantarkan itu, berada tepat di depan mata para petani yang merindukan lahan garapan.

Setahun kemudian, memasuki tahun 1993, gerakan petani muncul kembali. Pada saat itu, gerakan petani mendapat dorongan agen gerakan lain yaitu beberapa mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Para mahasiswa aktivis dari UGM ini dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko (pada saat buku ini ditulis

merupakan seorang anggota DPR dari PDI Perjuangan). Berikut ini kesaksian dari P, warga Cipari.

“Pada tahun 90–an Budiman bersama teman-teman mahasiswa dari UGM datang ke sini membantu petani dalam memperjuangkan tanah. Dia bersama-sama petani Desa Caruy menuntut agar sebagian tanah HGU perkebunan dikembalikan kepada petani. Sebab, tanah itu adalah tanah leluhur yang diperoleh dengan cara babat alas. Sepengetahuan saya usaha itu gagal. Buktinya petani tetap tidak bisa menguasai tanah.” (Wawancara pada tanggal 8 April 2013).

Para mahasiswa memberikan dukungan dan mendorong agar petani kembali menuntut hak atas tanah yang bertahun-tahun dikuasai perkebunan. Para aktivis mahasiswa ini tidak hanya melakukan gerakan untuk membantu masyarakat Cipari melainkan hampir seluruh masyarakat petani yang sedang sengketa dengan perkebunan maupun perhutanan di sekitar wilayah Cilacap bagian barat seperti Cimanggu, Wanareja, Kawunganten, dan Sidareja. Meskipun petani dibantu oleh kalangan mahasiswa, tetapi usaha untuk merebut kembali hak atas tanah tidak membuahkan hasil. Bahkan, Budiman Sudjarmiko sebagai motor gerakan ditangkap oleh aparat keamanan dan dipenjarakan. Kasus penangkapan Budiman sebagai aktivis mahasiswa UGM ini pernah dilaporkan dalam studi yang dilakukan Setiadi (2012: 85). Dalam laporan penelitian, Setiadi menyitir hasil wawancara dengan Budiman sebagai berikut:

“Waktu itu, sebagai mahasiswa, apalagi saya dari Cilacap, merasa bahwa para petani harus mendapatkan haknya. Karena itulah saya datang ke desa Caruy untuk kembali bersama-sama masyarakat memperjuangkan hak mereka. Tetapi saya sadar waktu itu memperjuangkan hak atas tanah bukan perkara mudah. Saya pun akhirnya ditangkap dan diinterogasi oleh aparat” (Setiadi, 2012: 85)

Gerakan yang dimotori oleh Budiman Sudjarmiko memang gagal. Sampai di sini, kekuasaan Orba yang represif mampu menekan gerakan petani Cipari. Namun, pernyataan Budiman secara semiotis yang menyatakan bahwa ‘memperjuangkan hak atas tanah bukan perkara mudah’ menandakan bahwa Budiman tidak menyerah dan ia

sadar bahwa perjuangan semacam itu membutuhkan proses, tahap, dan langkah-langkah panjang.

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan petani untuk memperjuangkan hak milik atas tanah adalah babak baru di mana seiring dengan mulai memudar nilai-nilai kepemimpinan tradisional yang karismatik dan perkembangan pendidikan kala itu, mahasiswa menjadi agen gerakan yang baru. Sebagaimana banyak diketahui, eksistensi kekuasaan Orba berhutang kepada kegigihan mahasiswa dalam menumbangkan kekuasaan Orla. Budiman, kebetulan berasal dari Cilacap, sedikit atau banyak, dipandang sebagai figur 'karismatik' sesuai dengan zamannya. Ia adalah 'Lurah Rekso' di era baru bagi masyarakat petani yang kehilangan hak milik atas tanah. Budiman memimpin gerakan, Budiman ditangkap. Lebih dari itu, melalui Budiman, masyarakat petani Cipari mampu memelihara memori, harapan, dan semangat juang untuk meraih tujuan puncak mereka, hak milik atas tanah.

Peran negara yang begitu kuat dalam merespons kemunculan setiap gerakan, berdampak pada ketiadaan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam membela kepentingan petani. Setelah 1994 sampai dengan menjelang kekuasaan Orba runtuh, tidak ada LSM yang membela kepentingan petani. Stigma *landreform* identik dengan komunis di masa Orba menjadikan ruang gerak petani untuk mewujudkan harapan tidak mudah. Setiap gerakan yang dilakukan petani, apapun bentuknya, selalu mendapat tekanan negara. Negara kadang menggunakan 'cara' untuk mendiskreditkan petani dengan sebutan seperti, organisasi tanpa bentuk (OTB), antipembangunan, dan antipemerintah.

Menjelang kekuasaan Orba runtuh, tepatnya pada 1997, 'lahan tidur' PT RSA, sebagaimana telah diuraikan di muka, kembali dibuka. Pembukaan lahan itu bukan karena belas kasih dari perkebunan kepada petani, tetapi kondisi dan situasi memaksa tanah perkebunan harus dibuka. Di penghujung kekuasaan Soeharto runtuh, terjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Pada saat itu kemiskinan penduduk meningkat. Semua rumah tangga, baik yang tinggal di kota maupun di desa, merasakan betapa susah mencari nafkah. Perusahaan-perusa-

haan raksasa bangkrut. Hal itu mengakibatkan PHK massal. Waktu itu jumlah pengangguran mengalami peningkatan luar biasa. Meskipun sama-sama susah, warga masyarakat desa yang memiliki tanah pekarangan maupun sawah masih bisa mencari sumber pangan dari tanah garapan. Situasi itulah yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan di sektor agraria melalui program penggarapan lahan-lahan 'tidur'.

Pembukaan lahan perkebunan dilaksanakan melalui program Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan (PDK-MK) bersama program Tentara Manunggal Pertanian (TMP). Melalui program tersebut, semua lahan-lahan *garung* (sebutan warga Cipari pada tanah yang diterlantarkan oleh perusahaan perkebunan dan jika musim penghujan menjadi kubangan, sebaliknya, di musim kemarau akan tampak kering kerontang) diperbolehkan digarap para petani. Skema program itu adalah penggarapan secara berkelompok. Setiap kelompok (terdiri 10-12 orang) diberi tanah garapan seluas sekitar 1 hektar, dengan sistem sewa. Setiap kelompok diberi bantuan bibit dan pupuk. Menurut keterangan sekretaris Desa Sidasari, Sakino (52 tahun), program tersebut tidak berjalan lama. Hal itu disebabkan petani tidak terbiasa menggarap tanah secara berkelompok. Program tersebut adalah pengalaman baru bagi petani. Di samping itu, sistem sewa dianggap memberatkan petani. Menurut keterangan sejumlah petani, produksi panen saat itu rendah. Ini disebabkan pengairan di lokasi garapan kurang.

Meskipun program penggarapan tanah skema berkelompok dalam menggarap lahan 'tidur' tidak berjalan lancar, setidaknya petani pernah menggarap tanah yang selama ini mereka perjuangkan tapi tidak memperoleh hasil. Lain dengan pandangan SeTAM, penggarapan lahan 'tidur' yang pernah digulirkan oleh pemerintah meski tidak lancar tapi program tersebut memberi jalan bagi petani untuk menguasai tanah. Pada waktu itu pengalihan hak garap mudah dilakukan antarpenggarap melalui tanda bukti sewa dari perkebunan. Sistem seperti ini berjalan hingga 2003-2004. Pada saat itu, perkebunan sedang dalam proses mengajukan perpanjangan HGU.

Uraian terdahulu menunjukkan satu hal, gerakan petani di Cipari dalam memperjuangkan hak milik atas tanah tidak pernah surut. Secara teoritis, gerakan sosial muncul jika kesempatan politik di suatu negara mengalami keterbukaan, demikian menurut McAdam, McCarthy, dan Zald. Kekuasaan Orba, boleh jadi, memang membuka dan membangun dunia yang baru dan berbeda dengan Orla. Hal itu dibuktikan, misalnya, melalui penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung (PEMILU) pertama di era Orba yang cukup sukses pada 1971. PEMILU tersebut memberikan legitimasi konstitusional kepada Soeharto untuk menjadi presiden Republik Indonesia dan memberi kesempatan padanya untuk mengembangkan pembangunan Indonesia melalui REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dan pelaksanaannya, PELITA. Rancangan dan pelaksanaan pembangunan tersebut memungkinkan perkembangan infrastruktur kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Seharusnya pula, pada titik itu, gerakan petani dalam memperjuangkan hak-hak atas tanah terfasilitasi. Kenyataan sebagaimana terurai di muka berkata lain. Gerakan petani justru ditindas dengan berbagai cara. Namun, uraian-uraian terdahulu juga membuktikan bahwa semangat juang dan upaya petani untuk membela hak-hak atas tanah tidak pernah surut meski dalam situasi menindas sekali pun. Di samping itu, dalam gerakan-gerakan tersebut selalu memunculkan figur-figur tertentu sebagai agen penggerak, baik formal dan informal dari wilayah sendiri maupun figur dunia baru yang berasal dari luar. Jika mengikuti pandangan McAdam, et.al (2004) tentang keterkaitan kesempatan politik dengan kemunculan sebuah gerakan, maka gerakan petani Cipari bisa disebut sebagai antitesis dari gagasan McAdam tersebut.

4.2. Organisasi Petani Lokal Sebagai Alat Perjuangan

Dalam sebuah gerakan sosial, aktor atau agen adalah seseorang dengan karakter unik. Secara umum, ia adalah orang yang memungkinkan sebuah gerakan sosial terjadi. Sebagaimana telah diungkapkan di muka, Rekso, anaknya, dan lima kepala desa di Cipari adalah para

agen gerakan sosial. Secara kebetulan, Rekso dan kelima kepala desa adalah pimpinan formal. Mereka masing-masing memimpin sebuah wilayah geografis dan kepemimpinan mereka diakui oleh negara. Namun, anak Rekso, bukanlah pemimpin formal. Agen gerakan sosial, dengan demikian, tidak hanya muncul dari kepemimpinan formal.

Menurut Simone Isadora Flynn (2011: 112) seorang agen gerakan sosial adalah makhluk rasional, seseorang dengan argumen serta tujuan pasti. Melalui kemampuan semacam itu pula, ia akan memutuskan untuk mengambil tindakan untuk meraih tujuan. Di samping itu, agen tersebut mampu meyakinkan orang lain untuk mengikutinya, atau setidaknya, kekuatan dan kebenaran argumennya. Dengan cara demikian itu pula, dalam sebuah gerakan sosial, keikutsertaan seseorang dalam suatu organisasi haruslah dipahami sebagai pilihan rasional. Dalam pengertian demikian, seseorang dapat saja berpikir, jika tanpa harus terlibat dalam suatu gerakan tapi mendapatkan hasil dari gerakan itu, mengapa harus terlibat. Demikian pula sebaliknya, jika tidak terlibat tidak akan mendapatkan keuntungan, mengapa tidak ikut melibatkan diri dalam gerakan sehingga dapat memperoleh keuntungan. Mengambil keputusan-keputusan semacam itu merupakan pilihan rasional. Demikian halnya dengan gerakan sosial yang terjadi pada warga Cipari ketika melakukan gerakan reklamasi. Mereka yang melakukan gerakan sosial adalah agen rasional. GN (32 tahun) mantan aktivis gerakan petani di Dusun Pitulasi, Desa Mekarsari, menyatakan tentang pilihannya sebagai berikut:

“Saya dan teman-teman di Dusun Pitulasi ini memang bertekad dan berniat untuk ikut berjuang bersama-sama petani dari dusun maupun desa lain. Kenapa saya ikut, karena saya ingin mendapatkan tanah untuk bertani. Apalagi tanah yang saya tempati untuk tempat tinggal ini adalah tanah perkebunan. Jadi, kalau perjuangan petani berhasil maka saya mendapatkan tanah. Kalau saya tidak mendapatkan tanah garapan, setidaknya saya bisa menempati rumah ini dengan tenang sehingga tidak ada rasa ketakutan, bila sewaktu-waktu saya diusir oleh perkebunan.” (Wawancara pada tanggal 11 Maret 2013).

Pernyataan GN di atas menunjukkan bahwa ia sadar akan pilihan untuk ikut serta dalam gerakan. Secara sosiologis, tindakan rasional GN mengindikasikan adanya definisi situasi yang dialaminya. Hak atas tanah miliknya terampas dan ia berkeinginan memperjuangkannya hingga ia mendapatkan kembali tanahnya. Tidak berhenti sampai di situ, definisi situasi tersebut ketika dibagi dengan orang lain, yakni sesama petani yang merasakan hilangnya tanah milik mereka, terbingkai (*framing*) menjadi kohesi dan tindakan sosial bersama. Melalui proses sosiologis semacam itulah, mobilisasi gerakan sosial petani di Cipari dapat terjadi.

Agen utama gerakan sosial di Cipari adalah petani. Dalam hal ini, pada satu sisi, adalah petani yang kehilangan hak atas tanah. Pada sisi lain, hak tersebut hilang karena dirampas oleh pihak lain, yakni perusahaan perkebunan PT RSA. Situasi semacam itu, merupakan situasi efektif yang memunculkan mekanisme aksi kolektif. Para petani, menurut Della Porta (2006: 20), secara bersama terlibat dalam hubungan konfliktual dengan pihak lain yang teridentifikasi dengan jelas. Dengan demikian, gerakan sosial di Cipari melibatkan keterkaitan antara agen dan aksi kolektif tak terpisahkan. Pengertian agen dalam gerakan sosial, bukan hanya seorang individu melainkan juga kelompok (McCarty, et. al, 1996: 1071). Dengan demikian, agen di Cipari merupakan sekumpulan petani yang memiliki kesamaan persoalan yaitu kehilangan hak atas tanah. Bukan hanya menghadapi kesamaan persoalan, pekerjaan mereka juga sama. Petani dalam pengertian konsep *peasant* (Wolf, 1966: 2-3), yaitu buruh tani, petani yang mengerjakan tanah bukan miliknya, petani pemilik tanah dan sekaligus mengerjakan tapi hasil usaha taninya hanya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan tidak ditujukan sebagai komoditi pasar. Dalam bahasa James C. Scott (1976: 1) disebut sebagai tani rapuh. Rapuh karena jika terjadi sesuatu, dengan mudah, kehidupan mereka akan berubah menjadi merugi. Berangkat dari persoalan dan gaya hidup yang sama ini, aksi kolektif petani dalam memperjuangkan hak atas tanah dapat terbangun. Sidney G. Tarrow (2011: 11) menyebut bahwa itulah keyakinan atas kepentingan dan nilai yang sama dan menjadi landasan bagi kebersamaan aksi.

Di Cipari, kebersamaan dalam gerakan itu terwujud dalam bentuk kelompok petani. Anggota kelompok ini adalah penggarap tanah. Tanah garapan mereka berdekatan. Kehilangan tanah garapan menyebabkan kehidupan petani semakin sulit. Sementara itu, mereka menyaksikan bahwa di sekitar mereka tanah yang subur dan luas milik perusahaan perkebunan terlantar tak tergarap. Dalam situasi demikian, menurut Flynn (2011: 112) muncul ketidakseimbangan sumber daya dan kekuasaan. Perusahaan perkebunan memiliki lahan luas tak tergarap dan ia memiliki hak atas tanah tersebut. Kemunculan gerakan petani Cipari, dengan demikian, merupakan upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan dan terutama sumber daya yang ada. Di Cipari, upaya penyeimbangan itu berwujud melalui gerakan untuk menggarap sebagian tanah milik perusahaan secara berkelompok.

Memperjuangkan tanah dengan cara berkelompok hampir dijumpai di setiap desa di wilayah Cipari. Tercatat, setidaknya ada enam kelompok tani yang berjuang menuntut tanah terhadap perusahaan. Beberapa gerakan kelompok tani tersebut adalah kelompok-kelompok tani di beberapa desa. Kelompok tani di Desa Mulyadadi memperjuangkan dan menuntut tanah terhadap perkebunan Cisuru. Kelompok tani di Desa Mekarsari, Desa Sidasari, Desa Kutasari, Desa Caruy, dan Desa Karangreja berjuang menuntut hak tanah terhadap perkebunan Cipari di bawah manajemen PT RSA.

Selain enam kelompok yang disebut di atas, sebenarnya masih banyak kelompok-kelompok serupa yang berjuang menuntut tanah, baik dengan perkebunan swasta, BUMN maupun Perhutani. Kelompok-kelompok tani tersebut secara formal belum terbentuk sebagaimana sebuah organisasi karena hanya mengandalkan kesukarelaan. Cara berkelompok semacam itu ternyata mengalami hambatan ketika harus berhadapan dengan pemodal. Kala itu, petani tidak berani membentuk organisasi petani di luar organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Orba seperti, PKK, Kelompencapir, dan kelompok-kelompok tani di bawah binaan Dinas Pertanian setempat serta kelompok-kelompok sejenis yang langsung berada dalam binaan pemerintah. Petani Cipari masih dihantui oleh masa lalunya. Petani masih trauma dengan cerita tentang anggota-anggota organisasi pe-

tani di bawah kendali BTI serta penangkapan dan pemenjaraan oleh pemerintah Orba.

Jika mengikuti pemikiran McAdam dan Tarrow tentang dinamika yang terjadi dalam gerakan sosial, gerakan di Cipari pada masa Orba menghadapi sistem politik yang tertutup (Situmorang, 2007: 4). Sistem semacam itu menjadikan artikulasi kepentingan di luar kepentingan negara dihambat atau bahkan dibungkam. Dalam sistem semacam itu, negara biasanya berpihak kepada kelompok elite dan mempunyai kecenderungan untuk represif (Buffonge, 2001: 8). Kenyataan itu juga dihadapi petani di Cipari. Mereka sering mendapat ancaman dari aparat negara ketika memperjuangkan kepentingan mereka. Meskipun demikian, seperti telah diuraikan di muka, persoalan petani bukan melulu ancaman dari aparat pemerintah Orba melainkan trauma masa lalu dan strategi pengorganisasian sekaligus mobilisasi.

Pemerintah Orba telah menetapkan bahwa 'keterbukaan' dalam mengartikulasikan kepentingan petani dapat disampaikan melalui kelompok-kelompok tani dalam binaan dinas pertanian di masing-masing wilayah. Namun, menyadari trauma masa lalu, yakni gerakan petani untuk hak milik atas tanah diidentikkan dengan BTI, organisasi yang dilarang oleh pemerintah Orba, kelompok-kelompok tani binaan dinas pertanian tidak pernah berpikir atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hak milik atas tanah. Lebih dari itu, keberadaan kelompok-kelompok tani binaan dinas pertanian, sesungguhnya merupakan bentuk kontrol negara terhadap petani. Gerakan petani Cipari, meski dalam situasi terbatas dan tidak kondusif semacam itu, sebagaimana dinyatakan para ahli di atas, tanpa mengenal lelah (*persistence*), mereka masih berusaha mengorganisir diri walau hanya mengandalkan nilai-nilai tradisional yaitu kesukarelaan.

Kelompok petani yang pertama kali muncul di wilayah Cipari yaitu kelompok tani dari desa-desa sekitar perkebunan Cisuru. Kelompok tani ini dibentuk karena mereka menjadi korban perusahaan perkebunan Cisuru. Perkembangan perkebunan di Cisuru dianggap oleh masyarakat setempat (khususnya petani) mengakibatkan sebagian tanah milik warga hilang. Oleh sebab itu, kelompok tani

ini dibentuk oleh masyarakat Desa Mulyadadi untuk menghadapi persoalan dengan pihak perusahaan perkebunan. Kelompok tani ini memperjuangkan tanah yang dikuasai oleh perkebunan di bawah manajemen PT Djawatie. Kelompok ini dibentuk pada 1984 oleh tokoh masyarakat setempat. Di awal berdiri, hanya sedikit orang tergabung dalam organisasi ini. Anggota kelompok tani ini masih terbatas dari kalangan para pencetus dan pengagas. Dalam kurun waktu setahun, organisasi ini bertambah anggota. Mereka yang bergabung menjadi anggota dalam kelompok tani ini berdasarkan kemauan sendiri. Penambahan anggota juga terjadi karena para pengurus kelompok tani melakukan pendekatan kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi tentang nilai penting suatu organisasi. Dalam bahasa McCharthy dan Zald (1977: 1212-1241), disebut sebagai upaya agregasi sumber daya, yakni pengumpulan uang dan tenaga kerja untuk tujuan kolektif. Sumber dana memang penting agar organisasi tetap hidup dan berjalan. Kelompok tani Mulyadadi dalam menjaga kelangsungan organisasi dengan dana sendiri. Dalam pernyataan WSR sebagai berikut.

“Kelompok tani, dalam melakukan gerakan, semua biaya ditanggung sendiri. Biaya itu diperoleh dari para anggota. Uang itu dikumpulkan dari hasil panen. Ini karena petani tidak mendapatkan dana dari luar. Petani pernah meminta bantuan dari pemerintah desa tetapi tidak dikasih.” (Wawancara pada 11 April 2013).

Selain menghadapi trauma historis, petani Mulyadadi juga tidak memperoleh dukungan dari mana pun, termasuk pimpinan formal wilayah pemerintahan desa. Meskipun harus menjaga kelangsungan hidup organisasi melalui kesukarelaan anggota, gerakan petani Mulyadadi ini berjalan terus. Bahkan, walaupun persoalan hak milik atas tanah juga dialami oleh masyarakat petani di lain desa di Cipari, kelompok tani Mulyadadi merupakan satu-satunya kelompok yang berdiri di masa Orba. Tidak heran, jika gerakan petani di Cipari saat itu sangat lemah dan tidak terorganisir dengan baik. Para petani susah dimobilisasi secara bersama dan cepat. Hal ini dikarenakan tidak

ada pemimpin yang jelas, yakni pimpinan yang dapat menggerakkan petani setiap saat.

Dalam suatu organisasi, pola kepemimpinan penting untuk menjaga agar organisasi bisa berjalan. Di masyarakat desa, umumnya pola kepemimpinan berbeda dengan masyarakat kota. Masyarakat kota lebih sering memilih pemimpin dengan cara *voting* (pemungutan suara) sebagaimana layaknya pemilu. Lain halnya dengan masyarakat desa. Pemimpin masyarakat desa, ditunjuk oleh warga atas dasar kharisma, kewibawaan, dan pengaruh yang dimiliki. Guru, kyai, dan beberapa figur yang ditokohkan oleh warga masyarakat, sering kali begitu saja disepakati masyarakat untuk memimpin suatu kegiatan.

Hal sama juga terjadi di Cipari. Kelompok-kelompok tani di Cipari biasanya dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat. Para anggota sebagian juga dari kalangan keluarga berpengaruh. Sebagai catatan, apa yang dimaksud pemimpin dalam kelompok tani adalah tidak seperti organisasi pada umumnya. Pemimpin dalam kelompok tani di Cipari adalah orang yang sering dimintai pendapat, saran maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dihadapi. Orang setempat menyebut pemimpin dalam konteks seperti ini adalah 'orang yang dituakan' dalam kelompok. Berawal dari sini pulalah muncul tokoh-tokoh masyarakat yang memimpin organisasi dan kelompok tani di Cipari.

Kontribusi para tokoh masyarakat menjadi signifikan dengan kelahiran Organisasi Tani Lokal (OTL). OTL pertama terbentuk di wilayah Cipari adalah OTL Ketanbanci (Kelompok petani korban perkebunan Cisuru) dari Desa Mulyadadi. Ketanbanci didirikan dalam rangka memperjuangkan tanah yang dikuasai oleh PT Djawatie. Kehadiran OTL Ketanbanci menginspirasi kelompok-kelompok petani yang ada di desa-desa lain di Cipari. Tidak salah jika OTL Ketanbanci disebut sebagai embrio perlawanan petani Cipari dan sekaligus embrio lahirnya OTL di desa lain dalam memperjuangkan hak milik petani atas tanah.

Kelompok tani yang muncul kemudian antara lain, kelompok tani dari Desa Mekarsari bernama OTL Singatangi. Di Desa Caruy

muncul OTL Tapungan Bangkit. Di Karangreja terbentuk OTL Mangkubumi. Kelompok tani dari Desa Sidasari membentuk OTL Margorukun. Kelompok tani dari Desa Kutasari membentuk OTL Tri Manunggal Sari. Kelahiran lima organisasi ini berangkat dari kepentingan bahwa warga di lima desa tersebut akan menuntut tanah kepada pihak perusahaan perkebunan yaitu PT RSA.

Menarik kiranya menyimak beberapa nama OTL yang dibentuk oleh warga masyarakat tani di Cipari. Ketanbanci, misalnya. Ketan adalah akronim yang menunjuk pada bahan makanan seperti beras, tetapi bulir beras lebih besar dan panjang. Masyarakat menyebut dengan istilah beras ketan. Berbeda dengan jenis beras yang biasa dikonsumsi untuk makanan keseharian. Beras ketan ketika dimasak menghasilkan nasi yang sangat lengket. Bulir satu dengan lainnya, sulit untuk dilepas karena saling melekat. Kelengketan itu disimbolkan sebagai kelekatan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, ‘ketan’ menunjukkan kohesivitas hubungan antarpetani anggota OTL tersebut. Sementara itu, kata ‘banci’ merujuk pada pengertian identitas gender yang dimiliki seseorang belum jelas, apakah ia laki-laki atau perempuan. Kata ‘banci’, dengan demikian, merujuk ketidakjelasan. Berdasarkan pengertian semacam itu, Ketanbanci adalah kelompok tani yang memiliki kohesivitas, tetapi perlawanan yang dilakukan tidak terjadi secara terbuka. Ada organisasi, tetapi gerakan yang dilakukan belum signifikan. Kata ‘banci’ dapat juga ditujukan kepada pemerintah Orba yang membentuk kelompok-kelompok tani tetapi sama sekali tidak berpihak pada kepentingan petani, yakni hak milik atas tanah, melainkan menjadi alat kontrol mengawasi gerakan petani.

Pemaknaan di atas juga dapat diberlakukan pada kata Singatangi. Kata itu dalam bahasa Indonesia dapat diartikan secara lugas sebagai singa [yang] bangun dari tidur (*tangi*). Singa adalah raja hutan. Raja segala macam binatang di hutan. Banyak buku, film dokumenter, hingga film-film Hollywood mengungkapkan kehebatan dan ‘kebesaran’ hewan tersebut. Berkait dengan nama OTL Singatangi, kata itu dapat dimaknai bahwa kata singa menunjuk kepada sesuatu yang besar dan hebat. Sosok yang mempunyai kekuatan dan daya tahan

tinggi. Dengan demikian, dalam konteks OTL Singatangi, kata *si-nga* dapat diartikan tingginya militansi petani dalam memperjuangkan hak atas tanah. Sementara kata '*tangi*' merujuk pada pengertian bangkit atau bangun dari tidur dapat dipahami bahwa perjuangan besar membutuhkan keberanian sedang dimulai.

Di antara nama-nama OTL yang ada di Cipari kala itu, hanya nama Mangkubumi yang langsung menunjuk pada tanah (bumi). 'Kehebatan' nama itu, pertama-tama, menunjuk kepada nama pangeran di Kasultanan Yogyakarta yang mencerminkan kekuasaan terhadap tanah. Kata *mangkubumi* juga dapat diartikan tanah sebagai penopang (*mangku*) seluruh aspek kehidupan manusia.

Berdasarkan pemaknaan atas beberapa nama OTL di Cipari, dapat dikatakan bahwa petani di Cipari tidak asal-asalan dalam memilih nama OTL. Mereka membuat pertimbangan kuat dalam memilih nama. Nama-nama OTL tersebut dipilih bukan tanpa pertimbangan. Melainkan, nama-nama tersebut dipilih untuk merepresentasikan gerakan petani itu sendiri.

Meskipun di Cipari sudah mulai terbentuk OTL, akan tetapi organisasi tersebut belum mapan. Diawali melalui kesadaran bahwa bertukar pikiran dengan OTL lain adalah penting, muncul istilah *ngendhong*. Dalam bahasa Jawa Banyumas, kata itu berarti berkunjung ke tetangga. Bagi para aktivis OTL, *ngendhong* kemudian diartikan berkunjung ke OTL lain untuk bertukar pikiran dan informasi seputar perjuangan mereka dalam memperoleh hak atas tanah. Di samping itu, *ngendhong* juga dilakukan untuk membangun kebersamaan di antara sesama anggota OTL. *Ngendhong* atau berkunjung antaranggota OTL sering dilakukan di rumah, tidak jarang pula dilakukan di tempat kerja, di sawah, di pos ronda atau di tempat lain.

Kebersamaan dirasakan petani di Cipari sebagai alat untuk tetap mempertahankan semangat. Dengan demikian, *ngendhong* adalah representasi perjuangan yang menurut Snow dan Banford dalam (Jasper, 2007: 91), dilakukan untuk memenangkan pertempuran atas makna. *Ngendong* yang dilakukan para petani merupakan upaya mempertahankan urgensi gerakan yang mereka lakukan. Ini bertali-

an dalam upaya untuk meyakinkan kelompok sasaran yang beragam sehingga mereka terdorong untuk melakukan perubahan.

Melalui *ngendhong* lahir kesadaran membangun satu gerakan bersama. Melalui *ngendhong*, disampaikan gagasan bahwa gerakan bersama adalah penting. Para aktivis OTL kemudian saling bertemu untuk menyusun kepengurusan. Enam OTL yang ada di Cipari kemudian menjalin kerja sama melakukan perlawanan terhadap perkebunan. Di antara enam OTL tersebut, Ketanbanci adalah OTL yang memiliki hubungan dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Yogyakarta. Hubungan ini terjalin ketika petani Cisuru menghadapi persoalan hukum dengan pihak perkebunan karena melakukan okupasi tanah dan menebang sejumlah tanaman karet milik PT Djawatie.

Waktu itu, sejumlah petani meminta bantuan hukum ke LBH Yogyakarta. Hubungan itulah yang kemudian menjadi embrio keterbukaan jaringan antara petani Cipari dengan pihak lain. Dalam perkembangannya, LBH sering bertandang ke Cipari guna memberikan pengetahuan tentang hukum—khususnya hukum agraria, cara berorganisasi, kepemimpinan, dan pengelolaan organisasi kepada sejumlah aktivis dari keenam OTL. Advokasi oleh LBH ini, setidaknya telah membuka wawasan bagi petani Cipari mengetahui posisi perjuangan yang mereka lakukan, cara dan pengelolaan organisasi, serta memilih pemimpin gerakan yang mampu mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka. *Ngendhong*, pada akhirnya menjadi salah satu nilai-nilai kultural yang bekerja dalam ruh embrio gerakan petani di Cipari.

Nilai kultural lain yang tidak kalah penting dan menjadi nyawa dalam memobilisasi petani di Cipari adalah ungkapan '*sedumuk bathuk, senyari bumi*'. Ungkapan tersebut memiliki arti, kurang lebih, meski hanya sejengkal, tanah harus dibela sampai mati. Hal ini ditunjukkan dan ditegaskan dalam *sedumuk bathuk* yang artinya satu sentuhan ke dahi. Bagi orang Jawa, sentuhan ke kepala diartikan sebagai penghinaan dan perendahan atas kehormatan diri. Oleh sebab itu, bagi masyarakat Jawa, jika seseorang mengusik tanah orang lain, hal itu akan dapat memicu perseteruan. Hampir semua orang Jawa paham benar dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ungkapan

tersebut. Sesungguhnya di setiap masyarakat memiliki nilai-nilai yang kurang lebih serupa (Wiyana, 2009: 34) seperti:

- 1) Di masyarakat Bali tanah memiliki nilai *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kebahagiaan); *Parahyangan, Pawongan, Palemahan*, yang artinya harmoni kehidupan dapat terwujud jika ada hubungan serasi antara tiga hal, yaitu; Tuhan, sesama manusia, dan tanah.
- 2) Di Yunani terdapat ungkapan *Cujus est solum, ejus est usque ad cuelem* yang artinya, siapa yang memiliki tanah akan mengantarkannya sampai ke surga.
- 3) Di Inggris juga terdapat ungkapan *Property is the root of all evil and of the suffering of man who posses it, and of all the remorse of conscience of those who misuse it, and of the danger of collision between those who have (it) and those who have it not* yang artinya tanah merupakan akar dari semua kejahatan dan penderitaan manusia baik yang memilikinya atau tidak, akar penyesalan yang paling dalam bagi mereka yang menyiaikannya, dan sumber konflik antara yang memiliki dengan yang tidak memilikinya.
- 4) Ungkapan lain dalam bahasa Inggris menyatakan *Land belongs to a vast family of which many are dead, few are living and countless numbers still unborn* yang artinya, tanah adalah kepunyaan keluarga besar di mana anggotanya telah banyak yang meninggal, sedikit yang hidup saat ini, dan tak terhitung jumlah anggota yang belum lahir.

Nilai-nilai kultural semacam itu menggambarkan bahwa tanah bukan hanya dipandang sebagai alat produksi dan nilai ekonomi melainkan sarat nilai sosial, kultural, bahkan spiritual. Berangkat dari pemaknaan semacam itu, tidak mengherankan jika bagi masyarakat Cipari, hak milik atas tanah menjadi perihal penting. Isu berkaitan dengan tanah, dengan demikian, tidak butuh mobilisasi yang rumit

dan canggih karena tanah itu sendiri adalah dasar penting bagi mobilisasi yang bertujuan untuk mengatasi persoalan-persoalan di seputar tanah milik.

Mobilisasi gerakan petani di Cipari, berdasarkan uraian-uraian terdahulu, cukup unik. Gerakan tersebut masih tetap ada dalam suasana kekuasaan yang represif, meski dalam skala kecil dan lemah. Keberadaan tersebut juga ditentukan oleh kohesivitas masyarakat dalam berbagi definisi situasi yang menghasilkan bingkai (*frame*) tak terelakkan yaitu adanya persoalan bersama tentang hak milik atas tanah. Ada dua hal yang memungkinkan terjadinya mobilisasi dari proses tersebut. *Pertama*, kepatuhan masyarakat Cipari (desa) kepada pemimpin, yakni agen gerakan. Masyarakat desa memilih pemimpin atas dasar ketokohan, seseorang yang memiliki karakter seperti karismatik, berpendidikan, dan berwibawa. Melalui pengakuan dan penghormatan semacam itu, kepatuhan masyarakat timbul sehingga mudah digerakkan oleh agen.

Kedua, nilai-nilai kultural seperti *ngendhong* dan *sedumuk bathuk*, *senyari bumi* menjadi ruh dalam gerakan masyarakat petani Cipari. Nilai *ngendhong* menjadi sarana taktis dalam menciptakan kohesivitas antaraktivis gerakan. Sementara, *sedumuk bathuk*, *senyari bumi*, merupakan menjadi ruh mobilisasi paling kuat. Berangkat dari temuan lapang tersebut, dapat dikatakan, mobilisasi gerakan sosial di Cipari lebih rumit daripada yang diungkapkan oleh para ahli gerakan sosial yang hanya melihat komponen-komponen sumber daya seperti agen, kepemimpinan di satu sisi, uang, tenaga, dan kesadaran/ pengetahuan pada sisi lainnya. Komponen yang tersembunyi seperti apa, siapa, dan bagaimana agen gerakan, bagaimana dana terkumpul atau dikumpulkan, serta nilai-nilai kultural, luput dari perhatian.

4.3. Hilangnya Hak Atas Tanah

Isu reklamings hak milik atas tanah berkait dengan beberapa hal. Menurut Budi Widjarjo seperti dikutip oleh Hartono (2004: 100), alasan pembenar sekaligus pemicu terjadinya gerakan reklamings atas tanah adalah moral, ketidakadilan, struktur menindas, normatif, hu-

bungan sejarah, serta kewajiban negara dalam memenuhi hak dasar warganya. Demikian pula yang terjadi di Cipari. Masyarakat petani di Cipari mengalami ketidakadilan dan menjadi korban dari sebuah struktur menindas. Mereka kehilangan hak atas tanah sekaligus tidak mampu mengatasi kekuasaan politik yang menindas hak-hak mereka. Gerakan petani Cipari yang dinamis, tidak bisa dilepaskan begitu saja dari aspek budaya dan alur sejarah yang terjadi dan dialami oleh masyarakat Cipari. Zald (Situmorang, 2007: 10-11) menyatakan bahwa kontradiksi antara budaya dan kondisi yang ada dapat memunculkan aksi kolektif yang ditandai oleh kemunculan keluhan dan perasaan ketidakadilan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh petani Cipari berawal dari kehilangan tanah garapan mereka.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab dua tentang asal-usul petani Cipari memiliki tanah. Petani melakukan *trukah* (membuka lahan) di sekitar kawasan areal yang kemudian hari diklaim perkebunan dan perhutani melalui HGU (Hak Guna Usaha) dan HPH (Hak Pengelolaan Hutan). Tanah itu kemudian digarap oleh petani untuk usaha tani. Namun, tanah garapan mereka diambil oleh negara melalui perusahaan perkebunan. Melihat kenyataan tersebut, petani berupaya menuntut kembali (reklaiming) tanah garapan mereka. Dengan demikian, kemunculan gerakan petani Cipari tidak bisa dipisahkan dari sejarah penguasaan dan pengolahan tanah oleh masyarakat petani Cipari sendiri. Sebagai masyarakat 'pedalaman' Jawa, situasi yang tidak adil tersebut memantik sikap mendasar mereka yang sangat kuat yaitu membela tanah milik meski hanya sejengkal sekali pun.

Dilihat dari kondisi geografis, daerah Cipari memiliki lahan garapan yang cukup luas dan subur. Tanah luas dan subur itu sebagian besar telah dikuasai oleh perusahaan Perhutani dan perkebunan. Penguasaan itu sudah berlaku sejak 1950-an hingga mendapat kepastian hukum pada 1974 dengan keberadaan HPH dan HGU. Ada tiga perusahaan perkebunan besar di daerah ini. Dua perusahaan dikuasai oleh swasta, yaitu PT Djawatie dan PT RSA dengan komoditas karet dan kakao. Satu perusahaan milik BUMN yaitu PTPN IX mengelola komoditas karet. Sementara warga setempat, memiliki akses sangat minim terhadap tanah. Sampai saat itu, rata-rata petani di Cipari

hanya memiliki dan menguasai tanah seluas 0,30 hektar. Luasan itu meliputi tanah pekarangan maupun tanah sawah. Tanah sawah milik petani rata-rata kurang dari 0,2 hektar, sangat sempit untuk ukuran sawah garapan. Kekuatan hukum atas tanah itu pun hampir tidak ada karena satu-satunya bukti, yakni kartu kuning, telah ‘direbut’ oleh negara melalui aparat pemerintah desa dengan alasan akan diganti dengan sertifikat. Namun, hingga kekuasaan Orba berakhir, janji tersebut tidak dipenuhi.

Lahan garapan yang sempit itu menjadikan kehidupan petani jauh dari kecukupan. Apa yang dilakukan petani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Lahan itu mereka tanami berbagai aneka tanaman. Meskipun demikian kesejahteraan petani belum bisa terpenuhi. Berawal dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, petani menggarap tanah yang ada di sekitar perkebunan, khususnya tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pihak perkebunan. Di sinilah persoalan pertikaian antara petani dengan perkebunan, perhutani, dan pemerintah (Orla dan Orba) dimulai. Kedua belah pihak saling melakukan klaim atas tanah. Perusahaan perkebunan mengklaim tanah yang digarap oleh petani adalah tanah perkebunan karena masuk dalam HGU. Petani juga mengklaim tanah tersebut hasil *trukah* yang kemudian dirampas oleh negara, kemudian dikuasakan ke perkebunan melalui HGU.

Hak milik atas tanah merupakan isu kompleks. Persoalan tersebut tidak hanya sebatas pada klaim siapa memiliki tanah dan berada di sebelah mana. Isu tanah memiliki aspek yang seringkali tersembunyi di balik semua upaya yang ada. Berawal dari saling klaim para pihak berseteru hingga kekerasan yang menyertai—hal itu tidak terhindarkan. Tersembunyi di balik itu semua, nilai-nilai sosial kultural dan sejarah tanah yang dipersengketakan menjadi aspek mendasar. Kondisi itu berlangsung berlarut sampai melampaui perjalanan perubahan situasi sosial-politik bangsa Indonesia yakni mulai masa Kemerdekaan, Orla, Orba, hingga Reformasi. Tanah bagi petani Cipari bukan hanya persoalan nilai produktif dan ekonomis, melainkan

terkandung nilai sosial dan kultural. Dua aspek terakhir itulah yang membuat persoalan tanah menjadi berlarut-larut.

Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian terdahulu, bagi masyarakat petani di Cipari, nilai esensial tanah ada dalam ungkapan '*sedumuk bathuk senyari bumi*'. Inilah ruh penyambung semua daya upaya yang dilakukan oleh masyarakat Cipari dalam memperoleh kembali hak-hak milik atas tanah milik. Dalam daya upaya itu, ungkapan tersebut juga merupakan mata rantai yang merangkai koneksi masyarakat Cipari dari generasi ke generasi. Pertemuan maupun perbincangan antarpetani menjadi instrumen untuk mengelola isu hak milik atas tanah dan sebagai dasar maupun strategi gerakan untuk memperjuangkan hak mereka. Menurut Karl-Dietter Opp (2009: 239), jika individu mampu mengidentifikasi diri dalam sebuah isu gerakan sosial maka ada kemungkinan muncul sikap positif terhadap hal itu. Dengan demikian, walaupun belum ada gerakan nyata yang dilakukan, kemampuan identifikasi diri pada isu yang dibangun merupakan janji keterlibatan di dalamnya.

Lebih dari itu, menurut Klandermans dkk. (dalam Opp, Karl-Dietter, 2009: 264), kemampuan identifikasi tersebut menunjukkan bahwa pertemuan yang dilakukan oleh petani merupakan cara untuk menyebarkan isu gerakan dalam relasi bersifat interpersonal. Secara sosiologis, relasi interpersonal lebih berkualitas karena terjadi dalam kerangka hubungan primer. Hubungan primer adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih dalam suasana dekat dan akrab. Melalui pertemuan semacam itu, kerangka isu yang dibangun akan lebih mudah disebar dan ditularkan.

Berdasarkan hasil wawancara, gerakan sosial di Cipari mengunsung tentang ketidakadilan menjadi isu rasional, strategis, dan aman. Ketidakadilan diangkat dengan memperhatikan realitas di lingkungan mereka. Realitas berupa tanah sekitar 350 hektar yang dikuasai perkebunan dibiarkan, tidak dimanfaatkan, dan terlantar. Sementara itu para petani tidak memiliki lahan garapan. WSR, salah satu aktivis petani dari Desa Mekarsari, menyatakan tentang hal itu:

“Kami semua sepakat untuk menuntut tanah perkebunan yang tidak dimanfaatkan oleh perkebunan bisa digarap oleh masyarakat sekitar. Alasan kami dalam mengajukan tuntutan adalah menuntut keadilan. “Selama ini kami merasakan ketidakadilan atas penguasaan tanah. Perkebunan bisa menguasai tanah ribuan hektar. Tetapi kami tidak memiliki lahan garapan. Berhubung ada tanah yang tidak dimanfaatkan perkebunan, maka kami mengajukan permohonan ke pemerintah dan perkebunan agar tanah tersebut bisa digarap oleh penduduk sekitar kebun. Akhirnya semua petani mendukung rencana kami untuk mengajukan tuntutan.” (Wawancara WS pada 13 Maret 2013).

Jonathan Cristiansen (2011: 112) menyebut bahwa dalam gerakan sosial para aktor berusaha membangun isu sebagai sarana pembentukan makna. Isu menjadi kunci dalam perjalanan gerakan mencapai tuntutan. Dalam konteks gerakan sosial di Cipari, isu ketidakadilan menjadi kerangka penting dalam upaya mencapai target gerakan. Hal itu dikarenakan ada pandangan umum bahwa ketidakadilan yang dialami oleh petani Cipari merupakan keadaan yang diciptakan oleh negara melalui perusahaan perkebunan. Oleh sebab itu, ketika petani menuntut keadilan, pandangan masyarakat luas tidaklah menyalahkan. Dengan kata lain, ketika petani menggunakan isu ketidakadilan atas penguasaan dan pemanfaatan tanah, masyarakat mendukung gerakan mereka.

Dukungan masyarakat terhadap gerakan petani dilakukan secara tidak langsung dan terang-terangan. Hal itu dikarenakan beberapa orang yang memberi dukungan berusaha untuk menjaga keamanan diri agar tidak langsung berhadapan dengan aparat negara. Dukungan masyarakat itu menunjukkan bahwa gerakan petani memperoleh capaian cukup signifikan. Pembungkaihan isu yang dilakukan gerakan petani Cipari relatif berhasil dalam menggalang kekuatan massa. Pembungkaihan isu ketidakadilan merupakan pilihan rasional petani daripada *landreform* sebagai strategi perjuangan. Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, *landreform* adalah *platform* PKI. Tidak mengherankan jika pemerintah Orba saat itu sangat antipati dengan istilah tersebut. Pada titik itulah, isu hak milik tanah yang dibingkai sebagai isu ketidakadilan oleh masyarakat Cipari memperoleh penegasannya.

Tujuan petani dalam melakukan tuntutan terhadap perkebunan maupun kepada pemerintah kabupaten tidak lain agar diberi kesempatan untuk menggarap lahan. Tuntutan petani hanya sebatas menguasai tanah saja (sebagai penggarap), bukan memiliki tanah. Namun, upaya petani selalu gagal. Petani pun tidak bosan-bosan mengajukan tuntutan. Tuntutan biasanya langsung ditujukan kepada pihak perkebunan. Di samping itu, pada masa Orba, tuntutan disampaikan melalui pemerintah desa. Pemerintah desa diminta melakukan permintaan langsung ke perkebunan. Permintaan agar tanah yang tidak dimanfaatkan bisa digarap oleh masyarakat sekitar. Kepala desa pun menyanggupi permintaan warga. Namun, upaya itu tidak pernah berhasil. Pihak perusahaan perkebunan tidak pernah mengabulkan permohonan tersebut.

Secara *de facto* sejumlah petani telah menguasai tanah perkebunan yang disengketakan. Tanah yang dikuasai petani adalah tanah milik perkebunan yang berdekatan dengan perkampungan. Tanah itu kemudian dipergunakan untuk tempat tinggal. Petani biasanya membangun rumah sederhana terbuat dari papan atau bambu. Tidak ada rumah yang dibangun secara permanen dengan menggunakan bahan batu bata atau sejenisnya. Ini dimaksudkan agar jika sewaktu-waktu digusur oleh perkebunan, rumah itu bisa dengan mudah dipindahkan. Upaya sejumlah petani itu sebenarnya dilarang pihak perkebunan. Oleh karena itu hanya beberapa orang yang bertempat tinggal di tanah garapan. Petani yang menempati dan tinggal di tanah garapan tersebar di beberapa titik. Hal itu menyulitkan pihak perkebunan dalam melakukan pembongkaran. Pun tampaknya pihak perkebunan berhati-hati dalam soal ini. Pihak perkebunan seperti khawatir akan timbul persoalan berkepanjangan bila melakukan pembongkaran. Di sini perkebunan terkesan berbaik hati kepada penduduk sekitar.

Selain menempati tanah untuk perumahan, di antara petani ada yang mengolah lahan menjadi lahan perkebunan. Lahan itu diolah bukan untuk usaha tani pokok melainkan hanya ditanami beberapa batang pohon seperti, pisang, ketela pohon, dan sejenisnya. Seorang

saksi yang sempat ditemui peneliti, RKM (52 tahun) menjelaskan hal itu, menurutnya:

“Kami hanya memanfaatkan lahan kosong saja. Kami merasa *eman* (Jawa: sayang) melihat lahan yang kosong. Jadi kami tanami. Orang-orang seperti kami ini *kan* tidak punya sawah jadi melihat tanah yang tidak ditanami, rasanya *kok mu-bazir*. Kami sering diperingatkan oleh pihak perkebunan, tetapi ya kami biarkan.” (Wawancara pada 3 Oktober 2013).

Pernyataan di atas menunjukkan dua hal. *Pertama*, perlawanan halus. Resistensi yang dilakukan masyarakat tidak frontal, tidak begitu saja melakukan perlawanan jika suatu saat digusur paksa pihak perkebunan. Hal itu pun dibuktikan dengan bangunan-bangunan tidak permanen, hanya terbuat dari kayu atau bambu yang dengan mudah dapat dibongkar pasang kembali. *Kedua*, sikap pihak perusahaan perkebunan tidak tegas. Artinya, jika mendasarkan diri pada surat kuasa atas pengelolaan tanah (HGU) maka sesungguhnya pihak perkebunan dapat begitu saja mengusir para petani. Namun demikian, masyarakat Cipari tahu persis bahwa pihak perkebunan tidak melakukan hal itu karena lahan yang dimanfaatkan warga adalah lahan kosong yang tidak diolah pihak perkebunan.

Tuntutan petani untuk menggarap lahan kosong dilakukan berulang kali. Petani telah mencoba mengajukan permohonan kepada perusahaan, tetapi tidak membuahkan hasil. Petani juga telah mengajukan tuntutan tersebut melalui kepala desa meski berakhir sama, tanpa hasil. Pada sekitar 1979, petani mengajukan permohonan lagi. Kali ini, permohonan ditujukan kepada Bupati Cilacap. Beberapa orang perwakilan petani datang ke kantor bupati. Di sana petani diterima oleh kepala bagian pertanahan Kabupaten Cilacap. Dalam pertemuan itu terjadi pembicaraan antara petani dengan kepala bagian pertanahan tersebut. Isinya, antara lain, petani meminta agar bupati Cilacap membantu mereka untuk mendapatkan lahan garapan dari perkebunan. Saat itu kepala bagian pertanahan menjanjikan akan berupaya membantu petani. Surat permohonan petani akan dipelajari untuk selanjutnya akan disampaikan ke Bupati Cilacap. Harapan petani untuk mendapatkan tanah garapan membunch dan

seakan tinggal menunggu waktu saja. Demikian itulah kesan di antara petani sepulang dari kantor Bupati Cilacap. Setelah ditunggu beberapa bulan, apa yang menjadi impian petani hilang. Perkebunan tetap menolak permohonan petani dengan alasan pihak perkebunan hendak mengembangkan komoditas tanaman baru.

Pada 1980-an perusahaan perkebunan PT RSA dibagi menjadi dua. Satu perusahaan bernama PT Rumpun Antan yang menangani serta mengelola karet dan kakao. Satu lagi, bernama PT Rumpun Teh, menangani dan mengelola tanaman teh. Perubahan manajemen ini memberikan ‘buah’ yang selama ini menjadi impian petani. Sebagian tanah yang tidak cocok untuk ditanami karet akhirnya diberikan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil (*sakap*). Sistem *sakap* yang diterapkan perkebunan kepada petani berbeda dengan yang biasa diterapkan oleh masyarakat setempat. Sistem *sakap* yang lazim dijalankan masyarakat Cipari adalah bagi hasil panen antara penggarap dengan pemilik tanah. Oleh sebab itu, bagi hasil semacam itu juga dikenal dengan istilah *maro* (dari kata *separo*, dibagi dua, 50:50). Sementara itu, sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perkebunan adalah sama dalam hal bagi hasil panen, tetapi setiap penggarap harus memberikan uang jaminan⁵ kepada perkebunan. Perusahaan perkebunan menetapkan bahwa setiap 1 hektar tanah, penggarap wajib membayar uang jaminan sebesar Rp 21.000 pada saat itu (untuk saat sekarang setara dengan Rp 2.000.000–Rp 3.000.000). Penerapan sistem ini menyebabkan hilangnya akses terhadap tanah di kalangan buruh tani maupun petani kecil. Meskipun demikian, semua lahan perkebunan tidak ada yang tersisa. Hasil penelusuran penulis terhadap sejumlah informan menemukan bahwa penggarapan tanah dengan sistem jaminan mengakibatkan tanah itu dikuasai oleh petani-petani bermodal. Sejumlah perangkat desa waktu itu banyak menyewa tanah tersebut. Sementara buruh tani tetap menjadi

⁵ Sistem bagi hasil dengan uang jaminan pada 30 tahun lalu banyak ditemukan di Kabupaten Bantul. Sistem seperti ini dikenal dengan istilah “*sromo*” atau “*nyeromo*”. Istilah ini penulis kenal pada saat masih kecil di mana desa tempat tinggal penulis berlaku sistem ini. Sistem ini sebenarnya dalam rangka menyeleksi calon penggarap dengan harapan hasil panen di kemudian hari bagus, sehingga pemilik tanah tidak dirugikan.

buruh tani. Bagi hasil semacam itu, pada akhirnya, tidak mengubah nasib petani Cipari secara umum. Tuntutan akan kepemilikan hak atas tanah masih ‘jauh panggang dari api’.

Keberadaan perkebunan di Cipari, dapat dikatakan telah banyak menyerap tenaga kerja berasal dari warga setempat. Namun, tenaga kerja yang banyak diserap adalah sebagai pekerja kasar. Banyak warga Cipari bekerja di perkebunan sebagai tukang cangkul, pembersih rumput, buruh pemanen, penjaga malam, keamanan kebun, dan tukang bersih-bersih kantor. Sementara pekerjaan pada tingkat menengah ke atas jumlah warga Cipari yang bekerja di perkebunan sangat sedikit. Pekerja level manajer ke atas, semua berasal dari luar daerah.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara kepada perangkat desa, kemudian dikonfirmasi dengan karyawan kebun, diketahui bahwa jumlah warga sekitar kebun yang bekerja sebagai buruh di perkebunan cukup banyak. Mereka kebanyakan sebagai buruh lepas, dengan upah rata-rata per hari kerja sebanyak Rp 27.500,00. Jam kerja untuk pagi hari mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 11.00. Siang hari mulai pukul 13.00 hingga pukul 17.00. Selain pekerja lepas, warga sekitar banyak dijadikan sebagai mandor kebun. Mereka bertugas untuk mengawasi buruh lepas. Sebagian lainnya bekerja sebagai keamanan kebun maupun kantor. Jumlah warga Cipari yang pekerja lepas di perkebunan sangat banyak. Hal itu menjadikan organisasi gerakan mengalami kesulitan ketika melakukan aksi. Organisasi ini akan berhadapan dengan warga sendiri selaku keamanan kebun. WSR, aktivis dari organisasi *Singatangi* Desa Mekarsari, mengisahkan:

“Kami pernah membuat rencana kerja untuk melakukan aksi pematokan tanah. Pada hari H, rencana itu susah dilakukan sebab di lokasi yang mau kami ukur sudah ada warga kami yang pegawai perkebunan memperingatkan dan melarang kami untuk tidak mematok tanah.” (Wawancara pada 13 Mei 2013).

Pernyataan WSR mengisyaratkan sulitnya mengidentifikasi atau memetakan siapa kawan dan siapa lawan. Pemetaan lawan-kawan perlu dilakukan oleh organisasi gerakan agar strategi dan taktik bisa

diatur sedemikian rupa. Hasil identifikasi aktivis petani terhadap pekerja perkebunan diketahui bahwa tidak semua warga Cipari yang bekerja di perkebunan dapat dijadikan kawan. Di antara mereka, ada yang berposisi sebagai lawan. Mereka adalah para pekerja kebun yang tidak mendukung rencana-rencana para aktivis. Sebaliknya, di antara mereka ada yang memberikan dukungan berupa material maupun non-material. Identifikasi mengenai lawan-kawan ini juga diperoleh kepastian bahwa para kepala desa dan segenap jajarannya memberikan dukungan kepada para petani. Atas dasar ini para aktivis kemudian mengajak para kepala desa untuk bersama-sama mengajukan tuntutan kepada perkebunan.

Kegagalan petani Cipari di masa Orba tidak menyurutkan langkah dan semangat petani. Mereka melakukan evaluasi atas tindakan maupun aksi yang pernah dilakukan. Mereka juga sudah mulai berpikir tentang nilai penting sebuah organisasi gerakan, kerja sama antarkelompok tani atau organisasi lain. Pertemuan antarkelompok tani sering dilakukan. Dalam pertemuan itu banyak dibahas rencana tindakan untuk melakukan aksi bersama. Mereka mempersiapkan diri, mencari waktu serta kesempatan, momen aksi kolektif menuntut tanah bisa dilakukan kembali, dengan cara apa mereka melakukan tuntutan, termasuk siapa saja yang bisa diajak dalam aksi gerakan.

Proses membingkai isu (*framing*) bukanlah langkah sederhana dalam menyusun gerakan sosial meski persoalannya jelas. Sejak masa pra-kemerdekaan, muncul kekuasaan Orla, hingga Orba, persoalan yang dialami oleh petani Cipari begitu jelas. Hak kepemilikan atas tanah milik petani dimulai dari proses *trukah*, perolehan Kartu Kuning, pertentangan dengan negara, keterlibatan BTI, pencabutan Kartu Kuning, hingga persengketaan dengan pihak perkebunan pemegang HGU. Dalam proses panjang tersebut, masyarakat petani menjadi pihak yang melakukan perlawanan terhadap pihak berkuasa, yakni negara. Dalam situasi semacam itu, perjuangan dilakukan tanpa mengenal lelah hingga melampaui batas-batas perubahan situasi politik negara. Bingkai isu ketidakadilan, dengan demikian, hanyalah produk akhir dari perjalanan panjang perjuangan tersebut.

BAB V

GERAKAN PETANI DI MASA REFORMASI: "MUSIM PANEN" GERAKAN PETANI CIPARI

5.1. Keterbukaan Kesempatan Politik dan Dialektika Gerakan Petani Cipari

Sejumlah ahli yang memikirkan bagaimana memecahkan persoalan konsentrasi penguasaan dan pemanfaatan sumber agraria mempercayai bahwa pergantian rezim Orde Baru (Orba) merupakan prasyarat untuk pemberlakuan pembaruan agraria di Indonesia. Tanpa ada perubahan kekuasaan politik yang mendasar, tidak ada harapan bagi siapapun untuk menyaksikan pemberlakuan pembaruan agraria oleh pemerintah yang berkuasa (Fauzi, 2003: 37). Maksudnya, perubahan kekuasaan politik adalah perubahan dari sistem politik tertutup dan represif menjadi sistem politik terbuka dan demokratis. Keterbukaan sistem politik seperti ini dalam terminologi McAdam dimaknai sebagai kesempatan atau peluang politik. Artinya, dalam situasi semacam ini rakyat bisa melakukan tekanan kepada pemerintah untuk melaksanakan pembaruan agraria (penataan aset tanah). Seperti terjadi di Nepal (Adhikari, 2008) dan Bangladesh (Islam, 2013: 67-77), masyarakat memperoleh hak milik atas tanah karena organisasi masyarakat sipil melakukan tekanan terhadap pemerintah serta bekerja sama untuk melaksanakan redistribusi tanah.

Dalam beberapa teori gerakan sosial disebutkan bahwa kondisi politik berpengaruh terhadap gerakan sosial. Eisinger (dalam Dietter, 2009: 161), misalnya, melihat lingkungan politik (*political environment*) di mana sebuah gerakan sosial berlangsung, berpengaruh dalam proses gerakan sosial. Situasi itu, di satu sisi, bisa berupa perilaku

pejabat pemerintah, model pemilihan elite politik, distribusi kepemimpinan politik serta derajat disintegrasi sosial. Sementara di sisi lain, situasi politik juga bisa berupa ketanggapan pemerintah dalam menangani berbagai persoalan dan level sumber daya masyarakat di mana gerakan sosial itu terjadi. Eisinger sering juga menyebut lingkungan politik dengan istilah struktur kesempatan politik (*political opportunity structures*). Istilah itu selalu dikaitkan atas tujuan aktivitas gerakan sosial, kesempatan gerakan sosial untuk meraih keberhasilan mencapai tujuan, dan adanya kausalitas dengan situasi politik dan gerakan sosial yang sedang berlangsung secara timbal balik. Singkatnya, lingkungan politik bisa menyebabkan kemunculan gerakan sosial, dan sebaliknya gerakan sosial bisa mempengaruhi situasi politik. Secara ringkas, Eisinger menulis:

“Elemen dalam lingkungan politik mempengaruhi hambatan dalam aktivitas politik atau membuka aktivitas politik. Reaksi individu dan kelompok dalam sistem politik, kemudian, tak sebatas fungsi menguasai sumber daya tapi membuka titik lemah, hambatan, dan sumber daya sistem politik itu sendiri. Ada, dalam pengertian ini, interaksi atau hubungan, antara situasi politik, dipahami dalam term gagasan struktur kesempatan politik, dan perilaku politik.” (dalam Dietter, 2009:162).

Dalam konteks gerakan sosial di Cipari, momentum pergantian kekuasaan dari Orba beralih ke Era Reformasi harus dilihat sebagai struktur kesempatan politik bagi gerakan sosial di sana. Pergantian kekuasaan nasional dimanfaatkan oleh petani Cipari. Ini dapat disaksikan, misalnya, bahwa di penghujung 1998 petani kembali melakukan gerakan menuntut hak atas tanah. Gerakan pada 1998 sebagai awalan melakukan gerakan sosial yang lebih dahsyat pascaruntuhnya kekuasaan Orba.

Pascakeruntuhan rezim Orba, perjuangan petani untuk melakukan gerakan menuntut hak atas tanah terjadi hampir di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Di Jawa pada umumnya, gerakan rakyat pedesaan memanfaatkan kesempatan politik dari periode transisi dan berlanjut dengan melancarkan aksi-aksi pendudukan tanah yang sebelumnya dikuasai oleh perkebunan milik negara dan

swasta, termasuk Perhutani. Berbagai istilah, seperti okupasi tanah, *reclaiming*, *landreform*, pembaruan agraria, menjadi istilah populer di kalangan pegiat agraria (Fauzi, 2012: 82). Lucas dan Warren (2003: 87) mengilustrasikan protes agraria sejak Era Reformasi berlangsung secara dramatis, mereka menyatakan sebagai berikut:

“Sejak Era Reformasi berlangsung, kebangkitan protes agraria di Indonesia muncul secara dramatis. Kebangkitan itu mengingatkan tindakan pendudukan tanah secara sepihak di awal-awal 1960-an, merebut lahan milik petani kaya yang terlibat dalam tanah berperkar, melalui tindakan langsung untuk mengingatkan keserakahan mereka. Tindakan ‘reclaiming’ ini termasuk pendudukan lahan perkebunan negara, lapangan golf dan juga ‘lahan tidur’ yang dimiliki oleh investor spekulasi tanah.” (Lucas dan Warren, 2003: 87-88)

Kebangkitan beragam protes agraria itu hanyalah puncak gunung es dari banyak persoalan agraria di Indonesia. Setidaknya, menurut Nasoetion (2002: 216), ada lima sumber konflik agraria di Indonesia, yakni pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata, ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah non-pertanian, keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah sangat kurang, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (hak ulayat) sangat kurang, dan posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah sangat lemah.

Berbagai sumber konflik agraria itu, merujuk Karl Marx, merupakan hasil proses akumulasi kapital yang terkandung dalam sistem kapitalisme (Habibi, 2014: 91). Menurut Marx kekuatan sistem kapitalisme melalui mekanisme pasar menjadikan kebutuhan akan lahan meningkat guna mencukupi kebutuhan industrialisasi. Seiring peningkatan kebutuhan lahan, terjadi proses peminggiran. Hasilnya, terjadi proses proletariatisasi. Dalam konteks petani proses itu telah memisahkan petani dari sarana produksi (tanah).

Keterpisahan petani dari sarana produksi menurut Nasikun merupakan akibat dari proses perkembangan kapitalisme di Indonesia (Rahmawati, 2003: 337). Menurut Nasikun ada dua tingkatan proses kapitalisme di Indonesia. *Pertama*, proses eksploitasi, akumulasi

dan ekspansi kapital melalui proses *agricultural squeeze*. Dalam proses itu, ada dua hal yang terjadi yakni upaya dalam bentuk industri mengenai produksi bahan pangan yang melimpah sebagai komponen upah dan cadangan tenaga kerja murah. *Kedua*, upaya-upaya negara untuk memenuhi kebutuhan industri dalam wujud peran negara menyediakan tanah murah guna kepentingan industri. Hal itu memunculkan tafsir dari negara tentang fungsi sosial tanah ditujukan untuk pembangunan.

Kenyataan yang muncul kemudian adalah eksploitasi tanah yang diperantarai negara. Akibat dari tafsir itu negara seringkali semena-mena melakukan pencaplokan tanah atas nama pembangunan. Kemunculan berbagai gerakan petani pada Era Reformasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan sebelumnya di Era Orba. Secara dialektis, gerakan petani di Era Reformasi merupakan respons terhadap kebijakan yang ada sebelumnya dan sekaligus bertujuan untuk memperbaiki keadaan agar lebih baik bagi petani. Beragam gerakan petani di Era Reformasi bukan disebabkan oleh perubahan struktur masyarakat semata, melainkan juga disebabkan struktur agraris yang rapuh dan eksploitasi tanah atas nama pembangunan menyebabkan konflik tanah secara struktural, yakni antara petani dengan negara.

Konflik antara petani dan negara dalam hal sengketa tanah menemukan momentum untuk meledak seiring gerakan Reformasi menerpa Indonesia. Menurut Ida Nurlinda (2013: 2), setidaknya setelah Reformasi bergulir, yakni pada 2004, tercatat 143 kasus konflik agraria terjadi di sektor perkebunan. Angka itu terus meningkat setiap tahun. Peningkatan angka konflik agraria seiring angin keterbukaan di Indonesia.

Dalam tataran kebijakan agraria, hal itu ditandai dengan terbitnya TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Gunawan Wiradi, 2002: 7). Kebijakan itu memberi ruang bagi gerakan tani untuk menuntut kembali tanah (tanah sengketa) mereka yang dikuasai negara atas nama pembangunan. TAP MPR No. IX/MPR/2001 itu diperkuat Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan kepada MPR-RI untuk Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Keputusan

MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003. Salah satu butir saran dimaksud kepada Presiden Republik Indonesia adalah terkait dengan perlunya Penataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah.

Reforma Agraria atau secara legal formal disebut juga dengan Pembaruan Agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Dalam pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa:

“Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Di Era Reformasi, bermunculan organisasi-organisasi petani alternatif di luar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Sepanjang 1998-1999, berdiri tiga kelompok tani alternatif yaitu Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Serikat Tani Nasional (STN) dan Kelompok Kerja (Pokja) Nasional Petani Mandiri (Rahmawati, 2003: 339-340). Dalam tataran pemerintahan, kontrol negara hingga tingkat desa kian mengendur. Berbagai kenyataan itu merupakan “kontur” bagi gerakan tani di Indonesia untuk melakukan gerakan mereka.

Iklim demokratis dan cuaca keterbukaan secara nasional itu dimanfaatkan oleh gerakan tani untuk melakukan aksi-aksi tuntutan. Hal sama juga terjadi di Cipari. Para petani mulai gencar lagi melakukan gerakan menuntut hak atas tanah yang selama bertahun-tahun dikuasai oleh perkebunan. Di Era Reformasi, di Cipari dan juga daerah sekitarnya dikenal sebagai daerah basis gerakan sosial yang dilakukan oleh petani. Porta dan Diani (2006: 20) menyebut bahwa gerakan sosial berbeda dengan proses sosial. Gerakan sosial terdiri atas mekanisme aktor gerakan terlibat dalam aksi kolektif. Keterlibatan aktor dalam hal ini, misalnya terlibat dalam hubungan konfliktual

dengan pendukung yang teridentifikasi dengan jelas, berhubungan dengan jaringan informal, dan kesatuan kolektif berbagai identitas.

Gerakan sosial bukan hanya peristiwa pada isu-isu tertentu atau kampanye khusus. Sebaliknya, proses gerakan sosial ditempatkan ketika identitas kolektif berkembang melampaui peristiwa dan inisiatif tertentu. Identitas kolektif adalah keterhubungan rekognisi (pengakuan) dan kreasi. Ini terjadi karena ada tujuan dan komitmen bersama. Hal itu memungkinkan para aktivis atau aktor dalam organisasi menganggap diri mereka terkait erat dengan aktor-aktor lain. Mereka ada dalam kolektivitas lebih luas untuk dimobilisasi. Mengikuti pemikiran Porta dan Diani, apa yang dilakukan petani Cipari bisa disebut sebagai sebuah gerakan. Hal itu dikarenakan mereka terlibat hubungan konfliktual dengan perkebunan. Konflik ini berlangsung lama dan tidak pernah terselesaikan. Mereka melakukan aksi kolektif dan memiliki tujuan pasti, mendapatkan tanah.

Pascakeruntuhan rezim Orba, bentuk aksi kolektif yang dilakukan oleh petani Cipari bermacam-macam seperti, melakukan tuntutan dan gugatan kepada pemerintah serta perkebunan, demonstrasi, lobi dan okupasi tanah. Okupasi tanah menjadi ciri tersendiri dalam sejarah gerakan petani Cipari. Jika di masa Orba petani tidak melakukan okupasi tanah dikarenakan represi negara sangat besar. Maka, di Era Reformasi, niat untuk menduduki tanah yang terpendam bertahun-tahun, akhirnya dapat dicurahkan. Era Reformasi bisa disebut sebagai era "pelampiasan" aksi bagi petani Cipari.

Pada awalnya petani Cipari melalui organisasi melakukan gugatan terhadap negara dan perkebunan. Mereka mendatangi lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang mengatur bidang agraria, utamanya tanah. Para petani yang tergabung dalam organisasi tani lokal (OTL) mendatangi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara (BPN) Semarang, Kantor BPN Cilacap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap. Mereka juga mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilacap, untuk menyampaikan aspirasi mereka. Pada saat itu, gerakan petani (OTL) di bawah koordinasi Serikat Tani Merdeka (SeTAM).

Di era pemerintahan transisi (Mei 2008-November 1999), OTL yang pertama kali mengajukan tuntutan kepada instansi pemerintah dan perkebunan adalah OTL Singatangi dari Desa Mekarsari. Sejumlah petani (sebanyak 366 orang) menuntut atas tanah seluas ± 150 hektar yang dikuasai PT. RSA. Para petani penggarap ini menuntut tanah hasil *trukah* yang hilang sejak 1965 dikembalikan. Mereka tidak saja menyampaikan tuntutan secara lisan, tetapi juga mengajukan permohonan tertulis. Dalam permohonan itu berisikan bahwa masyarakat (petani) menuntut agar sebagian tanah HGU perkebunan diberikan kepada masyarakat sekitar, utamanya para penggarap tanah.⁶ Tuntutan masyarakat hanya satu, yaitu agar *landreform* atau redistribusi tanah perkebunan dilaksanakan.

Protes atau gugatan juga dilakukan oleh petani Desa Karangreja untuk kasus berbeda. Masyarakat Desa Karangreja yang tergabung dalam OTL Mangkubumi melakukan gugatan atas tukar guling tanah dengan PT. RSA seluas ± 34 hektar. Tanah tersebut semula dikuasai oleh ± 106 petani. Pihak perkebunan menawarkan tukar guling tanah dengan warga lantaran tanah yang dikuasai petani berdekatan dengan lahan perkebunan. Setelah tanah warga diserahkan kepada perkebunan, kemudian tanah itu dimanfaatkan oleh perkebunan, tetapi hingga saat ini perkebunan belum memberikan ganti tanah kepada warga. Berikut ini keterangan dari Kepala Desa Karangreja:

“Pada saat itu perusahaan, dalam hal ini PT. RSA, menawarkan tukar guling tanah kepada masyarakat. Tanah PT. RSA berupa tanah rawa akan ditukarkan dengan tanah dataran tinggi milik warga. Alasan perkebunan melakukan tukar guling karena tanah rawa tidak cocok untuk tanaman kakao, dan lebih cocok untuk tanaman padi. Pada waktu itu perusahaan berjanji jika tukar guling ini berhasil, para pemilik tanah akan dijadikan menjadi karyawan tetap perkebunan. Akhirnya terjadi kesepakatan antara warga dengan perusahaan. Setelah warga menyerahkan tanahnya, perusahaan tidak segera menyerahkan tanahnya. Ternyata semua itu bohong belaka, ... bahkan warga kehilangan tanah sekitar ± 34 hektar. Sampai saat ini warga belum memperoleh tanah pengganti yang dijanjikan oleh perkebunan.” (Wawancara pada 11 April 2013).

⁶ Dokumen tuntutan Kelompok Tani Singatani dari Desa Mekarsari, Cipari terhadap PT RSA.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kepala Desa Karangreja semakin jelas bahwa petani memiliki hak untuk menuntut kembali tanah yang dimanfaatkan oleh pihak perkebunan. Menghadapi kenyataan tersebut, ±106 KK yang dimotori oleh OTL Mangkubumi melakukan gugatan kepada pihak perkebunan. Upaya yang ditempuh warga Desa Karangreja yaitu mengajukan gugatan ke PT. RSA melalui pemerintah desa. Atas gugatan petani, akhirnya pemerintah desa berupaya menyelesaikan persoalan ini. Selanjutnya desa, dalam hal ini dimotori kepala desa, mengajukan tuntutan atas tanah yang hilang. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Karangreja:

"Desa atas nama petani yang terlibat dalam tukar guling tanah telah berupaya mengajukan permohonan tanah yang dicaplok oleh perusahaan. Upaya yang dilakukan desa sudah sampai ke Bupati, PT. RSA, BPN Semarang, dan BPN Pusat. Bahkan yang dilakukan desa sudah sampai ke LBH Jakarta, Ombudsman dan sekretariat negara. Pemerintah kabupaten menurut saya kurang merespons masalah ini. Ketika kami menanyakan masalah ini selalu dijawab oleh aparat kabupaten kalau pemerintah kabupaten sudah memperoleh jawaban dari pemerintah pusat (BPN) bahwasanya persoalan ini masih dalam proses. Tetapi ketika kami meminta surat tembusan (surat jawaban dari BPN/pemerintah) tidak pernah diberi. Itu menunjukkan kalau pemerintah kabupaten tidak serius dalam menanggapi persoalan ini." (Wawancara pada 11 April 2013).

Menyimak keterangan yang disampaikan Kepala Desa Karangreja, tampak bahwa perjuangan petani Cipari menuntut tanah mereka menghadapi jalan terjal. Keterangan itu juga menunjukkan bahwa konstelasi politik nasional bertolak belakang dengan struktur politik di tingkatan lokal, yakni Kabupaten Cilacap, khususnya Cipari. Jika politik tingkat nasional menuju ke arah keterbukaan, struktur politik di Cipari masih bercorak Orba, bahkan lebih parah lagi. Mengikuti Eisinger (dalam Dietter, 2009: 161) bahwa *political environment* dapat berupa perilaku pejabat pemerintah dan ketanggapan pemerintah dalam menangani berbagai persoalan, situasi politik di Cipari sangatlah tertutup. Pemkab Cilacap sangat lambat merespons tuntutan petani. Alih-alih segera memenuhi tuntutan petani, pejabat Pemkab Cilacap tidak memberikan jawaban jelas tentang tuntutan petani.

Apa yang menarik dari gerakan petani Cipari adalah mereka terus bergerak memperjuangkan tuntutan mereka. Hal itu dapat dilihat dari tuntutan mereka. Selain menuntut tukar guling tanah, OTL yang berada di Cipari juga mengajukan tuntutan kepada PT. RSA atas hilangnya tanah garapan bagi para petani. Salah satu OTL yang melakukan tuntutan itu adalah OTL Mangkubumi. Adapun tuntutan OTL Mangkubumi terdiri atas beberapa butir pernyataan sebagai berikut:⁷

1. Dicabutnya Hak Guna Usaha atas nama PT. Rumpun Sari Antan yang berkedudukan di Desa Karangreja Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.
2. Ditanggguhkan berlakunya perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Rumpun Sari Antan nomor 59/HGU/BPN/2004 yang terbit pada tanggal 14 September 2004 yang berkedudukan di Desa Karangreja Kecamatan Cipari, untuk kemudian ditinjau kembali atas pemberian perpanjangan HGU tersebut.
3. Dipenuhinya perjanjian tukar guling antara masyarakat dengan pihak pemerintah maupun kebun (PT. Rumpun Sari Antan) yang sampai saat ini masyarakat tidak mempunyai kekuasaan untuk mengolah dan memiliki lahan tersebut.
4. Dikembalikannya tanah yang sekarang dikuasai PT. Rumpun Sari Antan kepada warga masyarakat Desa Karangreja sebagai lahan pertanian produktif.

Beberapa butir tuntutan di atas, sekali lagi menunjukkan gerakan petani makin terbuka dalam mengajukan tuntutan petani. Meski struktur politik lokal tidak mendukung gerakan mereka, gerakan petani Cipari terus melakukan tuntutan. Hal ini juga, dalam derajat tertentu, melawan pandangan McAdam tentang perluasan kesem-

⁷ Dokumen OTL Mangkubumi tentang tuntutan tanah HGU PT. RSA Cipari.

patan politik akan mereduksi jarak kekuasaan antara kelompok yang melakukan gerakan dengan pemerintahan. McAdam menyebut tentang kesempatan politik sebagai berikut:

"Dengan perkembangan kesempatan-kesempatan politik yang saya maksud adalah perubahan dalam segi-segi institusional atau keberpihakan pimpinan politik informal dalam sistem politik yang ada secara signifikan mereduksi disparitas kekuasaan antara kelompok penentang dan negara." (Dietter, 2009: 167).

Apa yang diutarakan McAdam tentang kesempatan politik di atas, tidaklah berbanding lurus dengan keadaan di Cipari. Pandangan McAdam hanya bisa digunakan untuk membaca struktur politik di tingkat nasional, yakni keseluruhan negara Indonesia yang tengah melakukan gerakan Reformasi. Namun, ketika digunakan untuk membaca struktur politik lokal, yakni gerakan petani Cipari, belum memadai. Di Cipari, dukungan pemimpin politik informal menguat. Hal itu terlihat dari kemauan kepala desa untuk terlibat dalam aksi tuntutan. Namun, perbedaan jarak kekuasaan antara Pemkab dengan petani tetaplah lebar. Itu artinya, struktur kesempatan politik di Cipari tidaklah membuka. Gerakan petani Cipari yang dilakukan terus-menerus adalah upaya untuk menguak kesempatan politik, yakni struktur politik lokal.

Upaya terus-menerus itu melalui proses aksi-refleksi secara berkelanjutan. Tindakan aksi-refleksi gerakan tani Cipari terlihat misalnya ketika melakukan tuntutan terhadap PT. RSA yang tertuang dalam beberapa butir tuntutan di atas. Tuntutan yang diajukan oleh masing-masing OTL dipandang tidak efektif dan terkesan tidak kompak. Selanjutnya, gugatan dari tiap-tiap OTL (5 OTL) kemudian disatukan menjadi satu gugatan. Gugatan tersebut bukan atas nama OTL, melainkan atas nama SeTAM. Penyatuan itu merupakan upaya semua OTL yang ada di Cipari dan sekitarnya ketika telah bergabung dalam konsorsium bernama SeTAM. Oleh karena itu, perjuangan petani di Era Reformasi ini dimotori oleh SeTAM.

Selain beberapa tuntutan di atas, bentuk gerakan lain yang dilakukan petani Cipari yaitu okupasi tanah. Okupasi tanah ini dila-

kukan dengan cara pematokan batas tanah perkebunan yang akan dikuasai oleh petani. Okupasi tanah pertama kali dilakukan oleh OTL Ketanbanci. Saat itu OTL Ketanbanci sedang bersengketa dan menuntut tanah kepada PT. Djawatie. OTL Ketanbanci melakukan gerakan okupasi tanah secara frontal. Kelompok tani ini menuntut tanah yang menurut mereka dicaplok oleh PT. Djawatie.

Sebelum melakukan aksi okupasi lahan, para pengurus mengadakan pertemuan beberapa kali. Pertemuan pertama hanya dihadiri oleh pengurus. Pertemuan berikutnya, sejumlah anggota (petani) ikut dalam pertemuan. Pertemuan pertama sengaja hanya untuk pengurus organisasi. Ini dimaksudkan agar pertemuan itu cepat mengambil keputusan. Berbeda dengan forum besar, biasanya keputusan akan lebih sulit diambil. Dalam pertemuan itu dibahas rencana untuk melakukan gerakan. Rencana tindakan untuk aksi meliputi waktu, strategi, termasuk aktor siapa saja yang akan dilibatkan dalam aksi. Setelah para pengurus organisasi melakukan pertemuan beberapa kali, akhirnya diputuskan strategi untuk melakukan gerakan. Strategi gerakan yang dipilih yaitu dengan cara pendudukan tanah yang menjadi objek sengketa.

Suatu hari pada 1999, organisasi ini berani melakukan pematokan tanah. Sebelum pematokan dilakukan, mereka juga menebang tanaman karet di tanah sengketa. Tanah yang disengketakan dengan pihak perkebunan memang sudah dipenuhi tanaman karet. Hanya sebagian kecil saja masih kosong. Pada hari pertama, upaya pematokan dan penebangan, belum mendapat tanggapan dari perusahaan. Pada hari kedua gerakan serupa kembali dilakukan dengan jumlah petani lebih banyak dibandingkan hari sebelumnya. Puluhan petani baik berusia tua maupun muda dikerahkan dalam aksi tersebut.

Pada hari itu juga, PT. Djawatie dibantu oleh aparat keamanan negara melakukan tindakan pencegahan usaha pematokan lahan. Semula aparat keamanan negara hanya berjaga-jaga, tetapi beberapa saat kemudian terjadi tindakan represif terhadap para petani.⁸ Aki-

⁸ Tindakan represi ini tergantung pada derajat kolusi antara negara, pemodal besar dan militer. Lihat Aditjondro, 2002, dalam buku *Berebut Tanah*, editor Anu Lounela dan R. Yanto Zakaria, Yogyakarta, INSIST Press, hlm. 404.

batnya, bentrok warga dengan aparat keamanan tak dapat dihindarkan. Akhirnya, beberapa anggota Ketanbanci terpaksa harus berurusan dengan lembaga peradilan karena dituduh melakukan perusakan mobil Brimob Polres Cilacap.⁹ Atas tindakan represif itu, para petani di Cipari mengadukan persoalan ini ke LBH Yogyakarta. LBH akhirnya disibukkan proses peradilan atas anggota organisasi petani yang terpaksa berurusan dengan hukum.

Peristiwa yang terjadi di Desa Cisuru akhirnya membuka ruang negosiasi antara organisasi Ketanbanci dengan Pemkab Cilacap, BPN RI, Kanwil BPN Jawa Tengah, dan BPN Cilacap. Keterbukaan ruang negosiasi ini bersamaan dengan kampanye kasus konflik tanah di tingkat nasional kian gencar. Proses negosiasi memakan waktu lama sehingga menguras tenaga dan pikiran para aktivis, termasuk para pendamping petani.

Pada awalnya masyarakat menuntut ratusan hektar tanah kepada perusahaan perkebunan untuk didistribusikan kepada masyarakat. Namun, tiba-tiba masyarakat menerima tawaran dari perusahaan tanah seluas 12 hektar. Sejauh penelusuran penulis, keputusan tiba-tiba ini belum ada penjelasan yang memadai. Sebenarnya, tawaran tanah itu tentu saja tidak sebanding dengan tuntutan. Tapi alasan yang paling bisa diterima, barangkali karena masyarakat 'haus' untuk memiliki tanah sehingga mereka menerima tawaran itu.

Kemungkinan lain, jangan-jangan ada oknum yang bermain dalam persoalan ini untuk mengambil keuntungan pribadi. Tak dipungkiri, sering muncul 'penumpang gelap' (*free rider*) ketika terjadi gerakan sosial. Marcus Olson menyebut bahwa gerakan sosial kadangkala memunculkan para 'penumpang gelap' yang mengambil keuntungan dari sebuah gerakan sosial (Goodwin dan Jasper, 2015: 53). Namun demikian, sejauh pengamatan penulis tidak ditemukan indikasi akan hal tersebut. Data di lapangan menunjukkan bahwa

⁹ Untuk mengetahui lebih jauh tentang gerakan yang dilakukan oleh OTL Ketanbanci, baca: *Negosiasi Ala Ketanbanci dalam Konflik Tanah antara Warga Desa Cisuru Cilacap versus PT Indo Java Rubber Planting Company*. Dalam *Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik Atas Sumber Daya Alam*, editor Ichsan Malik, dkk, 2003, Jakarta, Yayasan Kemala, hlm 505.

OTL di Cipari beranggotakan petani yang mempunyai kesadaran penuh tentang tujuan mereka berorganisasi.

Dalam teori mobilisasi sumber daya disebut bahwa ada 2 (dua) tipe keanggotaan organisasi, yakni anggota yang terlibat berdasarkan nurani (*conscience constituents*), biasanya dari luar organisasi tanpa mendapatkan manfaat secara langsung dari hasil perjuangan, sementara terdapat juga anggota sebagai penerima manfaat langsung dari hasil perjuangannya (*beneficiary constituents*), *beneficiary constituents* ini biasanya merupakan anggota tetap dari awal organisasi terbentuk (Simone, 2011: 113). Semua anggota OTL di Cipari adalah anggota tetap. Mereka telah bergerak dalam satu kesamaan isu dan terutama mempunyai solidaritas organisasi yang kuat. Dengan demikian, kecil kemungkinan mereka menjadi 'penumpang gelap' dalam gerakan di Cipari.

Dalam kerangka teori mobilisasi sumber daya, anggota yang telah terkerangkakan dalam satu kesatuan isu, kecil kemungkinan untuk menjadi 'penumpang gelap' dalam gerakan sosial (Simon, 2011: 113). Terlepas dari kemunculan 'penumpang gelap' dalam gerakan petani di Cipari, proses distribusi lahan terus berjalan. Setelah petani menerima tanah, kemudian tanah tersebut didistribusikan kepada sekitar 190 penggarap sehingga setiap penggarap hanya menerima tanah seluas ± 45 ubin, atau setara dengan 630 m^2 .

Keberhasilan OTL Ketanbanci dalam melakukan perjuangan menuntut hak atas tanah menginspirasi OTL di sekitarnya. OTL Cipari yang sedang bersengketa dengan perusahaan perkebunan di bawah manajemen PT RSA, kemudian menjalin kerja sama, bahkan meminta OTL Ketanbanci untuk membantu dalam penyelesaian sengketa. Akhirnya, para petani dari lima desa yang tergabung dalam OTL Cipari melakukan okupasi tanah milik PT RSA.

Pada suatu hari, para petani dari lima desa (Mekarsari, Sidasari, Caruy, Kutasari dan Karangreja) bergabung melakukan gerakan pematokan tanah. Pematokan batas tanah ini dilakukan sebagai tanda bahwa tanah yang ada dalam patok adalah tanah milik masyarakat. Gerakan okupasi tanah yang dilakukan OTL Cipari ini dipimpin oleh SeTAM.

Tepat di pagi hari ratusan petani datang ke lokasi tanah yang dikuasai PT. RSA. Mereka sudah bersiaga untuk melakukan pengukuran dan pematokan tanah. Dengan berbagai macam peralatan, seperti meteran, patok bambu dan kayu, cangkul, palu, dan peralatan lain. Di tengah-tengah kesibukan bekerja membuat patok batas tanah, tiba-tiba datang petugas keamanan perkebunan dibantu oleh aparat keamanan negara. Petugas keamanan perkebunan dengan dibantu aparat keamanan negara berupaya menghentikan pengukuran yang dilakukan oleh petani. Semula, para petani tidak menghiraukan akan hal itu. Namun, aparat negara terus melakukan tekanan dan ancaman. Hal itu menimbulkan 'pertengkaran' antara warga dengan aparat negara. Peristiwa pencegahan pengukuran yang dilakukan oleh aparat negara dituturkan oleh WS, selaku sekretaris SeTAM, sebagai berikut:

"Pada saat kami melakukan pengukuran tanah, yang sekarang menjadi objek *landreform*, kami didatangi aparat keamanan, yaitu TNI dan Polri. Saya selaku koordinator kemudian diminta menghadap komandan ... di kanan kiri saya adalah aparat TNI dan saya hanya diberi jalan selebar badan saya untuk keluar dari kebun. Waktu itu saya ditanya oleh komandan, kalau saya mau minta tanah saya, akan diberi tanah seluas dua kali satu meter persegi ... wah dalam pikiran saya *nyandak* (mengerti maksudnya, pen.) tanah dua meter persegi artinya kuburan. Waktu itu saya menjawab dengan tegas ... ya kalau memang itu yang harus saya terima, saya ikhlas. Kami melakukan ini semua demi kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Oleh karena itu saya siap menerima risiko apapun demi masyarakat kecil. Saya sendiri heran ... mengapa saya berani mengatakan seperti itu dan saya pun tenang, tidak gemetar menghadapi mereka. Saya memang sudah niat dari awal untuk memperjuangkan tanah. Barangkali keberanian saya itu muncul karena tidak ada pilihan lain kecuali berjuang untuk kepentingan rakyat, dan juga motivasi yang selalu diberikan oleh para aktivis baik dari Yogyakarta maupun Jakarta." (Wawancara pada Rabu, 6 Maret 2013).

Meskipun mendapat tekanan dari pihak keamanan, masyarakat tetap melanjutkan pengukuran tanah sampai selesai. Ini semua memberikan arti bahwa kekuasaan negara di masa transisi tidak sekuat dibandingkan masa sebelumnya sehingga petani berhasil melaku-

kan pematokan tanah. Jumlah massa gerakan kali ini sangat banyak, semangat mereka untuk mendapatkan tanah cukup besar pula. Ini juga dapat dipahami sebagai kemampuan para petani dalam mendefinisikan struktur kesempatan politik di tempat mereka melakukan gerakan.

Karl Dietter Opp (2009: 170) menyebut bahwa struktur kesempatan politik tidak hanya keadaan objektif yang ada, yakni struktur politik yang melingkupi gerakan, tetapi juga dapat dilihat sebagai upaya agen gerakan untuk mendefinisikan struktur politik secara subjektif. Definisi subjektif adalah kemampuan agen untuk melihat peluang keuntungan dan kerugian dalam melakukan gerakan meski di bawah tekanan kekuasaan. Gerakan petani Cipari yang secara bergelombang dalam upaya mematok tanah merupakan wujud dari definisi subjektif agen gerakan. Definisi subjektif itu kian memperlebar keuntungan petani ketika berjaln dengan lembaga di luar gerakan dalam memobilisasi gerakan. SeTAM dalam konteks ini berperan besar dalam memobilisasi sumber daya yang ada dalam masyarakat. Isu *landreform* atau redistribusi tanah merupakan strategi aksi gerakan yang mendapat dukungan dari masyarakat luas.

Pengukuran tanah dilakukan agar OTL memiliki data akurat sebagai bahan untuk mengajukan permohonan. Setelah pengukuran selesai, para petani diminta untuk menggarap tanah tersebut agar ada kesan tanah yang dimohon memang benar-benar digarap oleh masyarakat. Ini dilakukan untuk memberikan kesan bahwa tanah itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Tanah yang digarap petani adalah tanah yang tidak dimanfaatkan oleh perkebunan.

Aksi kolektif okupasi tanah yang dilakukan oleh OTL Cipari dan masyarakat cukup strategis. Mereka juga memiliki pemahaman yang cukup baik terkait dengan persoalan tanah. Dalam UUPA 1960 dinyatakan bahwa 'tanah negara' yang belum ada kepemilikan bisa dimohon dan dimanfaatkan oleh warga sekitar. Permohonan atas tanah seperti ini ditempatkan sebagai prioritas utama yang akan diberikan kepada para penggarap. Bukti akan hal ini kiranya dapat disimak dari penjelasan yang disampaikan oleh tokoh aktivis gerakan petani bernama WSR sebagai berikut:

“Setelah tanah itu kami ukur, masyarakat sekitar kami minta untuk menggarap tanah yang akan dimohon. Ini dimaksudkan agar pada saat pemerintah pusat dalam hal ini adalah BPN meninjau lokasi, mereka mengetahui bahwa kondisi tanah yang dimohon masyarakat memang benar-benar dimanfaatkan. Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menolak permohonan masyarakat atas tanah yang dimaksud.” (Wawancara pada Kamis, 7 Maret 2013).

Okupasi tanah yang terjadi di Cipari bukan kasus khusus. Di beberapa tempat di Indonesia hal serupa juga terjadi. Berbagai sumber tertulis menyatakan aksi kolektif okupasi tanah yang dilakukan oleh masyarakat di sejumlah daerah pasca-Orba dikarenakan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber agraria. Tindakan okupasi tanah yang terjadi di Era Reformasi adalah akibat kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah Orba. Namun demikian, melihat keteguhan gerakan petani Cipari dalam melakukan gerakan, aksi yang dilakukan petani di Cipari kiranya dapat diapresiasi dan memiliki nilai tersendiri. Hal itu dikarenakan gerakan petani Cipari mengalami dialektika yang begitu kompleks. Kompleksitas gerakan petani Cipari dapat dilihat dari tarik-ulur dan kemampuan para agen gerakan dalam membaca struktur kesempatan politik yang melingkupi gerakan mereka.

Hartono (2004: 100) menyebut bahwa alasan pembelar sekaligus pemicu gerakan reklamasi tanah adalah alasan moral, ketidakadilan, struktur yang menindas, hubungan sejarah, serta kewajiban negara dalam memenuhi hak dasar warganya. Beberapa alasan itu sering dijumpai dalam gerakan petani di Indonesia dalam memperjuangkan hak atas tanah. Gerakan petani Cipari pun dalam arus yang sama. Pada umumnya protes petani hanyalah respons atas ketidakadilan yang mengecewakan mereka. Bentuk yang muncul ditentukan kepada siapa kekecewaan itu ditujukan dan sampai pada tingkatan seperti apa kekecewaan itu dirasakan oleh petani (Triyono, 1994: 46).

Dalam arus demikianlah, gerakan petani Cipari melakukan berbagai bentuk aksi gerakan. Bentuk protes dan rasa kekecewaan di kalangan petani Cipari diwujudkan dalam pendudukan tanah HGU

perkebunan. Alasan petani melakukan okupasi tanah, *pertama* lahan HGU perkebunan tidak dimanfaatkan untuk tanaman perkebunan. *Kedua*, lahan HGU tersebut selama bertahun-tahun menjadi objek sengketa (masyarakat versus perkebunan). *Ketiga*, negara tidak pernah menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Akibatnya, masyarakat menyelesaikan dengan caranya sendiri, yaitu pendudukan tanah.

Gerakan petani di Cipari dalam proses tuntutan lahan tidak semata disebabkan di Era Reformasi kesempatan politik terbuka lebar. Ada faktor lain yang membuat petani melakukan gerakan secara massif. Faktor tersebut adalah berakhirnya masa HGU PT RSA. Berdasarkan data dari Kantor Bagian Pertanahan Kabupaten Cilacap, tercatat bahwa PT. RSA yang berkedudukan di Semarang memiliki HGU atas tanah seluas 1.341 hektar yang berasal dari hak *erfpacht*, terletak di Desa Caruy, Sidasari, Kutasari, Mekarsari dan Karangreja, Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. HGU tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK3/HGU/DA/74 tertanggal 29 Februari 1975, dan berakhir pada 31 Desember 1999. Berakhirnya masa HGU ini dimanfaatkan oleh petani untuk melakukan tuntutan, bahkan melakukan okupasi tanah. Sebagaimana disebutkan di atas, okupasi dan penggarapan tanah itu dimaksudkan agar tanah yang menjadi sengketa dengan pihak perkebunan benar-benar telah digarap oleh masyarakat. Di benak petani, pemerintah tidak memberikan perpanjangan HGU atas tanah tersebut, sehingga tanah itu bisa didistribusikan kepada masyarakat di sekitar perkebunan, utamanya masyarakat di lima desa.

Di saat petani sedang giat melakukan perjuangan, pada saat itu pula perkebunan mengajukan perpanjangan HGU. Ini adalah momen yang tepat bagi gerakan petani. Oleh karena itu, petani mengajukan gugatan ke negara (BPN) agar perpanjangan HGU yang diajukan oleh perkebunan ditolak. Pascapendudukan dan penggarapan tanah HGU perkebunan, petani melalui organisasi petani mengajukan permohonan ke Pemprov Jawa Tengah dengan tembusan ke Kantor Wilayah BPN Semarang, Pemkab Cilacap, dan Kantor BPN Cilacap.

Sebagai catatan, sepanjang masa perjuangan petani untuk mendapatkan kembali tanah yang diyakini sebagai milik keluarga mereka, pemerintah lebih sering memihak kepada PT. RSA sebagai pemilik HGU. Intimidasi terhadap petani dan pegiat reforma agraria justru lebih sering dilakukan oleh aparat pemerintah, dibanding dengan pekerja PT. RSA. Intimidasi itu dilakukan aparat keamanan maupun aparat pemerintahan.

Kendati demikian, pada 2004 Pemprow Jateng dan Pemkab Cilacap membentuk panitia yang dinamakan Panitia B. Panitia ini dibentuk untuk menangani dan menyelesaikan masalah sengketa tanah antara masyarakat dengan perkebunan. Menurut keterangan dari sejumlah informan, panitia B ini pernah melakukan kunjungan bersama BPN Pusat ke lokasi (lahan) yang menjadi sengketa kedua belah pihak. Pada saat lahan itu dikunjungi oleh panitia B, kondisi lahan memang sudah berubah. Sebagian besar tanah itu sudah digarap oleh petani setempat, sebagian lain sudah didirikan rumah-rumah untuk tempat tinggal. Artinya, tanah 'sengketa' ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat.

Strategi yang dirancang oleh SeTAM agar masyarakat menggarap tanah yang masih dalam status sengketa mendapat angin segar dari pemerintah. Lahan dalam status sengketa dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat dijadikan dasar pemerintah untuk dikeluarkan dari HGU. Artinya, tanah itu tidak memperoleh perpanjangan sebagai tanah HGU bagi perusahaan perkebunan. Realitas menunjukkan bahwa tanah sudah berubah fungsi untuk pertanian tanaman pangan, tegalan, dan pemukiman. Terlebih lagi status tanah masih dalam sengketa. Berdasarkan itu panitia B merekomendasikan agar tanah seluas ±355,16 hektar dilepas dari HGU.

Keputusan panitia B kiranya mudah dipahami mengingat Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang menjadi komitmen pemerintah, lebih memprioritaskan pada penyelesaian konflik pertanahan. Penyelesaian konflik pertanahan di Jawa diprioritaskan di Jawa bagian selatan, termasuk Cilacap dan daerah sekitarnya. Sikap pemerintah untuk tidak memperpanjang HGU memberi kesan bahwa negara berniat baik dalam menyelesaikan sengketa tanah antara

masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Tidak hanya itu, sebagian tanah HGU yang tidak mendapatkan perpanjangan dan dijadikan obyek redistribusi bagi petani kecil dan buruh tani tidak bertanah memberi kesan negara berniat baik melaksanakan *landreform* redistributif. *Landreform* semacam ini dikenal dengan istilah *land reform by grace* (Wiradi, 2000: 202).

5.2. Bergerak Melalui Jaringan

Sumber daya merupakan hal penting dalam gerakan sosial. Oleh karena itu menjadi penting untuk melihat cara mobilisasi sumber daya dalam gerakan sosial penting untuk dilihat dalam membaca gerakan sosial (McCarthy and Wolfson, 1996: 1070). Dipahami bahwa tipe dan level sumber daya yang tersedia untuk dikelola dan digunakan oleh gerakan sosial merupakan faktor penting dalam menunjang kemunculan, perkembangan, bentuk dan pengaruh gerakan sosial (Jenkins 1983; McAdam, et.al., 1988).

Dalam berbagai teori tentang gerakan sosial, pengertian mobilisasi sumber daya berakar pada pengertian tentang cara gerakan sosial dapat mendayagunakan sumber daya untuk melakukan perubahan (Edward dan McCarthy, 2004: 218). Perubahan yang dimaksud adalah tercapainya target gerakan sosial. Upaya mencapai target dalam gerakan sosial dibangun melalui organisasi. Craig Jenkins (Frank, 2012: 45-46) menyebut bahwa organisasi merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan gerakan memperoleh tujuan jangka pendek atau panjang. Bentuk organisasi formal terstruktur, menurut Jenkins, akan lebih efektif dalam memobilisasi sumber daya daripada desentralisasi, struktur gerakan informal.

Apa yang terjadi di Cipari ketika memasuki Era Reformasi kiranya masuk dalam kerangka pengertian mobilisasi sumber daya dalam gerakan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, petani Cipari menyadari bahwa gerakan mereka di masa Orba belum mencapai tujuan yang diharapkan. Ketidaktercapaian target memperjuangkan tanah di masa lalu menumbuhkan kesadaran di kalangan petani untuk memperkuat organisasi. Bahkan pengalaman itu menumbuhkan

semangat bahwa jika perlu, mereka akan membuat organisasi baru yang lebih besar dan mapan.

Seperti telah disebutkan pada bab terdahulu, organisasi petani lokal (OTL) yang pertama kali muncul di Cipari adalah kelompok tani yang bernama Ketanbanci (Kelompok Tani Korban Cisuru). Setelah itu, baru kemudian diikuti organisasi lain. Beberapa OTL itu berjuang dalam satu tujuan menuntut hak atas tanah yang menurut keyakinan mereka tanah tersebut adalah tanah para leluhur yang dirampas oleh perkebunan Cipari. Perjuangan Petani Cipari dalam menuntut tanah mereka memasuki babak baru pascarezim Orba.

Pascarezim Orba, tepatnya pada 1999, anggota organisasi Ketanbanci semakin banyak. Jika sebelumnya anggotanya hanya sekitar 10-15 orang, setelah memasuki Era Reformasi anggota organisasi ini mencapai ratusan orang. Pertumbuhan organisasi itu juga semakin membaik dan semakin mendapat dukungan dari masyarakat luas. Dukungan itu tidak hanya dari masyarakat sekitar Cipari, tetapi juga dari beberapa elemen masyarakat secara luas. Organisasi ini juga mendapat dukungan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Bukan hanya dukungan moral yang diberikan oleh LBH. Mereka juga memfasilitasi pembentukan kelompok kerja. LBH selalu memberikan pendampingan kepada masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh salah seorang informan bernama WS sebagai berikut:

"Saya tahu *kalo* LBH memang banyak membantu petani. LBH ini banyak memberikan pendidikan kepada petani. Juga memberikan pendampingan kepada petani. Saya salah satu wakil dari petani Mekarsari yang sering diikutkan dalam pendidikan maupun pelatihan. Saya pernah dikirim ke Yogya untuk mengikuti pelatihan soal hukum dan agraria." (Wawancara pada 6 Maret 2013).

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan LBH tidak semata pendidikan dalam menggarap lahan atau cara bertani. Pendidikan yang diadakan LBH lebih menekankan pada pendidikan kritis para anggota organisasi petani dan juga masyarakat. Pendidikan kritis yang dimaksud adalah menumbuhkan kesadaran akan hak-hak sosial politik mereka sebagai warga negara. Hasil dari pendidikan itulah yang dipakai petani Cipari dalam membangun organisasi tani.

Apa yang dilakukan LBH dalam konteks Cipari tidak bisa dilepaskan dari perubahan strategi organisasi petani di Indonesia pasca-Orba. Pada pasca-Orba, demikian Tri Agung Sujiwo (2010: 74) menulis, gerakan tani di Indonesia mulai mengubah strategi dan mulai mencoba masuk, mempengaruhi, dan bahkan merebut ruang-ruang politik formal, terutama di tingkat lokal. Situasi elit dan politik pas-cakejatuhan rezim Orba memberi peluang pada upaya-upaya gerakan untuk masuk ke dalam arena politik formal. Kontrol negara yang melemah, penerapan kebijakan otonomi daerah dan posisi politik organisasi tani di beberapa wilayah Indonesia kian menguat juga memberi alasan gerakan untuk mengambil inisiatif merebut ruang-ruang politik tersebut. Mulai terbentuk sejumlah OTL di Cipari menunjukkan bahwa organisasi digunakan sebagai alat perjuangan petani dalam menuntut tanah leluhur mereka. Keterlibatan LBH Yogyakarta dalam gerakan petani di Cipari juga menunjukkan bahwa gerakan petani Cipari sudah menggunakan pola jaringan gerakan.

Dalam gerakan sosial, organisasi memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan gerakan sosial. Organisasi, menurut Porta dan Diani (2006: 136), merupakan sumber yang sangat kuat untuk menentukan identitas gerakan sosial. Dengan identitas yang dimiliki oleh sebuah organisasi maka para agen gerakan sosial akan relatif lebih mudah dalam menentukan siapa lawan dan siapa kawan ketika membangun gerakan. Kejelasan dalam menentukan siapa kawan dan siapa lawan juga akan mempercepat pembangunan jaringan (*network*) organisasi dalam gerakan sosial. Jaringan dalam gerakan sosial menurut Luther Gerlack (dalam Porta dan Diani, 2006: 157) perlu dibangun karena organisasi dalam gerakan sosial mempunyai karakter; i). terbatas (*segmented*) dengan beragam kelompok atau sel yang kadang bertambah dan berkurang, ii). beragam pimpinan (*polycephalus*) dengan ketua-ketua kelompok atau sel yang mempunyai otoritas dan pengikut yang berbeda-beda, dan iii). berkelindan (*reticular*) dengan mata rantai berganda di antara sel-sel otonom dan kadang terikat dalam jaringan yang tidak jelas. Dengan keberadaan jaringan, setidaknya laju gerakan sosial semakin mulus dalam proses memperjuangkan tuntutan.

Proses pembentukan jaringan organisasi dalam gerakan sosial di Cipari salah satunya berbentuk konfigurasi aliansi di antara OTL-OTL yang ada di Cipari. Dalam proses tersebut, terbentuk aliansi dari enam OTL yang ada di Cipari, yakni OTL Ketanbanci, Singatangi, Tapungan Bangkit, Mangkubumi, Margorukun, dan Tri Manunggal Sari. Dalam praktik gerakan, OTL Ketanbanci berjuang menghadapi PT. Djawatie. Sedangkan lima OTL lainnya memperjuangkan tanah yang dikuasai PT. RSA. Dalam tulisan ini, yang dimaksud OTL Cipari adalah gabungan kelima OTL yang sedang bersengketa dengan PT. RSA. Untuk selanjutnya dalam tulisan ini kelima OTL dimaksud disebut OTL Cipari.

Seperti halnya gerakan sosial di tempat lain, di Cipari masing-masing OTL berupaya memantapkan organisasi. Konsolidasi internal sering dilakukan untuk membentuk kesepahaman bersama. Masing-masing organisasi juga mulai mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi termasuk menyusun rencana strategi gerakan. Konsolidasi yang dilakukan biasanya melalui pertemuan langsung antaranggota. Melalui satu pertemuan ke pertemuan lain itulah organisasi petani di Cipari semakin solid. Pertemuan-pertemuan ini, mengikuti Florence Passy (2003: 24) merupakan upaya organisasi gerakan untuk menjalankan fungsi sosialisasi (*socialization function*). Fungsi ini diperlukan guna meningkatkan inisiatif anggota organisasi sekaligus sebagai media penyebaran isu dan gagasan gerakan. Dengan demikian, organisasi dan jaringan gerakan akan terus solid. Soliditas pada masing-masing OTL semakin diperkuat dengan pembangunan koalisi yang terus-menerus.

Di samping membangun koalisi, OTL di Cipari juga membangun jaringan dengan kelompok petani lain. Pembangunan jaringan antara OTL Cipari dan kelompok tani Ketanbanci yang sedang menuntut tanah terhadap PT. Djawatie seperti yang sudah diutarakan di atas hanyalah satu contoh bagaimana jaringan OTL di Cipari dibentuk. Selain itu, OTL Cipari juga menjalin kerja sama dengan kelompok tani Cinta Tani yang sedang berjuang menuntut hak atas tanah dengan PTPN IX. Semua kelompok tani tersebut sedang dalam rangka memperjuangkan tanah yang dikuasai perkebunan baik swas-

ta maupun negara. Pada titik ini, petani di Cipari melakukan strategi yang disebut Skocpol (Ariendi dan Kinseng, 2011: 17) dengan istilah pembangunan solidaritas dan pembangunan tindakan-tindakan kolektif. Ada beberapa kerja yang dilakukan OTL Cipari dalam membangun jaringan.

Pertama-tama, kerja utama aliansi adalah melakukan pendataan atas tanah yang mereka tuntut. Pendataan ini dimaksudkan untuk memperkuat tuntutan sekaligus memberikan informasi kepada pemerintah setempat. Hasil dari proses pendataan kemudian dibahas dalam pertemuan antar-OTL. Dalam perkembangan, OTL di Cipari sering melakukan rapat bersama untuk membahas isu-isu penting terkait dengan rencana aksi. Tidak kalah penting dari itu adalah, pertemuan itu digunakan untuk menyamakan persepsi sekaligus memantapkan organisasi. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut akhirnya OTL di Cipari sepakat untuk menyusun organisasi yang lebih besar sebagai alat perjuangan guna menyelesaikan masalah-masalah seputar agraria.

Kesepakatan itu, menghasilkan suara bulat bahwa OTL Cipari (Singatangi, Margorukun, Tapungan Bangkit, Tri Manunggalsari dan Mangkubumi), Ketanbanci, dan OTL yang ada di sekitarnya membentuk konsorsium bernama Serikat Tani Merdeka (SeTAM) Cilacap. OTL Ketanbanci salah satu organisasi petani di mana para pegiat ikut memprakarsai pembentukan SeTAM pada Agustus 1999 di LBH Yogyakarta.

SeTAM didirikan sebagai organisasi payung semua OTL yang ada di Cipari dan desa-desa sekitarnya. Dengan terbentuknya SeTAM, maka kepengurusan organisasi ini segera dibentuk. Kepengurusan organisasi ini terdiri dari para aktivis yang tergabung dalam organisasi petani lokal. Sebagai contoh, misalnya, SG sebagai motor gerakan petani menjadi penasehat SeTAM. SW seorang aktivis petani diposisikan sebagai ketua organisasi. Sementara WS, aktivis petani dari Desa Mekarsari, ditempatkan sebagai sekretaris organisasi. Keterlibatan para aktivis lokal itu sejalan dengan temuan Sujiwo (2010) ketika mengamati perubahan strategi gerakan tani di Indonesia. Menurutnya, di Indonesia, kemunculan gerakan tani tidak bisa

dilepaskan dari menguatnya keberpihakan kelas-kelas menengah dan keterlibatan kelas sosial lain, khususnya mahasiswa dan para aktivis.

Pendirian organisasi SeTAM ini agar gerakan petani lebih terintegrasi, terarah, dan memiliki target pasti. Sebelum SeTAM terbentuk, gerakan petani bersifat parsial dan sporadis sehingga sulit mencapai sasaran target. Dalam perkembangannya, aktivitas SeTAM tidak hanya membantu petani Cipari dan sekitarnya saja, melainkan semua petani di Cilacap dan Jawa Tengah bagian Selatan. SeTAM mulai melangkah untuk ikut menyelesaikan petani yang sedang menghadapi masalah seputar agraria. Kemudian SeTAM melakukan pengorganisasian dan pendampingan terhadap petani yang bersengketa dengan PT. RSA.

Keberadaan SeTAM di Cipari dalam membangun gerakan semakin diperkuat dengan kehadiran sejumlah LSM dan membantu petani Cipari. Mereka turut terlibat dan membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani, yaitu untuk mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa antara petani dengan pihak perkebunan. Oleh sebab itu, tanpa disengaja terbangun hubungan maupun jaringan petani dengan organisasi non-pemerintah, seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), RACA Institute, Rumah Aspirasi Budiman (RAB), LPPSLH Purwokerto, dan lain-lain.

Pengertian jaringan dalam teori mobilisasi sumber daya (TMS), merupakan hal penting dalam gerakan sosial. Jaringan dapat bersifat formal maupun informal sebagai koalisi maupun sebagai identitas kolektif gerakan. Menurut Dieter Rucht (McAdam, 1977: 6) gerakan sosial merupakan sistem aksi yang terdiri dari mobilisasi jaringan individu, kelompok, dan organisasi berdasarkan identitas kolektif yang berupaya untuk mencapai perubahan sosial dengan cara kolektif.

Aktor kolektif memiliki jaringan dengan pihak lain dalam bentuk aliansi. Aliansi itu merupakan upaya memperkuat jaringan identitas. Kampanye dan mobilisasi sumber daya sangat diperlukan melalui pertukaran antarkelompok dan organisasi yang berbeda. Jaringan merupakan sumber utama identitas dan loyalitas bagi anggota atau peserta gerakan. Para aktor dapat berbagi sumber daya dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama.

Jaringan dan kerja sama serta aksi kolektif berkaitan erat dengan dimensi kepercayaan dan solidaritas. Namun, kerja sama ini lebih menekankan pada bagaimana orang (aktor) bekerja sama dengan aktor lain dalam komunitas mereka dalam suatu program kegiatan. Hal itu juga berkaitan dengan cara menanggapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh komunitas mereka. Aktor dalam konteks ini bisa dalam arti kelompok atau lembaga.

Jenis lain dari jaringan adalah asosiasi. Di dalam asosiasi, hubungan antaranggota dalam asosiasi bersifat horizontal. Jaringan seperti ini sering digambarkan sebagai struktur, peran, dan aturan yang mengatur bagaimana anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jaringan ini juga memiliki potensi untuk memelihara *self-help*, yaitu saling membantu, solidaritas, dan usaha untuk bekerja sama dalam suatu komunitas (Dudwick, at. all, 2006: 12).

Dalam konteks penelitian ini, jaringan informal masyarakat (petani) Cipari adalah jaringan sosial antarpetani, antar-OTL, OTL dengan organisasi non-pemerintah (ornop), dan jaringan antarlembaga yang terlibat baik pada saat menuntut hak atas tanah maupun sampai pada pelaksanaan redistribusi tanah. Jaringan sosial antarpetani Cipari merupakan hubungan yang terjadi atas dasar hubungan ketetanggaaan maupun kekerabatan. Hubungan ketetanggaaan terjadi di antara petani dalam satu dusun maupun desa. Sedangkan hubungan antara petani satu desa dengan desa lain didasarkan pada hubungan kekerabatan, dan hubungan karena senasib. Hubungan sosial yang terakhir ini terjadi ketika mereka saling membutuhkan tanah sebagai alat produksi (modal) untuk mencukupi kebutuhan pangan. Hubungan sosial ini semakin kuat menjelang kekuasaan Orba tumbang. Terutama pada saat terjadi krisis ekonomi, di mana pada saat itu terjadi ledakan jumlah rumah tangga miskin.

Hubungan sosial dan kerja sama semacam ini sesungguhnya telah terbangun puluhan tahun silam. Ini bisa disaksikan pada saat mereka melakukan *trukah* atau membuka lahan perkebunan saat masih berupa semak belukar. Dalam konteks Cipari, seperti sudah dibahas pada bab terdahulu, kerjasama para petani dalam melakukan *trukah* dikarenakan ada harapan bagi diri mereka sendiri maupun bagi ke-

turunannya. Hal ini memperlihatkan jaringan sosial bekerja dalam hubungan antarpetani melalui nilai harapan dan kewajiban.

Bentuk lain hubungan sosial antarpetani (antartetangga) adalah pada saat mereka berjuang untuk menguasai tanah yang dikuasai perkebunan. Hubungan sosial pada saat mereka berjuang untuk mendapatkan tanah tidak lagi bersifat individual, melainkan organisasional. OTL yang tumbuh di setiap desa saling berinteraksi, berbagi informasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kerjasama antarpetani di sekitar Cipari mulai terbangun dengan baik. Kerja sama ini dimaksudkan untuk membangun kekuatan agar perjuangan mereka bisa berhasil serta dalam cakupan lebih luas. Akhirnya, terbentuklah kerjasama antar-OTL di Cipari dan sekitarnya.

Mengikuti gerakan yang dilakukan petani Cipari terlihat bahwa organisasi yang dibangun oleh gerakan petani Cipari adalah paduan dua tipe pembangunan organisasi perlawanan. Setidaknya, ada dua tipe organisasi petani dalam melakukan perlawanan, yaitu: 1) organisasi yang muncul dari dalam kelompok petani sendiri untuk mengatur dirinya sendiri. 2) organisasi yang muncul dari luar (Mustain, 2007). Terbentuknya OTL-OTL di Cipari menunjukkan bahwa pembentukan organisasi di Cipari merupakan prakarsa yang muncul dari petani sendiri. Kehadiran beberapa LSM di Cipari dan kemudian mereka membentuk jaringan hingga membuat organisasi petani yang lebih besar bernama SeTAM Cilacap, menunjukkan pembangunan organisasi gerakan di Cipari tidak bisa dilepaskan dari peran agen-agen di luar petani. Hal itu sekaligus menunjukkan ada kaitan erat antara gerakan internal dan eksternal. Pada titik ini, pandangan bahwa organisasi gerakan petani hanya terbentuk dari dalam saja atau sebaliknya, tidaklah memadai untuk melihat gerakan petani Cipari. Di Cipari, organisasi petani berkelindan (terjalin menjadi satu) dalam jaringan setelah mereka membangun solidaritas gerakan sendiri.

Organisasi petani yang lebih besar di Cilacap sekaligus mengindikasikan bahwa terjadi perubahan pola gerakan di Cipari. Jika semasa Orba, gerakan petani Cipari berada di jalur informal, semasa Era Reformasi gerakan petani Cipari bergerak di jalan formal de-

ngan cara membangun organisasi terstruktur. Lebih dari itu, petani di Cipari juga membangun jaringan antarorganisasi guna mendapat dukungan dalam gerakan mereka.

Pembangunan jaringan itu setidaknya menunjukkan ada strategi dalam gerakan mereka. Shohibuddin (2007) menjelaskan bahwa ada empat agenda strategis dalam organisasi gerakan petani yaitu, (i) tahap pembentukan landasan, (ii) tahap perjuangan untuk memperoleh pengakuan, (iii) tahap konsolidasi lebih lanjut, (iv) tahap diseminasi keluar. Dalam konteks organisasi petani Cipari, pembentukan landasan organisasi telah berlangsung jauh-jauh hari, bahkan ketika struktur politik yang ada bersifat represif dan koersif. Pada masa itu, gerakan petani Cipari sudah membangun landasan gerakan perlawanan. Pergeseran pilihan organisasi yang lebih formal dan menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi lain menunjukkan gerakan petani di Cipari telah menjalankan agenda memperoleh pengakuan, konsolidasi sekaligus diseminasi gagasan gerakan.

Pilihan gerakan petani di Cipari semasa Era Reformasi dengan menggunakan organisasi juga menunjukkan ada pergeseran strategi gerakan, yakni dari strategi 'perlawanan sehari-hari' ala James Scott, menjadi strategi perlawanan kolektif terorganisasi (Scott, 1976 dan 1985). Ini artinya, petani Cipari sudah meletakkan gerakan mereka pada pandangan secara rasional. Dalam perspektif pilihan rasional petani dilihat sebagai aktor yang rasional dan mampu membuat keputusan yang sudah tidak lagi tinggal di desa-desa yang terisolasi, melainkan desa-desa yang relatif sudah terbuka (Dianto Bachriadi, 2012: 5). Dengan demikian, petani di Cipari mampu memilah berdasarkan kalkulasi rasional apakah harus bergabung atau tidak dengan sebuah gerakan sosial.

Pandangan bahwa petani Cipari sudah rasional itu mengikuti pandangan Mancur Olson (1966) tentang logika dan dilema dari aksi kolektif. Pandangan Olson memberi perhatian pada urgensi sejumlah insentif dan distribusi keuntungan secara pribadi yang dihasilkan ketika menggerakkan atau terlibat aksi kolektif. Jika insentif dianggap tidak sepadan dengan risiko yang mungkin dihadapi,

petani enggan terlibat dalam aksi-aksi kolektif bersifat menantang kekuasaan.

Melihat kemampuan petani Cipari dalam menyusun gerakan perlawanan memperlihatkan gerakan petani Cipari berhasil mengelola sumber daya mereka. Gerakan petani Cipari berhasil mengelola radikalisme petani untuk menghindari risiko gerakan mereka melemah. Kehadiran organisasi SeTAM dan LSM lain yang mendukung gerakan mereka juga menunjukkan gerakan petani Cipari berhasil mengelola jaringan guna memperjuangkan target gerakan mereka. Pada titik ini, gerakan petani Cipari di Era Reformasi telah bertransformasi dalam pola dan strategi gerakan.

5.3. Landreform sebagai Dasar dan Strategi untuk Melakukan Gerakan

Menurut para ahli gerakan sosial, selain kesempatan politik dan mobilisasi sumber daya, pengkerangkaan isu sebagai dasar dan strategi gerakan dapat dipergunakan untuk memahami gerakan sosial. Benford dan Snow (2000: 612) misalnya, menyebut bahwa proses pengkerangkaan isu dapat disejajarkan dengan proses mobilisasi sumber daya dan kesempatan politik. Di sini proses *framing* dapat dijadikan sebagai pusat dinamika dalam memahami karakter dan subjek gerakan sosial.

Secara teoritis, pengertian proses framing meminjam pada sosiolog bernama Erving Goffman. Menurut Goffman manusia melakukan framing atas pengalaman diri guna mengatur dan memahami dunia di sekitarnya (Cristiansen, 2011: 147). Dengan melakukan pengkerangkaan, manusia akan dimudahkan untuk mengatur diri ketika menjalani kehidupan di dunia. Proses framing akan membantu seorang manusia dalam menafsirkan dunia berdasarkan posisinya dalam masyarakat dan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Setiap interaksi sosial yang terjadi dipahami berdasarkan kerangka acuan yang telah ditetapkan sebelumnya di mana manusia melandaskan persepsi dan definisi situasi ketika berinteraksi dengan manusia lain.

Dalam studi gerakan sosial, kerangka isu digunakan untuk mendorong manusia untuk bertindak secara kolektif. Biasanya, proses framing ini dipergunakan untuk memahami kegagalan maupun keberhasilan suatu gerakan. Tidak jauh berbeda dengan cara melihat kesempatan politik dan mobilisasi sumber daya, penggunaan proses framing sebagai alat analisis menjadi penting untuk melihat keberlanjutan suatu gerakan. Melalui proses pengkerangkaan isu, aksi kolektif bisa muncul.

Dalam konteks gerakan petani Cipari, proses pengkerangkaan isu gerakan berjalan sangat panjang dan kompleks. Setelah organisasi di setiap desa terbentuk, bahkan koalisi dan jaringan juga terbentuk, langkah selanjutnya, petani di Cipari membingkai isu untuk strategi gerakan. Membingkai isu juga dimaksudkan supaya organisasi mendapat dukungan dari masyarakat luas. Para pengurus organisasi sering melakukan pertemuan dan diskusi untuk menetapkan isu. Snow dan Banford (Jasper, 2007: 91) menyebut bahwa keberhasilan gerakan sosial tergantung pada sejauh mana mereka memenangkan pertempuran atas makna.

Upaya memenangkan pertempuran atas makna di Cipari melalui pembuatan framing masalah-masalah sosial dan ketidakadilan. Proses framing ini dilakukan dalam upaya untuk meyakinkan kelompok sasaran yang beragam sehingga mereka terdorong untuk melakukan perubahan. Menurut Zald (Situmorang, 2007: 4), ada beberapa hal penting yang dapat memainkan peran dalam membentuk framing.

Pertama, yaitu kontradiksi budaya dan alur sejarah. Zald menyatakan bahwa kesempatan politik dan mobilisasi dapat tercipta melalui ketegangan budaya dan kontradiksi yang berlangsung lama. Hal itu dapat menjadi bahan framing. Bahan framing itu bisa berasal dari keluhan dan ketidakadilan. Bahan-bahan itu, bila dapat dikerangkaan dengan tepat dapat menyebabkan terjadinya aksi kolektif.

Kedua, proses framing sebagai aktivitas strategi. Yang dimaksud aktivitas strategis karena kontradiksi budaya memberikan kesempatan bagi kader-kader gerakan, seperti pemimpin, anggota, aktivis, dan simpatisan untuk memahami dan memaknai kenyataan yang mereka

hadapi. Dengan demikian, gerakan sosial yang mereka bangun akan lebih mudah mencapai tujuan.

Dalam gerakan petani Cipari, ketua organisasi petani lokal membuat framing tentang isu ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya agraria. Ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber agraria ini dikaitkan dengan sejarah penguasaan tanah pada masyarakat. Sejarah penguasaan tanah melalui *trukah* dijadikan isu masalah untuk melakukan gerakan. Oleh sebab itu, sebelum tindakan kolektif dilakukan, framing isu ketidakadilan disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat luas. Ini dimaksudkan untuk meyakinkan kelompok sasaran sehingga mereka terdorong untuk melakukan gerakan.

Selain isu ketidakadilan, isu *landreform* dijadikan isu penting dan dianggap strategis dalam konteks Cipari. Pada masa Orba petani tidak pernah menggunakan isu *landreform* sebagai strategi untuk melakukan gerakan. Hal itu dilakukan guna menghindari stigmatisasi yang diberikan oleh negara bahwa *landreform* identik dengan komunis (PKI). Kelompok tani pada saat itu tidak berani menyampaikan secara vulgar mengenai *landreform*. Mereka sangat berhati-hati akan hal itu karena petani pernah mengalami sejarah kelam pada 1965/1966. Pada era Reformasi, isu *landreform* dikaitkan dengan isu ketidakadilan.

Yang dimaksud isu ketidakadilan dalam pengkerangkaan isu gerakan petani Cipari adalah pencaplokan lahan (*land grabbing*) oleh perusahaan perkebunan. Sedangkan *landreform* yaitu redistribusi tanah bagi buruh tani dan petani tidak bertanah. *Framing* ketidakadilan dan *landreform* yang dibentuk oleh gerakan petani Cipari ini bersandar pada hukum maupun perundang-undangan. Berikut dasar yang digunakan untuk membingkai isu ketidakadilan dan *landreform* yang disusun oleh organisasi petani Cipari:¹⁰

“Berdasarkan perundang-undangan tentang agraria, ada beberapa peraturan yang bisa dijadikan acuan dalam menilai kasus sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat Cipari dengan PT. RSA yang berkedudukan di Cipari, Cilacap. Adapun peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, Undang-undang yang di-

¹⁰ Dokumen tuntutan yang dibuat oleh OTL Singatani desa Mekarsari.

jadikan dasar untuk membingkai isu antara lain Undang-Undang Dasar RI 1945, khususnya pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. *Kedua*, Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, pasal 16 ayat (1) huruf (f) tentang hak membuka tanah. *Ketiga*, Peraturan Pemerintah RI No. 40 tahun 1996 pasal 4 ayat (1) bahwa tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) adalah tanah negara (penjelasan seperti pada pasal 28 ayat [1] UUPA). Peraturan Pemerintah RI No. 40 tahun 1996 pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pemberian HGU yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan HGU tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah RI No. 40 tahun 1996 pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa pemegang HGU dilarang menyerahkan pengusahaan tanah HGU-nya kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal diperbolehkan menurut peraturan-peraturan yang berlaku. *Keempat*, Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa untuk membuktikan hak lama atau tanah yang berasal dari konversi bisa dilakukan dengan data berupa bukti tertulis, keterangan saksi, dan seterusnya.”

Menyimak dokumen di atas, terlihat bahwa organisasi gerakan sosial petani di Cipari mampu membaca situasi gerakan mereka dan sekaligus menyusun strategi bagi gerakan mereka. Dalam bahasa Gamson dan Meyer (1996: 285), petani Cipari melakukan kerangka isu gerakan mereka lantaran mereka meyakini bahwa gerakan sosial merupakan sarana penolakan atas keadaan yang tidak diinginkan dan bertekad untuk mengubahnya. Keadaan yang tidak diinginkan dalam konteks gerakan petani Cipari adalah ketidakadilan. Isu ketidakadilan menjadi isu strategis dalam konteks petani di Cipari dalam melakukan gerakan.

Melalui isu tersebut organisasi gerakan mendapat sambutan dan dukungan mayoritas masyarakat, termasuk jajaran penguasa lokal. Pemerintah desa akhirnya mendukung upaya yang dilakukan oleh petani beserta jaringannya. Kondisi ini, berbeda dengan masa Orba. Pada waktu itu aparat desa tidak memberikan dukungan. Semasa

Orba, perangkat desa malah kadang menjadi lawan bagi organisasi gerakan. Pada era Reformasi, mereka menjadi sekutu organisasi petani.

Keberadaan dukungan dari banyak kalangan membuktikan gerakan petani Cipari berhasil membuat kerangka diagnosis yang baik. Kerangka diagnosis mengacu pada proses identifikasi masalah. Para petani Cipari, melalui OTL-OTL yang dibangun mampu memetakan masalah ketidakadilan menjadi isu utama gerakan. Dalam bahasa Jennese (1996: 146) ketika kondisi sosial dapat dilihat sebagai masalah sosial bersama, disitulah gerakan sosial terjadi.

Perasaan ketidakadilan sudah barang tentu bukan dimiliki oleh para petani Cipari semata. Perasaan itu dimiliki semua orang. Dengan demikian, isu ketidakadilan menjadi mudah untuk diterima semua kalangan. Dalam bahasa Snow dan Benford (2000: 617) isu ketidakadilan menjadi kosakata utama dalam gerakan sosial petani Cipari sekaligus sebagai motif penting bagi gerakan sosial mereka. Lebih jauh Snow dan Benford menunjuk bahwa dalam gerakan sosial terdapat kosakata tertentu yang dapat digunakan sebagai motif gerakan sosial. Beberapa kosa kata itu setidaknya mengandung makna misalnya, kekejaman (*severity*), keterdesakan (*urgency*), kemujaraban (*efficacy*) dan kepantasan (*propriety*).

Makna kekejaman artinya kata yang digunakan mengacu pada perasaan ada bahaya dan ancaman yang harus dilawan. Sedangkan makna keterdesakan berarti kata yang digunakan mengacu pada keadaan bahwa adanya masalah yang harus segera diselesaikan. Kemudian makna kemujaraban artinya kata yang digunakan mengacu pada pemahaman harus ada seseorang untuk segera menyelesaikan masalah yang terjadi. Sementara pengertian kosakata kepantasan berarti memunculkan perasaan kepada setiap orang untuk wajib melakukan tindakan atas apa yang terjadi.

Mengacu pada beberapa makna dalam Snow dan Benford di atas, isu ketidakadilan yang didengungkan oleh gerakan petani Cipari mengandung hampir semua makna dalam kosakata gerakan sosial. Dengan demikian, gerakan petani Cipari berhasil memenangi pertaruhan atas makna melalui strategi diskursif yang mereka jalankan

dan juga mampu melihat hambatan serta ancaman kondisi sosial menjadi kesempatan untuk mengerangkakan isu. Mengenai hal itu, Gamson dan Meyer (1996: 287) mengatakan bahwa jika aktivis gerakan menafsirkan ruang politik lebih dilihat sebagai peluang ketimbang sebagai kekangan, mereka akan menstimulasi tindakan menjadi kesempatan, menjadikan kerangka kesempatan mereka terpenuhi dengan sendirinya (*self-fulfilling prophecy*). Dalam konteks gerakan petani Cipari ruang politik macam apapun selalu ditafsirkan sebagai kesempatan, sehingga petani tetap dan selalu melakukan gerakan.

BAB VI

DINAMIKA GERAKAN PETANI CIPARI

6.1. Struktur Kesempatan Politik

Secara teoritis, kemunculan gerakan sosial disebabkan oleh perubahan struktur politik, di mana perubahan struktur politik tersebut dilihat sebagai kesempatan (Situmorang, 2007: 2). Dalam sebuah negara di mana sistem politik tertutup, maka gerakan sosial akan sulit berkembang. Demikian sebaliknya, dalam situasi di mana sistem politik suatu negara mengalami keterbukaan, maka gerakan sosial akan berlangsung dan kemungkinan besar gerakan tersebut akan berhasil. Pembahasan ini mendasarkan pada perspektif teori gerakan sosial dari McAdam et.al (2004). Perspektif itu berpendapat bahwa keberhasilan maupun kegagalan sebuah gerakan sosial ditentukan oleh sejumlah faktor. Salah satu faktor itu adalah lingkungan politik, baik secara nasional maupun lokal.

Lingkungan politik gerakan petani Cipari memiliki dinamika dan perkembangan tersendiri. Gerakan petani Cipari pertama kali muncul pada masa pascakemerdekaan. Gerakan tersebut berlanjut pada masa pemerintahan Orde Lama, kemudian memasuki masa pemerintahan Orba, dan berakhir pada masa Reformasi. Fakta ini sebagaimana dinyatakan oleh Tilly (Porta dan Diani, 2006: 79) bahwa gerakan dan konflik tidak berkembang dalam isolasi tetapi cenderung lebih terkonsentrasi di periode politik dan sejarah tertentu. Dalam perjalanan panjang tersebut, setiap masa mempunyai perbedaan gerakan. Pada setiap masa yang dilalui, strategi, taktik, dan bentuk gerakan tidak selalu sama. Hal itu dapat dilihat dari cara petani

dalam memobilisasi massa dan cara pembingkaihan isu yang diusung untuk melakukan aksi kolektif. Semua itu tergantung pada situasi dan menyesuaikan kondisi sosial-politik yang berkembang pada saat itu.

Temuan dalam buku ini menunjukkan bahwa gerakan petani Cipari muncul dan berkembang bukan semata-mata karena keterbukaan kesempatan politik. Faktor sosial-kultural ternyata lebih berperan bagi kemunculan gerakan. Faktor sosial kultural ini misalnya, bertalian dengan perubahan pemaknaan atas tanah. Jika sebelumnya tanah dipandang sebagai aset ekonomi, dalam perkembangan kemudian, kepemilikan atas tanah juga mengandung aspek historis-kultural. Hal itu mendorong para petani mempertahankan tanah *trukah* para leluhurnya. Pembahasan lebih lanjut soal dimensi kultural ini akan dilakukan pada subbab proses *framing*.

Harus diakui, pada saat terjadi perubahan politik dari rezim otoriter Orba ke rezim kekuasaan yang lebih demokratis, gerakan petani mengalami perkembangan luar biasa. Di masa Orba, negara lebih mengutamakan stabilitas politik, maka setiap kali muncul suatu gerakan kolektif selalu direspons dengan cara-cara represif. Namun, petani Cipari tetap melakukan gerakan. Hanya saja bentuk gerakan lebih bersifat tertutup dan lebih lunak. Ini bisa dibedakan dengan gerakan yang dilakukan pada masa pascakekuasaan Orba. Di masa Reformasi, gerakan yang dilakukan petani lebih terbuka. Petani secara terang-terangan berani mengajukan tuntutan kepada negara terkait dengan tanah yang dikuasai oleh perkebunan. Bahkan, petani berani melakukan okupasi tanah perkebunan tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh aktivis SeTAM bernama WSR ketika diwawancarai. Berikut ini petikan wawancara dengan WSR:

“Petani melalui organisasi tani, dalam hal ini SeTAM, mengajukan tuntutan ke pemerintah kabupaten. Isi tuntutan yaitu, agar tanah HGU perkebunan yang ditelantarkan bisa didistribusikan ke masyarakat sekitar kebun. Selain mengajukan tuntutan, kami juga melakukan pendudukan tanah. Ini dilakukan agar pemerintah tahu bahwa petani benar-benar membutuhkan tanah.” (wawancara pada 11 April 2013).

Di saat Orba berkuasa, tidak ada satupun kebijakan, baik di tingkat lokal (desa) maupun di tingkat nasional (negara), berpihak kepada petani. Kebijakan pada saat itu lebih menguntungkan pemo-dal. Sebagai contoh, pemberian HGU kepada perusahaan perkebunan berdampak pada petani dalam memanfaatkan akses sumber daya agraria (tanah). Ketiadaan akses itu menjadikan petani melakukan gerakan untuk menguasai tanah milik perkebunan. Ketiadaan akses itu ditandai oleh ketiadaan dukungan dari elit penguasa dalam bentuk kebijakan. Hal itu juga menandakan petani tidak memiliki akses ke lembaga-lembaga berwenang yang mengatur soal keagrariaan sehingga petani tidak bisa menguasai tanah.

Keterbukaan kesempatan politik pasca-Orba merupakan angin segar bagi gerakan petani. Petani mendapat dukungan dari elit penguasa. Kemunculan Ketetapan MPR nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, kemudian diikuti dengan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), memberikan jalan bagi petani untuk memperoleh akses terhadap sumber agraria (tanah). Dua kebijakan itu menjadi landasan petani Cipari untuk semakin gencar melakukan tuntutan. Tuntutan agar tanah HGU perkebunan bisa digarap oleh masyarakat sekitar kebun. Bahkan, tuntutan petani tidak sebatas pada hak untuk menguasai tanah, melainkan memiliki tanah dengan kekuatan hukum berupa sertifikat.

Beberapa kebijakan yang menguntungkan petani di atas juga membuka jalan elit kekuasaan untuk mendukung petani. Dukungan yang didapat petani mulai dari pemerintah tingkat desa sampai dengan pemerintah kabupaten. Dukungan elit kekuasaan ini memberikan kemudahan bagi petani untuk mengajukan tuntutan ke negara. Bersama pemerintah desa, petani mengajukan tuntutan ke negara agar sebagian tanah HGU yang dikuasai oleh perkebunan didistribusikan kepada masyarakat sekitar kebun, terutama para penggarap.

Mengikuti pemikiran Tarrow (2011: 11), aksi kolektif merupakan sebuah aksi bersama yang dipergunakan oleh suatu pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut dia, pihak yang melakukan aksi seperti itu cenderung tidak memiliki akses cukup terhadap lembaga

yang berwenang. Aksi kolektif itu dilakukan demi klaim baru tentang sesuatu. Klaim yang berlawanan dengan pandangan umum. Dalam konteks Cipari, petani melakukan aksi karena mereka tidak memiliki akses terhadap institusi yang berwenang mengurus persoalan agraria (tanah). Gerakan menuntut kembali ‘tanah’ merupakan cara petani Cipari melawan pandangan umum tentang penguasaan tanah perkebunan. Mereka menciptakan klaim baru dan membuka akses terhadap institusi.

Jika disimak, perjalanan gerakan petani Cipari sejak kemunculannya hingga sampai pada keberhasilan dalam melakukan re-klaiming, sekilas tanpa menemui hambatan berarti. Namun sesungguhnya, petani melakukan perjuangan menuntut tanah menguras tenaga dan pikiran. Petani Cipari harus menghadapi tekanan yang dilakukan oleh perkebunan dan negara dalam waktu panjang. Bahkan, pada masa Orba para petani harus menghadapi risiko besar, yakni dihilangkan atau bahkan kehilangan nyawa. Perjuangan mereka mendapatkan hasil ketika memasuki masa Reformasi.

6.2. Struktur Mobilisasi

Selain struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi juga dapat menentukan kemunculan dan perkembangan suatu gerakan sosial. Kemampuan agen gerakan dalam memobilisasi sumber daya yang ada bisa menjadi faktor penyebab kemunculan gerakan sosial. Artinya, jika sumber daya yang ada, mencakup sumber daya material maupun nonmaterial bisa didayagunakan secara efektif, kemungkinan besar gerakan sosial akan memberikan dampak. Sebagaimana dinyatakan oleh Diani (1999: 7) bahwasannya aktor, organisasi, dan para penggiat gerakan memainkan peran penting dalam memobilisasi sumber daya kolektif di mana gerakan sosial itu berlangsung.

Di saat Orba dalam posisi kuat, tidak satu pun organisasi masyarakat sipil yang tampil untuk membela kepentingan petani. Situasi itu menjadikan petani Cipari tidak memiliki ikatan maupun hubungan dengan organisasi di luar petani. Bahkan, petani sendiri belum terwadahi dalam suatu organisasi. Menggunakan terminologi

Porta dan Diani (2006: 136) petani Cipari belum bisa memetakan siapa kawan dan lawan. Hal menarik dari petani Cipari adalah mereka tetap melakukan gerakan menuntut hak atas tanah meski dalam kondisi terbatas. Di sini tampak kegigihan dan semangat petani Cipari dalam melakukan perjuangan. Meskipun harus diakui, jumlah petani yang bisa dikerahkan untuk melakukan gerakan masih terbatas dari kalangan para petani penggarap.

Pada masa Reformasi sistem politik lebih terbuka dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pada era ini petani telah memiliki ikatan dan berjejaring dengan lembaga maupun organisasi di luar petani. Jaringan itu merentang dari DPR, partai politik, sejumlah LSM (LBH, KPA, RACA, RAB, LPPSLH) hingga organisasi tani di banyak wilayah. Mengenai hal itu, berikut ini pernyataan SG, penasehat SeTAM:

“Setelah kami (petani, *-pen.*) memiliki ikatan dan hubungan dengan organisasi lain di luar petani, yang dilakukan teman-teman petani yaitu sering melakukan kontak dengan organisasi tersebut. Kami sering SMS, telpon, atau datang ke kantor RAB, atau mereka kadang datang ke Cipari. Yang sering petani tanyakan ke mereka yaitu masukan bagaimana menyelesaikan masalah di lapangan. Seperti, bagaimana menghadapi jika ada pemanggilan oleh aparat, membuat strategi gerakan dan soal internal organisasi tani.” (Wawancara pada 12 April 2013).

Jaringan beberapa elemen itu kemudian membentuk aliansi. Aliansi ini bisa terbangun karena keterbukaan sistem politik. Keberadaan aliansi menjadikan petani tidak berjuang sendirian. Jalinan dengan lembaga-lembaga di luar petani menambah energi bagi petani untuk melakukan perjuangan. Ini tentu saja berbeda dengan masa Orba. Situasi politik Orba berpengaruh pada cara memobilisasi sumber daya untuk aksi kolektif. Pada saat Orba, agen maupun aktor gerakan dituntut mampu mengerahkan sumber daya, baik sumber daya internal maupun eksternal. Artinya, dalam situasi keterbatasan kesempatan politik, agen gerakan dituntut mampu untuk mengoptimalkan dalam memobilisasi struktur.

Upaya yang dilakukan para petani dalam membentuk kelompok dan organisasi tidak begitu saja berkait langsung dengan kesem-

patan politik. Kesempatan politik di era Reformasi, dipergunakan oleh petani Cipari untuk membangun kembali kesadaran kolektif mereka, yaitu menuntut hak atas tanah dan redistribusi tanah. Usaha semacam itu sesungguhnya hanya merupakan rekoleksi terhadap kesadaran yang masih utuh dan ada di benak para petani tentang nilai tanah (alat produksi dan sosial-kultural). Melalui langkah rekoleksi, kohesivitas gerakan dalam menuntut hak atas tanah terbangun kembali. Pada saat bersamaan, muncul keberpihakan dan kehadiran sekutu elit, seperti aktor perubahan, organisasi non-pemerintah, mahasiswa, politikus dan para profesional lain. Kesempatan politik, hanya membuka kembali peluang dan bahkan memberi dukungan politis yang memadai sehingga gerakan petani Cipari menjadi semakin signifikan dalam mencapai tujuan.

Organisasi gerakan dan jaringan sosial merupakan komponen penting dalam setiap gerakan. Pada masa Orba, aktor utama dalam gerakan Cipari adalah para petani penggarap. Mereka adalah, menggunakan istilah Wolf (1966: 2-3), petani yang disebut buruh tani (*peasant*). Mereka adalah orang-orang yang sedang bersengketa dengan pihak perkebunan. Dalam perkembangannya, aktor gerakan tidak hanya buruh tani, tetapi juga mahasiswa. Pada pertengahan kekuasaan Orba, gerakan petani Cipari didampingi oleh kalangan aktivis mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jumlah massa yang bisa dimobilisasi pada masa Orba relatif sedikit. Mereka adalah para petani penggarap tanah perkebunan. Mereka berinteraksi satu dengan lainnya dalam keseharian, sehingga membentuk satu ikatan. Ikatan petani dalam suatu kelompok inilah yang akhirnya menumbuhkan solidaritas dan kesadaran bersama untuk mendapatkan tanah.

Perkembangan aktor gerakan semakin signifikan ketika memasuki era Reformasi. Petani Cipari didukung dan ditemani oleh sejumlah LSM. Namun, aktor utama gerakan tetap petani dan SeTAM. Melalui dan bersama SeTAM petani Cipari membangun gerakan setelah mereka juga membangun organisasi.

Keberadaan OTL di setiap desa dan keberadaan SeTAM mengisyaratkan bahwa kepemimpinan dalam organisasi gerakan mulai ter-

bangun. Organisasi dan kepemimpinan merupakan salah satu aspek dari sumber daya yang dapat dimobilisasi dalam suatu gerakan. Hal itu seperti dinyatakan oleh Morris (dalam Frank 2012: 50) bahwa dalam teori mobilisasi sumber daya setidaknya ada dua aspek penting yang merupakan bagian dari proses mobilisasi, yaitu organisasi dan kepemimpinan. Dua aspek itu diperkuat dengan keberadaan kesempatan politik dan sifat dari sistem politik. Ramuan beberapa aspek itu menjadikan proses mobilisasi gerakan petani Cipari berjalan. Proses mobilisasi yang baik menjadikan organisasi solid. Dalam suatu organisasi, kohesi kelompok diperlukan untuk tindakan kolektif. Kohesivitas kelompok menjadikan hubungan interpersonal kuat. Hal itu membawa kecenderungan masing-masing anggota mempromosikan identitas kelompok sehingga komunikasi antar-anggota menjadi lancar. Kelancaran komunikasi memudahkan pimpinan menjalankan organisasi gerakan sosial.

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor pengembangan dan kelangsungan gerakan sosial. Dalam teori mobilisasi sumber daya disebutkan bahwa para pemimpin memfasilitasi gerakan sosial dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan tujuan, menerapkan strategi dengan mengurangi biaya kelompok, dan memanfaatkan kesempatan untuk tindakan kolektif. Pemimpin memainkan banyak peran seperti, menumbuhkan ide-ide dasar gerakan, merencanakan metode yang tepat untuk menyebarkan ide-ide, membuat mereka diterima, dan mempengaruhi orang untuk bertindak atas nama mereka. Dengan demikian, pemimpin bertindak sebagai ilmuwan sekaligus sebagai propaganda (Frank, 2012: 51).

Selain organisasi dan kepemimpinan, jaringan sosial adalah unsur penting dalam mobilisasi sumber daya. Melalui jaringan tersebut kegiatan suatu kelompok dapat terfasilitasi, sehingga tujuan kelompok akan lebih mudah dicapai (Coelman, 1988: 100). Dalam gerakan petani Cipari semasa Orba belum memiliki jaringan dengan organisasi lain. Bahkan jaringan antarkelompok yang ada di setiap desa pun belum terbentuk. Gerakan yang muncul pada saat itu masih bersifat sporadis. Mereka belum bersatu dalam satu ikatan. Ma-

sing-masing kelompok tani di setiap desa melakukan gugatan terhadap perkebunan.

Situasi itu berbeda pada masa Reformasi. Kesempatan politik dan ruang kebebasan yang mulai terbuka menghasilkan keuntungan bagi gerakan petani Cipari dalam membangun jaringan. Gerakan petani Cipari mulai menyusun jaringan antara petani dengan organisasi non-pemerintah seperti LBH Yogyakarta, KPA, RACA, dan RAB. Petani pun berjejaring dengan partai politik dan DPRD Kabupaten Cilacap. Keterbukaan kesempatan politik menarik banyak pihak untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani Cipari. Jaringan antara petani dengan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terjalin bukan semata inisiasi petani itu sendiri, melainkan juga atas kemauan dan niat dari organisasi non-pemerintah. Hal itu mengindikasikan bahwa gerakan petani Cipari dalam melakukan mobilisasi sumber daya sudah memanfaatkan sumber daya eksternal.

Di era Orba, petani belum bisa memanfaatkan sumber daya di luar petani itu sendiri. Memobilisasi sumber daya eksternal di saat negara dalam posisi kuat memang tidak mudah. Dalam situasi semacam itu, lembaga swadaya masyarakat yang menaruh perhatian pada masalah-masalah agraria pun sangat berhati-hati dalam membela kepentingan petani. Sumber daya eksternal yang bisa dimobilisasi petani Cipari kala itu adalah para aktivis mahasiswa UGM Yogyakarta. Sekelompok mahasiswa ini menjadi motor penggerak dan terlibat langsung dalam gerakan petani. Namun, pemanfaatan sumber daya eksternal tersebut belum bisa menuai hasil. Sebaliknya, pemanfaatan sumber daya eksternal justru sempat menghentikan aktivitas gerakan. Hal itu dikarenakan tokoh aktivis mahasiswa diamankan oleh aparat keamanan negara.

Di masa Reformasi, gerakan petani Cipari berhasil melakukan mobilisasi sumber daya eksternal. Sejumlah LSM, seperti disebutkan di atas, bekerja sama dengan gerakan petani Cipari. Berdasarkan temuan lapangan melalui wawancara kepada sejumlah informan, sumber daya eksternal bukan semata-mata upaya petani membangun jaringan. Namun, itu semua terjadi karena kesempatan politik yang terbuka bagi organisasi masyarakat sipil untuk membantu kepentingan-

an petani. Ini artinya, LSM yang ada memanfaatkan momentum era keterbukaan untuk melakukan aktivitas mereka. Hal ini tentu saja, sudah menjadi visi maupun misi organisasi setiap LSM. Dengan demikian, perubahan lingkungan politik yang ada, juga dimanfaatkan oleh organisasi non-pemerintah untuk membela kepentingan petani. Di titik inilah, ‘gayung bersambut’. Kepentingan petani dan sejumlah organisasi non-pemerintah bertemu untuk melakukan gerakan kolektif. Keberadaan organisasi non-pemerintah dalam gerakan petani Cipari juga menunjukkan ada perbedaan taktik dan strategi gerakan petani Cipari.

Strategi dan bentuk gerakan petani berbeda antara masa Orba dan sesudahnya. Pada masa Orba, wujud gerakan petani Cipari adalah melakukan gugatan terhadap negara atas tanah HGU yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan. Petani membuat surat permohonan yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten dan perkebunan. Surat itu berisi maksud agar tanah HGU perkebunan yang ditelantarkan dapat digarap oleh petani sekitar kebun. Pada saat itu, petani tidak berani melakukan okupasi tanah secara terbuka dan massal dengan pertimbangan ada risiko besar. Petani secara individual dan diam-diam menggarap tanah perkebunan yang ditelantarkan. Cara seperti ini dilakukan untuk menghindari perlawanan dari pihak perkebunan. Dalam bahasa Scott (1976) hal itu disebut perlawanan diam-diam.

Di era Reformasi, taktik dan strategi petani mengalami perubahan. Sebagai contoh, bentuk gerakan tidak sekedar melakukan tuntutan terhadap perkebunan, pemerintah, dan BPN. Mereka juga melakukan okupasi tanah (pendudukan tanah). Okupasi tanah ini untuk memperlihatkan bahwa secara *de facto* petani telah menguasai tanah, meskipun secara legal penguasaan tanah masih berada di tangan perusahaan perkebunan. Selain itu untuk menegaskan bahwa petani benar-benar membutuhkan tanah. Bahkan lebih dari itu, okupasi tanah juga menunjukkan bahwa tindakan petani merupakan wujud ‘merebut kembali’ tanah yang hilang.

6.3. Proses *Framing*

Setelah pemerintah Orba tumbang, *framing* budaya dalam gerakan petani berubah pula. Selain isu ketidakadilan, isu *landreform* dijadikan isu utama. Isu ini diangkat, bertepatan dengan kemunculan kebijakan tentang pembaruan agraria. Pembingkaiannya sebagai hasil pertemuan dan diskusi antara organisasi petani (OTL dan SeTAM) dengan organisasi non-pemerintah. Direktur Rumah Aspirasi Budiman, JS menuturkan tentang pengkerangkaan isu gerakan petani Cipari sebagai berikut.

“Dalam kaitannya dengan advokasi petani Cipari, RAB melakukan pertemuan dengan lembaga lain, baik yang diadakan di Cilacap maupun Purwokerto. Perwakilan dalam pertemuan itu antara lain dari petani dan lembaga di luar petani, yaitu LBH, KPA, PMII, serta aktivis gerakan lainnya. Dalam pertemuan itu antara lain membahas tentang isu sebagai strategi untuk menarik massa. Akhirnya disepakati dari isu *kembalikan tanah kami* menjadi *laksanakan landreform*.” (Wawancara pada 7 April 2013).

Pernyataan JS di atas menandakan bahwasanya jaringan sosial antarorganisasi menjadi elemen penting dalam setiap gerakan. Melalui jaringan, kerangka isu bisa dirumuskan. Melalui jaringan, aksi kolektif secara besar-besaran lebih mudah dilakukan.

Selain pembingkaiannya, pembingkaiannya budaya juga dilakukan dengan mengangkat nilai tanah sebagai isu penting. Isu ini diangkat agar terbangun rasa solidaritas antarpetani. Rasa solidaritas tersebut diikat oleh kesadaran bahwa tanah bukan sekedar alat produksi. Tanah menjadi sumber sekaligus taruhan hidup rakyat. Bahkan, tanah tidak hanya sebagai simbol eksistensi diri sebagai rakyat, melainkan juga simbol harga diri sebagai manusia pedesaan yang hidup ber-sumber dari sektor pertanian (Mustain, 2016: 4). Sejak awal kemunculan gerakan petani Cipari, aspek kultural menjadi faktor yang memiliki daya luar biasa untuk menggerakkan petani. Sebagai contoh, tanah hasil *trukah* yang hilang karena dirampas oleh negara (perkebunan) menjadi penggerak utama. Para petani menjunjung tinggi dan mempertahankan tanah *trukah* para leluhurnya. Di sini, *trukah*

memiliki makna khusus bagi petani Cipari. Pemaknaan akan nilai tanah semacam ini membentuk karakter jiwa maupun batin petani, bahwa siapa pun yang merampas tanah leluhur pasti akan dilawan. *Spirit* semacam itu muncul dalam ungkapan, '*sedumuk bathuk senyari bumi*'. Nilai kultural ini yang kemudian mendorong petani melakukan gerakan. Artinya, dalam situasi politik seperti apapun, petani berani melakukan perlawanan.

Uraian di atas semakin mempertegas daya juang para petani di Cipari yang tidak pernah pudar meskipun berada dalam iklim politik yang tidak kondusif. Daya juang petani pun semakin besar dalam sistem politik yang demokratis. Hal itu dapat disaksikan pada upaya petani membangun kelompok dan organisasi gerakan yang lebih besar dan solid.

Tiga komponen, yaitu struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan proses *framing* saling berinteraksi secara dinamis dan saling mempengaruhi gerakan petani Cipari. Gerakan petani Cipari bisa berhasil bukan sepenuhnya ditentukan oleh ketiga aspek tersebut. Meski harus diakui, ketiga aspek dimaksud sedikit-banyak turut mewarnai gerakan petani Cipari. Dengan kata lain, ketiga faktor itu tidak selalu memiliki kekuatan sama dalam menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu gerakan sosial.

Berdasarkan temuan lapangan, seperti di bahas dalam dua bab sebelumnya, gerakan petani Cipari mengalami perubahan dari periode kekuasaan ke periode kekuasaan berikutnya. Dalam kesempatan politik yang terbatas pun, petani mampu memobilisasi diri untuk melakukan aksi kolektif. Dalam tekanan negara yang kuat sekalipun, petani Cipari mampu membingkai isu sebagai landasan untuk melakukan aksi serta memobilisasi massa pendukung.

Kepemimpinan, seperti figur seorang pemimpin, menjadi faktor penggerak aksi kolektif. Para pemimpin gerakan membingkai atau menetapkan dan menafsirkan peristiwa yang relevan dengan kondisi dan cara untuk memobilisasi konstituen. Hal itu dilakukan untuk menggalang dukungan (Snow dan Benford, 1988: 198). Produk dari kegiatan *framing* ini, dalam arena gerakan sosial disebut sebagai bingkai tindakan kolektif (Snow dan Benford, 1988: 384).

Dalam konteks gerakan petani Cipari, kemunculan nama Rekso sebagai pemimpin gerakan petani Desa Caruy di masa Orba sebagai bukti betapa penting seorang pemimpin gerakan. Dia mampu memobilisasi petani dalam jumlah banyak untuk melakukan aksi bersama. Padahal, kala itu negara dalam posisi kuat dan selalu melakukan kontrol terhadap kemunculan gerakan yang dilakukan oleh rakyat (petani). Pemimpin gerakan di Cipari bukan sebatas pada kemampuan dalam pengerahan massa. Namun, lebih penting dari itu, adalah kemampuan menumbuhkan kesadaran petani akan hak-hak mereka sehingga terdorong untuk terlibat dalam aksi kolektif. Ini artinya, pemimpin gerakan mampu membingkai isu masalah sebagai dasar dan strategi melakukan gerakan.

Keterlibatan organisasi non-pemerintah di Cipari di masa transisi (Reformasi) sedikit banyak telah memberi andil dalam pencapaian hasil gerakan petani Cipari. Namun, tanpa kehadiran organisasi non-pemerintah petani tetap berani melancarkan gerakan. Jaringan antarorganisasi petani dan jaringan organisasi petani dengan organisasi non-pemerintah memang terjadi pada masa transisi. Namun demikian, bukan petani yang aktif membangun jaringan dengan institusi lain. Sejumlah organisasi non-pemerintah berinisiasi untuk membela dan terlibat dalam gerakan petani. Artinya, sejumlah LSM dan organisasi lain di era keterbukaan sistem politik, aktif dan giat memberikan advokasi kepada petani. Kondisi ini tentu saja berbeda dengan masa-masa sebelumnya.

Pada saat negara tidak memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat sipil dan selalu memberikan perlawanan setiap kemunculan gerakan sosial, LSM tidak pernah hadir memberikan dukungan kepada petani. Jadi, kesempatan politik bukan faktor pendorong utama bagi petani Cipari. Kultur dan sifat militansi yang melekat pada diri petani sebagai penggerak utama petani melakukan gerakan. Hal itu semua terbukti, meski harus melalui jalan panjang dengan dinamika tersendiri, gerakan petani berhasil mencapai tujuan. Dinamika gerakan petani secara singkat dapat disimak pada Tabel 6.1.

6.4. Dampak Gerakan Petani Cipari

Dilihat dari sisi tujuan, gerakan yang dilakukan petani Cipari mengalami perubahan. Di masa Orba, tuntutan petani adalah agar tanah yang dikuasai perkebunan dan ditelantarkan bisa digarap oleh masyarakat sekitar kebun dengan sistem bagi hasil. Hal itu berbeda dengan pada masa Reformasi. Pada masa Reformasi, tujuan petani melakukan gerakan bukan sekedar untuk menguasai tanah dengan sistem bagi hasil, melainkan menuntut agar tanah HGU perkebunan yang ditelantarkan dapat didistribusikan kepada masyarakat sekitar, terutama para penggarap.

Ada sejumlah argumen bahwa organisasi gerakan (SMOs) jarang memiliki dampak karena demokrasi bekerja begitu buruk. Sementara argumen lain beranggapan bahwa SMOs memiliki dampak kecil karena demokrasi bekerja dengan baik. SMOs bekerja buruk karena pemerintah tidak merespons atau tidak demokratis (Burstein, 1999: 3). Meskipun demikian, Burstein (1999: 12) menyatakan bahwa SMOs memiliki sedikit dampak langsung pada tindakan legislatif ketika mereka dengan jelas menentang dan mengekspresikan keinginan mayoritas rakyat.

Dalam konteks Cipari, gerakan yang dilakukan oleh organisasi petani berhasil dalam memperoleh hak atas tanah. Mereka secara terang-terangan melakukan gerakan dan mereka mengekspresikan keinginan masyarakat. Keberhasilan gerakan tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari kebijakan negara. Hal itu dikarenakan gerakan sosial memiliki keterkaitan dengan kebijakan publik (Meyer, 2003: 1).

Mengikuti argumen Meyer tersebut, gerakan petani Cipari dalam menuntut hak atas tanah memiliki keterkaitan dengan kebijakan. Di era Orba ketika tidak ada kebijakan agraria yang berpihak pada kepentingan petani, ujungnya, gerakan petani tidak memperoleh hasil. Baru ketika terjadi perubahan iklim politik dengan disertai kemunculan kebijakan di bidang agraria, gerakan petani berhasil mendorong pemerintah melaksanakan redistribusi tanah.

Melalui serangkaian panjang, gerakan petani Cipari berhasil mendapatkan tanah. Petani tidak hanya berhasil menguasai tanah.

Petani juga memiliki tanah dengan bukti hak milik berupa sertifikat tanah. Petani berhasil mendapatkan tanah seluas 291 hektar. Tanah tersebut berlokasi di tiga desa, yaitu Desa Mekarsari, Desa Sidasari, dan Desa Caruy. Tanah itu kemudian didistribusikan kepada 5.141 petani di lima desa sekitar kebun. Setiap petani rata-rata memperoleh 500 m². Rincian petani di lima desa yang mendapat distribusi tanah yaitu, petani Desa Mekarsari (941 orang), petani Desa Sidasari (1.003 orang), petani Desa Kutasari (1.173 orang), petani Desa Caruy (1.137 orang), dan petani Desa Karangreja (886 orang). Tanah yang didistribusikan kepada petani adalah tanah hak milik dengan sertifikat dari BPN.

Jika ditilik dari aktor serta anggota yang terlibat dalam gerakan, sebagian besar anggota gerakan petani Cipari adalah buruh tani dan petani penggarap (petani yang tidak memiliki tanah). Ketika tanah sudah dijadikan objek untuk didistribusikan kepada masyarakat, OTL dan SeTAM tidak memiliki wewenang mutlak untuk mendistribusikan tanah. Distribusi tanah dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap. Dalam praktik kepanitiaan, ada anggota OTL dan SeTAM terlibat dalam kepanitiaan. Namun, keterlibatan mereka bukan sebagai organisasi gerakan, melainkan individual. Dalam putusan distribusi tanah, usulan OTL dan SeTAM agar distribusi tanah diprioritaskan bagi para penggarap tidak terealisasi. Mengenai hal itu, berikut petikan wawancara dengan SG, penasehat SeTAM:

“OTL dan SeTAM sepakat bahwa tanah HGU yang menjadi objek redistribusi diprioritaskan bagi para penggarap. Ini dimaksudkan agar luasan tanah garapan layak untuk usaha tani. Kalau semua penggarap sudah mendapatkan tanah, sisanya baru diperuntukkan bagi warga lain (prasejahtera). Akan tetapi, karena soal redistribusi tanah ini pemerintah kabupaten memiliki wewenang dan peran besar dalam menentukan calon penerima, akhirnya ditetapkan calon penerima tanah adalah selain penggarap, juga semua keluarga prasejahtera” (Wawancara pada 3 Oktober 2013).

Penerima tanah redistribusi dikelompokkan dalam enam kelompok. *Pertama*, para penggarap yang menggarap tanah dengan

menggunakan sistem sewa dari perusahaan perkebunan. Kelompok ini memperoleh prioritas utama agar mereka tidak kehilangan tanah garapan. Perlu diketahui tanah yang diterima melalui redistribusi ini jauh lebih kecil dibandingkan tanah garapan sebelumnya. Mereka hanya menerima rata-rata seperempat dari tanah garapan sebelumnya. **Kedua**, keluarga prasejahtera yang berdomisili di lima desa dengan status tidak memiliki tanah sawah. Jumlah kelompok ini paling banyak dibandingkan dengan kelompok lain. **Ketiga**, mereka yang telah menikah atau berstatus rumah tangga, tetapi masih tinggal bersama orang tua dalam satu rumah. Demikian pula mereka yang menempati pekarangan orang lain dengan sistem *ngindhung*. **Keempat**, mereka yang disebut sebagai kelompok pejuang ataupun aktivis. Mereka adalah orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam gerakan reklamasi tanah yang dimotori oleh OTL dan SeTAM. **Kelima**, para panitia di tingkat kecamatan maupun desa. Artinya, semua orang yang menjadi panitia distribusi lahan berhak menerima tanah bagian. **Keenam**, keluarga prasejahtera yang tinggal di luar lima desa sasaran. Kelompok ini bisa mendapatkan tanah melalui tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh. Mereka bisa mendapatkan tanah dengan syarat membayar uang kompensasi.

Dasar pembagian tanah dengan membuat enam kelompok yang berhak mendapat tanah itu mengagalkan slogan 'tanah hanya untuk petani dan buruh tani tak bertanah'. Pembagian itu juga mengurangi kemandirian petani ketika sudah memiliki tanah hasil distribusi. Sistem pembagian tanah yang dipraktikkan tidak ada kategorisasi luasan tanah. Semua memperoleh tanah dengan luasan sama, yaitu rata-rata 500 m². Luasan yang sempit itu dikarenakan semua keluarga prasejahtera dan keluarga yang tidak memiliki tanah, turut menerima tanah. Alhasil, tanah yang diterima petani sangat sempit. Hal itu menjadikan tanah yang diperoleh kurang memadai untuk usaha tani.

**Tabel 6.1. Dinamika Gerakan Petani Cipari
dalam Menuntut Hak atas Tanah**

		Kurun Waktu	
		Orde Baru	Reformasi
1.	Struktur Kesempatan Politik:		
	- Akses politik	Dalam sistem politik yang represif, akses petani ke lembaga politik/lembaga pemerintah sangat terbatas, sehingga petani tidak bisa melakukan gerakan secara leluasa.	Sistem politik mulai terbuka, petani memiliki akses ke lembaga pemerintah, seperti Pemprov, Pemkab, dan BPN, serta ke lembaga politik, seperti DPRD dan partai politik. Terbukanya akses politik dimanfaatkan petani untuk mengajukan tuntutan ke lembaga tersebut agar tanah HGU perkebunan didistribusikan kepada petani penggarap.
	- Keberadaan kebijakan	Di era ini tidak ada kebijakan yang berpihak kepada petani sehingga mereka menemui hambatan dalam melakukan tuntutan kepada negara maupun perkebunan. Petani melakukan tuntutan ke perkebunan melalui pemerintah desa.	Di era keterbukaan ini, MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Program Pembaruan Agraria Nasional. Dengan demikian petani dengan mudah melakukan tuntutan kepada negara/perkebunan, agar tanah HGU yang ditelantarkan dapat didistribusikan kepada para penggarap.
	- Aliansi	Petani tidak memiliki ikatan dengan lembaga lain di luar petani. Karena itu petani berjuang sendirian dalam menuntut hak atas tanah. Tidak satu pun lembaga nonpemerintah yang menjadi kawan petani. Ini dikarenakan kondisi politik saat itu tidak memungkinkan bagi organisasi gerakan di luar petani untuk terlibat dan membantu kepentingan petani.	Petani memiliki ikatan dengan Pemerintah Desa, DPR, partai politik dan LSM. Aliansi ini bisa terjalin karena sistem politik memberikan ruang bagi organisasi masyarakat sipil maupun lainnya untuk terlibat dan memberikan dukungan kepada petani. Artinya, dalam melakukan gerakan, petani memiliki kawan yang cukup banyak sehingga energi gerakan semakin besar.

	- Kecenderungan represif	Kecenderungan negara untuk melakukan represi setiap kemunculan suatu gerakan, membuat petani tidak bisa melakukan gerakan secara bebas dan terang-terangan. Setiap petani melakukan gerakan selalu mendapat perlawanan dari pihak perkebunan dengan dibantu aparat keamanan negara. Oleh sebab itu, gerakan petani mengalami pasang-surut.	Dalam posisi negara lemah, petani beserta sekutunya dengan mudah melakukan gerakan. Gerakan pada saat itu lebih bersifat terbuka dan terang-terangan. Petani bisa melakukan gerakan secara terus-menerus hingga memperoleh hasil.
2.	Struktur Mobilisasi:		
	- Aktor	Sistem politik yang otoriter dan tertutup menjadikan petani melakukan gerakan sendiri. Pada saat itu tidak ada LSM yang membantu perjuangan petani untuk melakukan gerakan. Baru pada pertengahan kekuasaan Orba petani mendapat dukungan dari aktivis mahasiswa UGM.	Sistem politik yang sedang dalam masa transisi, petani tidak berjuang sendirian. Pada saat itu banyak LSM datang dan membantu petani melakukan gerakan. Selain OTL, SeTAM merupakan aktor penting di era ini.
	- Organisasi	Dalam politik yang otoriter petani tidak berani membentuk organisasi gerakan secara formal. Mereka melakukan gerakan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang tersebar di setiap desa. Terbentuknya kelompok gerakan didasarkan atas kepentingan yang sama, yaitu untuk menggarap tanah HGU perkebunan.	Dalam sistem politik yang lebih terbuka, petani berani membentuk organisasi (Organisasi Tani Lokal; OTL). Selain itu petani membentuk organisasi yang lebih besar dan mapan, yaitu SeTAM. Organisasi ini dibentuk dari berbagai OTL di setiap desa.

	- Jaringan	Petani belum/tidak memiliki jaringan dengan organisasi non-pemerintah. Sebab, di masa kekuasaan yang otoriter tidak ada satupun Ornop yang berani membela petani. Terlebih lagi, gerakan petani menuntut hak atas tanah.	Dalam masa transisi ini, banyak organisasi non-pemerintah yang datang ke Cipari untuk memberikan advokasi dan dukungan kepada gerakan petani. Pada saat itu terjalin hubungan antar-OTL, OTL dengan SeTAM, LBH, KPA, RAB dan lainnya.
	- Sumber daya eksternal	Meskipun sistem politik tidak memberikan ruang bagi munculnya gerakan, petani tetap berusaha melakukan gerakan. Pada saat itu petani mendapat dukungan dari aktivis mahasiswa UGM.	Di era keterbukaan ini, petani bisa memanfaatkan berbagai macam sumber daya eksternal dalam melakukan gerakan. Sumber daya eksternal dimaksud adalah sejumlah LSM, seperti LBH, KPA, RACA, dan RAB.
	- Bentuk gerakan	Dalam iklim politik yang otoriter, maka bentuk gerakan yang dilakukan petani yaitu mengajukan permohonan kepada perkebunan melalui pemerintah kabupaten agar tanah HGU yang ditelantarkan bisa digarap oleh masyarakat sekitar kebun.	Terbukanya kesempatan politik dan ruang kebebasan petani berani melakukan okupasi tanah perkebunan. Setelah okupasi tanah dilakukan, petani mengajukan permohonan ke pemerintah (BPN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten) agar tanah HGU yang ditelantarkan dapat didistribusikan kepada masyarakat sekitar kebun.
3.	Proses Framing:	Di saat kekuasaan negara begitu kuat, petani menggunakan isu “kembalikan tanah kami”. Ini didasarkan atas keyakinan petani bahwa tanah hasil <i>trukah</i> para leluhurnya dirampas oleh negara untuk kepentingan perkebunan.	Di era reformasi, petani menggunakan isu ketidakadilan atas tanah dan <i>landreform</i> untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat luas, agar mereka mau terlibat dalam gerakan. Oleh karena itu, isu yang diangkat adalah “ <i>laksanakan landreform</i> ”.

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya menunjukkan bahwa struktur kesempatan politik tidak selamanya berpengaruh terhadap gerakan petani Cipari. Artinya, meskipun kesempatan politik tertutup bagi munculnya suatu gerakan, petani Cipari tetap melakukan gerakan. Mesti harus diakui, gerakan petani Cipari mengalami perubahan maupun dinamika dari satu periode kekuasaan ke periode kekuasaan berikutnya. Perubahan dan dinamika gerakan petani dapat dilihat dari cara memobilisasi sumber daya serta pembingkaihan isu (proses *framing*) yang selalu menyesuaikan kondisi lingkungan politik pada saat itu, baik lingkungan politik lokal maupun nasional.

Hasil temuan memperlihatkan munculnya gerakan petani disebabkan oleh hilangnya tanah *trukah* para leluhurnya yang dirampas oleh negara untuk kepentingan perkebunan. Hal ini membuat petani berupaya merebut kembali tanah yang hilang sebagai bentuk mempertahankan tanah warisan leluhurnya. Perubahan dan dinamika gerakan petani dapat dilihat dari masa kekuasaan Orde Baru ke masa reformasi. Di masa Orde Baru, di mana negara begitu kuat, petani Cipari tetap melakukan gerakan. Pada saat itu struktur kesempatan politik tidak memberikan ruang bagi petani untuk melakukan gerakan. Demikian pula, struktur mobilisasi, seperti organisasi gerakan, jaringan sosial antarorganisasi, serta dukungan organisasi di luar petani belum tersedia. Petani Cipari lebih menekankan pada mobilisasi internal, yaitu membangun solidaritas antarpetani. Nilai sosial-kul-

tural dijadikan dasar dan strategi melakukan gerakan. Oleh sebab itu, meskipun negara begitu mendominasi dan hegemonik tetapi petani Cipari berani melakukan gerakan.

Pergantian kekuasaan, era Orde Baru ke era Reformasi, berpengaruh pada bentuk dan sifat gerakan petani Cipari. Di masa transisi, struktur kesempatan politik terbuka bagi munculnya serta berkembangnya sebuah gerakan. Kesempatan politik semacam itu secara tidak langsung berpengaruh pada mobilisasi sumber daya, baik sumber daya internal maupun eksternal. Artinya, agen gerakan dengan mudah memobilisasi massa untuk mendukung gerakan. Di sini, gerakan petani terus melakukan tuntutan terhadap negara, meskipun negara sudah mulai menyediakan fasilitas untuk kembalinya tanah petani. Misalnya, munculnya Ketetapan MPR No IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Di samping itu, negara mengagendakan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Pada saat yang bersamaan petani mendapat dukungan dari banyak pihak, mulai dari LSM, partai politik, media, dan kekuatan masyarakat sipil lainnya.

Perjalanan panjang gerakan petani sebagaimana disebutkan di atas menandakan bahwa petani Cipari merupakan agen gerakan yang aktif, dinamis dan militan dalam memperjuangkan hak atas tanah. Sebab, dalam kondisi dan iklim politik macam apapun petani terus melakukan gerakan. Realitas menunjukkan bahwa gerakan petani pertama kali muncul pada masa kekuasaan Orde Lama, kemudian berlanjut pada masa Orde Baru, dan baru berakhir pada masa reformasi, di mana petani berhasil memperoleh hak milik tanah secara legal.

7.2. Refleksi Teoritis

Memperhatikan gerakan petani Cipari dalam memperjuangkan tanah dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa petani sebagai subjek-aktif terus melakukan tuntutan kepada negara, dalam konteks Cipari adalah pihak perkebunan. Sebagai subjek-aktif, jika dikaitkan

dengan sejumlah teori gerakan sosial, gerakan petani Cipari menawarkan sejumlah tesis.

Tidak seperti asumsi McAdam, gerakan petani Cipari ternyata menunjukkan karakter berbeda. Argumen McAdam et.al (1996) menyatakan bahwa setiap gerakan sosial muncul dan berkembang ketika kesempatan politik (POS) terbuka lebar. Apa yang diungkapkan McAdam bukan saja tidak sesuai dengan fakta gerakan petani Cipari, tetapi sekaligus menampilkan kelemahan teori McAdam yang selama ini banyak menjadi rujukan dalam menjelaskan gerakan sosial. Petani Cipari dalam rezim kekuasaan apapun selalu melakukan gerakan menuntut hak atas tanah. Artinya, petani melakukan gerakan bukan karena kesempatan politik yang terbuka, melainkan karena menuntut kembali tanah yang hilang. Satu titik lemah McAdam adalah senantiasa mensyaratkan POS dan menekankan sumber daya eksternal. Terlalu menekankan sumber daya eksternal, berarti menghilangkan atau paling tidak mengabaikan faktor internal gerakan petani itu sendiri yang sekaligus berposisi sebagai subjek-aktif dalam melakukan gerakan dinamis. Dengan kata lain, menekankan sumber daya eksternal senantiasa menempatkan petani sebagai objek-pasif. Konsekuensi logis dari hal itu adalah sejak awal pandangan McAdam telah menempatkan setiap komunitas gerakan sosial tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, tidak akan bisa melakukan gerakan sosial.

Buku ini menemukan bahwa gerakan petani Cipari muncul sejak masa Orde Lama, dan terus berlangsung hingga pascakekuasaan Orde Baru. Pada era Orde Baru ketika negara tampil begitu kuat yang menjadikan struktur kesempatan politik terbatas, gerakan petani Cipari tetap eksis dan berlangsung. Ini artinya, petani berani melakukan gerakan karena faktor internal yang ada. Realitas ini menolak pandangan tentang pembebasan kognisi (*cognitive liberation*) sebagaimana dinyatakan McAdam (1999). Dia berpendapat bahwa mengubah respons seorang anggota masyarakat untuk menjadi penentang utama membutuhkan perubahan atas kondisi politik yang sedang berlangsung agar menjadi seperangkat 'isyarat kognitif (*cognitive cue*)' yang bermakna bagi perlawanan. Namun, dalam konteks gerakan petani Cipari, pembebasan kognisi terlalu bersifat rasional

sehingga mengabaikan emosi dan menolak kemungkinan lain (Godwin, 2000: 17).

Fakta ini sekaligus menunjukkan titik lemah komponen kedua yang ditawarkan McAdam, yaitu struktur mobilisasi yang menekankan faktor eksternal, misalnya organisasi dan jaringan. Gerakan petani Cipari berlangsung bukan terletak pada aspek struktural, seperti keterbukaan kesempatan politik, keberadaan organisasi, dan jaringan. Gerakan petani Cipari berlangsung lantaran aspek kultural begitu kuat. Aspek kultural itu adalah kesadaran bersama mempertahankan pesan leluhur yaitu tanah *trukah* harus dipertahankan sampai mati. Hal itu tertuang dalam ungkapan '*sedumuk bathuk senyari bumi*'.

Harus diakui bahwa peran struktur mobilisasi cukup signifikan dalam memberikan penjelasan tentang gerakan sosial (seperti keterlibatan individu dalam aksi kolektif, taktik gerakan, dan ketersediaan organisasi gerakan). Namun demikian, dalam kasus gerakan petani Cipari proses struktur mobilisasi tercipta karena faktor internal. Dalam hal organisasi misalnya, sejak awal petani Cipari mempunyai inisiatif sendiri untuk membentuk organisasi Ketanbanci. Pada masa Orde Baru, organisasi itu digunakan sebagai instrumen gerakan. Dalam pemahaman McAdam, organisasi diletakkan sebagai faktor eksternal terutama dalam kemampuan memobilisasi sumber daya. Beberapa unsur sumber daya eksternal yang dimaksud McAdam adalah uang, media, tenaga kerja, solidaritas, legitimasi, dan dukungan dari elit kekuasaan. Fakta dalam gerakan petani Cipari menunjukkan bahwa gerakan petani Cipari lebih menekankan unsur solidaritas. Unsur tersebut justru menjadi energi utama dalam gerakan mereka. Dengan demikian, solidaritas bukan merupakan unsur sumber daya eksternal dalam gerakan petani Cipari. Dalam gerakan petani Cipari, unsur solidaritas justru menjadi sumber daya internal.

Terlalu menekankan faktor sumber daya eksternal sebagai hal penting dalam membaca gerakan petani Cipari malah cenderung menempatkan posisi petani hanya sebagai objek-pasif. Dalam kasus gerakan petani Cipari, jika terlalu ketat mengikuti teori McAdam, akan mengecilkan peran komunitas petani itu sendiri yang sejak awal telah melakukan gerakan sosial secara konsisten. Alih-alih menghar-

gai keberhasilan gerakan petani Cipari, penekanan faktor eksternal akan mudah mengabaikan peran petani dalam melakukan gerakan.

Penekanan berlebih pada aspek eksternal dalam melihat gerakan petani Cipari akan mudah tergelincir pada pemahaman bahwa faktor eksternal, seperti keterlibatan LSM, elit internal maupun eksternal, dan struktur kesempatan politik, menjadi kunci keberhasilan gerakan mereka. Padahal, dapat dimungkinkan bahwa keterlibatan faktor eksternal akan memudahkan mereka dalam melakukan pendakuan atas keberhasilan gerakan petani. Hal itu juga sekaligus mengabaikan peran utama petani itu sendiri dalam melakukan gerakan sosial menuntut kembali hak atas tanah yang dirampas negara.

Dalam konteks gerakan petani Cipari, banyak LSM hadir pasca-kekuasaan Orde Baru. Hal itu berkaitan dengan situasi politik yang mulai terbuka. Mereka melakukan pendampingan kepada petani dan membantu penyelesaian masalah yang dihadapi petani. Namun, gerakan petani Cipari mengalami penguatan justru sebelum kesempatan politik terbuka. Secara kritis, muncul ungkapan petani 'kenapa tidak dari dulu para LSM itu datang membela kami'.

Menekankan faktor eksternal sebagaimana teori McAdam lebih cenderung berorientasi hasil dan mengabaikan proses sebuah gerakan sosial. Fakta menunjukkan bahwa gerakan petani Cipari tidak muncul tiba-tiba, tetapi merupakan sebuah proses historis yang panjang. Gerakan mereka tidak berlangsung secara terputus-putus, tetapi merupakan gerakan berkesinambungan dan konstan. Konsistensi gerakan itu terjadi lebih banyak bersumber dari dalam, yaitu nilai kultural.

Berkenaan dengan pandangan McAdam, unsur framing dalam teori McAdam memang lebih banyak berkesesuaian dengan gerakan petani Cipari. Hal itu dapat dilihat melalui misalnya, isu ketidakadilan di masa Orde Baru, berubah menjadi isu *land reform* di era Reformasi.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, ada dua tesis yang dapat ditawarkan dalam buku ini. **Pertama**, gerakan sosial bukan sekadar aktivitas terputus-putus, tetapi merupakan aktivitas berkesinambungan tanpa harus berakhir pada ketercapaian sebuah tujuan. Dengan kata lain, sebuah gerakan sosial bukan berorientasi hasil, te-

tapi merupakan proses dinamis yang dilakukan oleh aktor untuk melakukan perubahan maupun perlawanan. *Kedua*, faktor pendorong dalam sebuah gerakan sosial lebih bersifat kultural. Hal itu menciptakan kesadaran bersama untuk mempertahankan sumber daya ekonomi maupun politik. Dengan demikian, gerakan sosial lebih bersifat deterministik kultural, dalam arti, faktor kultural yang bersifat internal lebih menentukan daripada faktor sosial-politik yang bersifat eksternal.

7.3. Rekomendasi untuk Studi Lanjut

Pascakekuasaan Orde Baru runtuh, gerakan reklamasi atas tanah yang dilakukan oleh petani semakin masif. Gerakan itu hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan reklamasi atas tanah ini, sebagian besar terjadi di daerah kawasan perkebunan dan perhutanan. Di sekitar Cipari pun demikian. Tujuan petani melakukan gerakan masih sama, yaitu merebut kembali tanah yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan maupun perhutanan. Meskipun demikian, hingga saat ini sebagian besar gerakan petani belum berhasil menguasai tanah. Oleh karena itu, studi serupa perlu dilakukan guna melihat faktor penyebab kegagalan gerakan petani. Ini penting untuk menguji teori McAdam tentang struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan proses framing.

Berkenaan dengan gerakan petani Cipari, perlu dilakukan studi lanjutan untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat pascaredistribusi lahan. Hal itu direkomendasikan bagi studi lanjutan karena ada indikasi tanah yang telah diterima oleh sebagian petani, kemudian dijual ke petani lain. Kejadian ini apakah berkorelasi dengan ketentuan maupun kriteria penetapan subjek penerima tanah atau karena ada alasan lain. Harus diakui bahwa buku ini belum detail. Namun, setidaknya studi gerakan petani Cipari ini dapat dijadikan informasi awal dan pengalaman merencanakan studi serupa, khususnya kasus-kasus agraria.

DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombi, N., Hill, S., Turner, B.S., 2010. *Kamus Sosiologi*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Achdian, Andi, 2009. *Tanah Bagi Petani Yang Tak Bertanah: Landreform pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*. Bogor: Kekal Press.
- Adhikari, J., 2008. *Land Reform in Nepal Problems and Prospects*. Dedicated to all hard-working farmers of Nepal. http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/land_reform_complete_done.pdf. Diakses 25 Agustus 2014.
- Statistik, Badan Pusat, 2011. *Cilacap Dalam Angka 2011*. Cilacap: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap
- Bachriadi, D., 2012. Gerakan Sosial Pedesaan Sebagai Politik: Sebuah Kamata Teoritik. Dalam Dianto Bachriadi (ed.). *Dari Lokal ke Nasional Kembali ke Lokal: Perjuangan Hak atas Tanah di Indonesia*. Bandung: Agrarian Resource Center (ARC BookS).
- Benford, R., and Snow, D., 2000. Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. *Annual Review of Sociology*, 26 (1), 611.
- Besley, T. and Burgess, R., 1998. *Land Reform, Poverty Reduction and Growth: Evidence from India*. London School of Economics Houghton Street London WC2A 2AE. <http://econ.lse.ac.uk/courses/ec307/L/besleyburgessfinal.pdf>. Diakses 7 Juni 2013.
- Borras Jr. S. dan Kay, C., 2008. Dalam *Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Borras, S.M. and C. Franco, J., 2010. Contemporary Discourses and Contestations Around Pro-Poor Land Policies and Land Governance. *Journal of Agrarian Change*, Vol. 10 No. 1, January 2010.

- Buffonge, A.E.G., 2001. Culture and Political Opportunity: Rastafarian Links to The Jamaican Poor, dalam *Political Opportunities, Social Movements, and Democratization*. Edited Patrick G. Coy. Kent State University, Ohio, USA.
- Burstein, Paul, 1999. Social Movement and Public Policy. Dalam Marco Giugni, et.al. (1999), *How Social Movement Matter*. London: University of Minnesota Press.
- Chamunogwa, A.R., 2012. *Political Economy Analysis of Fast Track Land Reform Programme in Zimbabwe*, A mini thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Governance and Development at the Institute of Development Studies, University of Sussex. <http://zimbabweland.files.wordpress.com/2012/09/final-dissertation-arnold-r-chamunogwa.pdf>. Diakses 12 Maret 2013.
- Coelman, J.S., 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital, *American Journal of Sociology*, Vol. 94. The University of Chicago Press.
- Conning, J. H and James A.R., 2001. *Land Reform and the Political Organization of Agriculture*. Sumber: [http:// ideas.repec.org/p/cpr/ ceprdp/ 3204. html](http://ideas.repec.org/p/cpr/ceprdp/3204.html). Diakses 13 Juli 2013.
- Coy, G.P. *Political Opportunities, Social Movement, and Democratization*. Center for Applied Conflict Management, Kent State University, Ohio, USA.
- Creswell, J.W., 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cristiansen, J., 2011. *Framing Theory*. Dalam The Editor Salem Press (2011) Sociology Reference Guide: Theories of Social Movements. New Jersey: Salem Press.
- Darity, Jr., William, Ed., 2008. Land Reform. *International Encyclopedia of the Social Sciences*. Vol. 4. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA.
- Dawson, R.H., 2007. *Doing Case Study Research: A Practical Guide for Beginning Researchers*. Published by Teachers College Columbia University New York.
- Della Porta, Donatella, 1992. Life Histories in the Analysis of Social Movement Activists. In *Studying Collective Action*. edited by Mario Diani and Ronnyerman. New Delhi: Sage Publication.
- ; Diani, M., 1999. *Social Movements, An Introduction*. Oxford, Massachusetts: Blackwell Publishers.

- Eduardo, Canel., *New Social Movement Theory and Resource Mobilization Theory: The Need for Integration*.
- Fauzi, N., 1999. *Rakyat dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan KPA.
- , 2000. *Reforma Agraria, Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: INSIST Press dan Pustaka Pelajar.
- , 2003. *Pembaruan Agraria Yang Didongkrak Oleh Rakyat*. Dalam *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria*. ed. Noer Fauzi. Yogyakarta: INSIST Press.
- , 2012. *Land Reform Dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Flynn, S.I., 2011. Resource Mobilization Theory, dalam *Sociology Reference Guide*, California: Salem Press.
- Franke, R.W., 1992. Land Reform versus Inequality in Nadur Village, Kerala, *Journal of Anthropological Research*, Vol. 48, No. 2. Published by: University of New Mexico Stable URL. <http://www.jstor.org/stable/3630406>. Diakses 9 Mei 2013.
- Gamson, W.A., and Meyer, D. S., 1996. Framing Political Opportunity. Dalam McAdam, et.al, *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. New York: Cambridge University Press.
- Gerring, J., 2007. *Case Study Research: Principles and Practices*, New York: Cambridge University Press.
- Giugni, M and Yamasaki. S., 2009. The Policy Impact of Social Movements: A Replication Through Qualitative Comparative Analysis. *An International Journal*, 14(4): 467-484.
- Hancock, D.R., 2007. *Doing Case Study Research: A Practical Guide for Beginning Researchers*. New York: Teachers College Columbia University.
- Hartono, M.D., 2004. Reclaiming Rakyat vs TNGM (Taman Nasional Gunung Merapi). *Jurnal Demokrasi*. Vol 11/No 5/2004.
- Hartoyo, 2015. *Cara Baru Petani Menggugat Kebijakan Agraria*. Bandar Lampung: AURA.
- Creswell, J.W., 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Islam, M.R., 2013. Collaboration Between Government and Civil Society: Evidence from the Implementation of Land Reform Program in Bangladesh, *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*. Volume 14, Issue 3 (Jul-Aug 2013).

- Jasper, James M., 1997. *The Art of Moral Protest, Culture, Biography and Creativity in Social Movements*, Chicago: The University of Chicago Press.
- , 2007. Cultural Approach in The Sociology of Social Movements. dalam *Handbook of Social Movement Across Disciplines*, edited by Klandermans and Conny Roggeband, Springer.
- Jenness, V., 1995. *Social Movement Growth, Domain Expansion, and Framing Processes: The Gay/Lesbian Movement and Violence Against Gays and Lesbians as a Social Problem*. *Social Problems*, 42 (1), 145-170.
- Kamajaya, R., 2010. *Transformasi Strategi Gerakan Petani*. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government, UGM.
- Kartodirdjo, S., 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Khasanah, B.I dan Sasmita, N., 2014. Reclaiming Tanah Perkebunan Nyunyor oleh Masyarakat Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar 1964–2014. *Jurnal Publika Budaya*, Volume 3 (2), November 2014.
- Kirby, J., 1973. Venezuela's Land Reform: Progress and Change. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*. Vol. 15, No. 2 (May, 1973). Miami: Center for Latin American Studies.
- Kroef, v.d. and Justus, M., 1984. Penguasaan Tanah dan Struktur Sosial di Pedesaan Jawa, dalam Tjondronegoro dan Wiradi: *Dua Abad Penguasaan Tanah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Lawrence, N., 2003. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: New York, San Francisco.
- Lennart, N., 2009. *WALK: Framing A Successful Agrarian Reform Campaign in the Philippines*, Lund University Center for East and South-East Asian Studies Master Programme in Asian Studies South-East Asia
- Lounela dan Zakaria, 2002. *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. Yogyakarta: Insist Press.
- Lucas, Anton, 2009. Kata Pengantar dalam buku Wiradi, *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- A. dan Warren, C., 2003. The State, the People, and Their Mediators: The Struggle over Agrarian Law Reform in *Post-New Order Indonesia*. No. 76 (Oct., 2003).
- Mas'od, Mochtar, 1997. Kata Pengantar dalam buku: *Tanah dan Pembangunan*. Noer Fauzi, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Mashud, Mustain, 1997. Gerakan Rakyat Lereng Gunung Semeru di Era Reformasi 1997. *Jurnal.unair.ac.id*. Diakses 10 September 2016.
- McCarthy, J.D. and Zald, M.N., 1977. Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory, *The American Journal of Sociology*, Vol. 82, No. 6 (May, 1977), Published by The University of Chicago Press.
- Meyer, David. S., 2003. *Social Movements and Public Policy: Eggs, Chicken, and Theory*. <http://escholarship.org/uc/item/2m62b74d>. Diakses 15 Nopember 2016.
- Morris, A. and Herring, C., 2015. *Theory and Research in Social Movements: A Critical Review*, <http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/51075/307.pdf?sequence=1>. Diakses 14 Juni 2015.
- McAdam, D.; McCarthy, J.D; and Zald, M.N., 2004. Opportunities, Mobilizing Structures, and Framing Processes-Toward A Synthetic. Dalam *Comparative Perspective on Social Movements*. New York: Cambridge University Press.
- McAdam, Douglass, 2004. Conceptual Origins, Current Problems, Future Directions. Dalam *Comparative Perspective on Social Movement*, edited McAdam, et.al. New York: Cambridge University Press.
- , 1999. The Biographical Impact of Activism. In *How Social Movements Matter*, edited by Giugni, et.al., Minneapolis: University of Minnesota Press.
- , 1999. *Political Process and the Development Insurgency, 1930-1970*. Chicago: Chicago University Press.
- Sidney, T., and Tilly, C., 2001. *Dynamics of Contention*, New York: Cambridge University Press.
- and Paulsen, R., 1993. Specifying the Relationship between Social Ties and Activism. In *The American Journal of Sociology*, 99: 640-67.
- McCarthy, John, D., 2004. Constraints and Opportunities in Adopting, Adapting, and Inventing. Dalam *Comparative Perspective on Social Movement*, edited McAdam, et.al. New York: Cambridge University Press.
- Mustain, 2007. *Petani vs Negara, Gerakan Sosial Petani Melawan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- , 2016. Gerakan Rakyat Lereng Gunung Semeru Di Era Reformasi 1997. <http://jurnal.unair.ac.id/filerPDF/04-Mustain.pdf>. Diakses 10 September 2016.
- Mustapit, 2011. Kontestasi, Konflik dan Mekanisme Akses atas Sumberdaya Agraria. *Jurnal J-SEP*. Vol. 5 No. 1 Maret 2011.

- Nash, Kate, 2001. *The Cultural Turn in Social Theory: Toward a Theory of Cultural Politics*. *Sociology*, 35 (1): 77-92.
- Nasikun, 1996. *Industrialisasi, Kapitalisme dan Perkembangan Konflik Pertanahan di Indonesia*. Jakarta: ELSAM.
- , 2002. Pembaruan Agraria Perjalanan Yang Tidak Boleh Berakhir. Dalam buku *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Bandung: Akatiga.
- Nasution, Lutfi I., 2002. Konflik Pertanahan (Agraria). Dalam Suhendar, dkk. 2002. *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Bandung: Akatiga.
- Neil, F., McAdam, D., 2011. Toward a General Theory of Strategic Action Fields. *Sociological Theory* 29:1 March 2011. *American Sociological Association*. 1430 K Street NW, Washington, DC 20005.
- Nurdin, I., 2013. *Dibalik Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN)*, <http://groups.yahoo.com/group/infosawit/message/4094>. Diakses 11 Juni 2013.
- Nurlinda, I., 2013. *Monograf Hukum Agraria: Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Agraria*. Bandung: Logoz.
- Obeng, F., 2012. Land Reform in Afrika: Theory, Practice and Outcome, *Habitat International Journal*. homepage: www.elsevier.com/locate/habitatint. diakses 16 Juli 2013.
- Olson, M., 1966. *The Logic of Collective Action*. Cambridge: Harvard University Press.
- Passy, F., 2003. Social Networks Matter. But How?, dalam Diani, Mario and McAdam, Doug (ed.), 2003. *Social Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action*. New York: Oxford University Press.
- Paige, J.M., 2004. *Revolusi Agraria*. Terjemahan, Pasuruhan: Penerbit Pedati.
- Pelzer, K.J., 1991. *Sengketa Agraria Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Polletta, Francesca, 1998. *Contending Stories: Narrative in Social Movements*, *Qualitative Sociology*, 21(4): 419-446.
- , 2004. *Culture Is Not in Your Head*, Pp. 97-110 in *Rethinking Social Movements: Structure, Meaning and Emotion*, Jeff Godwin, et.al., New York, Toronto, Oxford: Rowman & Littlefield Publisher
- Porta, D. and Diani, M., 2006. *Social Movements: An Introduction*. Australia: Blackwell Publishing.

- Pranoto, S.W., 2012. *Reforma Agraria Ditidurkan? Perspektif Historis-Antropologis*, Makalah Simposium Nasional 2012, Reforma Agraria, Otonomi Daerah, Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Bangsa, UGM, Yogyakarta, 26-27 Maret 2012.
- Prosterman, R., and Mitchell, R., 2002. *Concept for Land Reform on Java*, http://www.ani.com.sg/RDI_LandReformOnJava.pdf.
- Pranadji, T., 2004. *Kemajuan Ekonomi, Reformasi Agraria dan Landreform di Pedesaan*. Bogor: Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian.
- Purdue, D., 2007. Civil Society, Governance, Social Movement and Social Capital. Dalam *Civil Societies and Social Movement*. Routledge/ECPR Studies in European.
- Purwanto, B., 2009. Kata Pengantar. Dalam buku Wiradi, 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Purwanto, H., 2015. *Local to Global: How Serikat Petani Indonesia Has Accelerated the Movement for Agrarian Reform*. Sumber: <http://viacampusina.org/downloads/pdf/openbooks/EN-13.pdf>. Diakses 5 Juli 2015.
- Rahman, M., 2009. *Implementasi Reforma Agraria: Studi di Kecamatan Latomu Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Rahmawati, D., 2003. Gerakan Petani dalam Konteks Masyarakat Sipil di Indonesia: Studi Kasus Organisasi Tani Serikat Tani Merdeka (SETAM), *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 6, Nomor 3, Maret 2003.
- Rohiman, 2004. Sengketa Agraria: Konflik yang tak pernah selesai. *Jurnal Demokrasi*. Vol 11/No 5/2004,
- Sabourin, E., 2008 Agrarian Reform in Brazil: a series of missed appointments between social movements and state policies. *Estud.soc.agric*. Vol.4 no.se Rio de Janeiro, 2008.
- Safitri, H. 2010. *Gerakan Politik Forum Paguyuban Petani Batang (FPPB)*, Bandung: Yayasan Akatiga.
- Scott, J.C., 1976. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.
- , 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press.
- Seriadi, A., 2012. *Advokasi Dalam Penyelesaian Konflik Agraria*, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP UI.

- Shohibuddin, M. dan Lutfi, A.N., 2010. *Land Reform Lokal Ala Ngandagan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- , 2007. *Dimensi Etis Dalam Revitalisasi Identitas Ngata Untuk Klaim Atas Teritori dan Sumberdaya Lokal*. Perjuangan Otonomi Desa di Sebuah Komunitas Tepi Hutan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah. Renai: Kajian Politik Lokal dan Sosial-Humaniora. Pustaka Perak. No 2.
- Situmorang, W., 2007. *Gerakan Sosial, Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siahaan, H., 1996. *Pembangkangan Terselubung Petani Dalam Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi*. Disertasi, Universitas Airlangga Surabaya.
- Smelser, Neil J., 1962. *Theory of Collective Behavior*. New York: Free Press.
- Soetarto, E., 2007. Land Reform by Leverage: Kasus Redistribusi Tanah di Jawa Timur. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, Vol 1/2007.
- Stekelenburg, J. and Klandermans, B., 2007. Individuals in Movements: A Social Psychology of Contention. Dalam *Handbook of Social Movement Across Disciplines*, edited by Klandermans and Conny Roggeband, Springer.
- Sujiwo, T.A., 2000. Dinamika Strategi Petani Pasca-1965 di Indonesia. *Jurnal Analisis Ilmu Sosial*. Vol. 15, No. 1 Juni 2000.
- Taib, R., 2010. Transformasi Identitas Gerakan dari Petani menjadi Masyarakat Adat. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. Vol 4, No 2, 2010.
- Tarrow, Sidney, 1989. *Struggles, Politics, and Reform: Collective Action, Social Movements and Cycles of Protest*, Cornell Western Societies Paper no. 2. Ithaca, New York: Center for International Studies.
- , 2011. *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. New York: Cambridge University Press.
- Tauchid, M., 1952. *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Jakarta: Tjakrawala.
- Tilly, C., 2004. *Social Movement 1768-2004*. London: Paradigm Publishers Boulder.
- , 1977. *From Mobilization to Revolution*, University of Michigan.
- Tjondronegoro, S.M.P. dan Wiradi, G., 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: PT Gramedia.

- Tridico, F., 2012. *Social Movement Theory and Far Right Organizations*, Dissertation the Graduate School of Wayne State University.
- Vu, T., 2008. *Indonesia's Agrarian Movement: Anti-Capitalism at A Crossroads*, Department of Political Science, University of Oregon. Sumber: <https://casprofile.uoregon.edu/sites/casprofile1.uoregon.edu/files/Indonesia%20Agrarian%20Movement%20Sept%2008.pdf>. Diakses 13 Juli 2013.
- Wahyudi, 2005. *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani, Kasus Reklamasi/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII Kalibakar Malang*. Malang: Penerbit UMM.
- William A.G. and David S.M., 2004. *Framing Political Opportunity*. Dalam McAdam, et.al. *Comparative Perspective on Social Movement*. New York: Cambridge University Press.
- Wiyana, A., 2009. Perspektif Sosiologis Administrasi Pertanahan: Sebuah Paradigma Alternatif dalam Mewujudkan Keadilan Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah. Dalam *Resonansi Reforma Agraria*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Wiradi, G., 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan Belum Berakhir*. Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar.
- , 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Wolf, E.R., 1966. *Peasants: A Foundation of Anthropology*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Wolford, W., 2010. Participatory Democracy by Default: land reform, social movements and the state in Brazil, *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 37, No. 1, January 2010.
- Woodside, A.G., 2010. *Case Study Research: Theory, Methods, Practice*. Bingley: Emerald Group Publishing.
- Yin, R.K., 2002. *Case Study Research: Design and Methods*. London: Sage Publication Ltd. Bonhill Street.
- , 2003. *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Terjemahan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zawojkska, A., 2004. Process of Land Reforms in Poland: Explanation by Using Theories of Institutional Change and Theories of Political Behavior. *Electronic Journal of Polish Agricultural Universities*. 2004. Volume 7, Issue 1, Series Economics.

Buku ini menelaah gerakan petani Cipari dalam menuntut hak atas tanah trukah dari pencaplokan tanah dengan skema HGU yang dilakukan PT Rumpun Sari Antan. Dibandingkan dengan kasus-kasus yang sama terjadi di tempat lain, gerakan yang dilakukan para petani Cipari menuai hasil. Mereka memperoleh hak milik atas tanah. Menggunakan perspektif gerakan sosial yang meliputi political opportunity structure, mobilizing structure, dan teori budaya, buku ini mengurai tentang dinamika gerakan petani Cipari sejak kolonial, pascakemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru hingga memasuki era Reformasi.

Buku ini tidak sekedar melakukan penjelasan tentang gerakan petani Cipari semata. Buku ini juga memberikan refleksi kritis atas beberapa perspektif gerakan sosial. Melalui buku ini, terbaca pendekatan gerakan sosial yang sangat menekankan aspek struktural relatif tidak memadai untuk menjelaskan gerakan petani Cipari. Selain memberikan informasi berharga tentang gerakan petani, apa yang diurai dalam buku ini bermanfaat bagi dosen, aktivis gerakan sosial, mahasiswa, pegiat LSM, pejabat pemerintah, dan khalayak luas yang berminat pada kajian sosiologi, terutama, sosiologi pertanian, gerakan sosial, dan dinamika desa.

